



ANALISIS PEMANFAATAN PEMBANGUNAN RUMAH MAJAPAHIT DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG MAJAPAHIT

**(Studi Kasus Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit di
Desa Bejijong Kecamatan Trowulan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ANDIKA AVRISTA KUSUMA
NIM. 125030800111006



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PARIWISATA
MALANG

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam masalah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam masalah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Juni 2017

Mahasiswa



Nama : Andika Avrasta Kusuma

NIM : 125030800111006



CURICULLUM VITAE

Nama : Andika Avrasta Kusuma
 Nomor Induk Mahasiswa : 125030800111006
 Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 April 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : andika_avrista.kusuma@yahoo.com
 Pengalaman Magang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (2015)

Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Tahun Belajar	Keterangan
1.	TK Salafiyah, Kab. Mojokerto	1999-2000	-
2.	MI Salafiyah, Kab. Mojokerto	2000-2006	-
3.	SMPN 1 Trowulan, Kab. Mojokerto	2006-2009	-
4.	SMAN 1 Puri, Kab. Mojokerto	2009-2012	Jurusan IPS

Pengalaman Organisasi :

Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMAPAR) FIA UB, Anggota, 2015-2016

Pengalaman Kepanitiaan :

No	Jabatan	Acara	Penyelenggara	Tingkat	Tahun
1.	Kordinator Lapangan	Malam Keakraban (MAKRAB) Mahasiswa Pariwisata	Mahasiswa Pariwisata	Program Studi	2013
2.	Kordinator Transportasi	Studi Banding Mahasiswa Pariwisata	HIMAPAR	Program Studi	2015
4.	Kordinator Perengkapan	<i>Training Organization</i> (TO) HIMAPAR 2015	HIMAPAR	Program Studi	2015





ABSTRACT

Development of Rumah Majapahit is an innovation in tourism development at Trowulan District. Rumah Majapahit is expected to be utilized to support tourism activities in Trowulan District such as homestay or gallery handicraft of citizens. However, after 137 units Rumah Majapahit in Bejjong Village were completed, not a few that buildings changed the function of a coffee shop and grocery store. Therefore, action or strategy of non-conformity control is needed. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The data in this research is taken through interviews, observation, and documentation. The result of this research is a strategy or solution that can be used to control the mismatch of utilization of Rumah Majapahit in Bejjong Village and other village, covering. 1). Periodical guidance to the citizens. 2). Forming of village tourism management agency to realize tourist destinations “Perkampungan Majapahit”. 3). Packaging the tourism potential that has become a tour package to attract tourists visiting. 4). Improve cooperation with tourism service providers. 5). Create and establish long-term tourism development planning “Perkampungan Majapahit”.

Keywords : *Non-Conformity Utilization, Majapahit House, Tourism Promotion, Majapahit Village, Trowulan*

ABSTRAK

Pembangunan Rumah Majapahit merupakan suatu inovasi dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan. Rumah Majapahit tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kecamatan Trowulan seperti pemanfaatan menjadi *homestay* maupun galeri hasil kerajinan tangan warga. Namun setelah 137 rumah Majapahit di Desa Bejjong selesai dibangun, tidak sedikit bangunan tersebut berubah fungsi menjadi warung kopi dan toko kelontong. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan atau strategi pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berupa strategi atau solusi yang dapat digunakan untuk pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan Rumah Majapahit di Desa Bejjong maupun desa lainnya meliputi. 1). Pembinaan secara periodik kepada warga. 2). Pembentukan badan pengelola desa wisata untuk mewujudkan destinasi wisata Perkampungan Majapahit. 3). Pengemasan potensi wisata yang dimiliki menjadi paket wisata untuk menarik minat berkunjung wisatawan. 4). Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penyedia jasa pariwisata. 5). Membuat serta menetapkan perencanaan pengembangan pariwisata jangka panjang “Perkampungan Majapahit”.

Kata Kunci : *Ketidaksesuaian Pemanfaatan, Rumah Majapahit, Promosi Pariwisata, Kampung Majapahit, Trowulan*



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Pembangunan Rumah Majapahit Dalam Mewujudkan Kampung Majapahit (Studi kasus Ketidakesesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Pariwisata Konsentrasi Destinasi Pariwisata mengambil tema skripsi yang berkaitan dengan bisnis pariwisata.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Hidayat dan Ibu Qoriatul Jannah sebagai orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, ilmu, dan kasih sayangnya yang tiada terbatas, juga seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas guna menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yusri Abdillah, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



5. Bapak Dr. Drs. Wilopo, M.AB selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, nasehat, dan masukan, serta dukungan demi menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan mendekati sempurna.
6. Bapak Yusri Abdillah, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan agar penyusunan skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya Dosen jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah membimbing, memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman, juga melatih mental peneliti di dalam maupun di luar perkuliahan, sehingga peneliti memperoleh pembelajaran dan bekal menghadapi dunia. Selain itu, juga seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam membantu segala kepentingan akademik.
8. Pihak DIKTI selaku pencetus beasiswa Bidik Misi yang telah memilih dan memberikan kesempatan luar biasa bagi peneliti untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, peneliti berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga peneliti dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik bagi bangsa dan negara, agama, dan lingkungan masyarakat.
9. Bapak Supriyadi selaku pengusul program rekonstruksi Rumah Majapahit serta perwakilan Disporabudpar Kabupaten Mojokerto dan perwakilan aparaturnya Desa bejjong yang bersedia menjadi narasumber, berkat kesediaannya untuk menjawab segala pertanyaan dari peneliti yang merupakan sumber data utama untuk menganalisis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat tercinta dan sahabat terbaikku sekaligus kawan seperjuangan selama berkuliah di Universitas Brawijaya, Asya Hanif, Rahmawati Sihite, teman-teman grup “anti 8 semester” dan anggota “konco taeq” yang telah membantu dan memberikan semangat dalam berbagai pengalaman dan juga dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Himpunan Mahasiswa Pariwisata (HIMAPAR) yang memberikan pengalaman berharga dalam keorganisasian dan kekeluargaan.



12. Seluruh teman Pariwisata angkatan 2012 yang telah membantu dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

13. Asya Hanif, Amalia Indri, dan Asiah Lestari yang telah membantu mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

14. Ririn P. Kusuma dan Angga Y. Kusuma, kakak-kakak yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan uang saku selama di kota perantauan.

15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Mei 2017

Peneliti,

Andika Avrista Kusuma



DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teoritis.....	18
1. Kajian Pariwisata	18
2. Perencanaan dan Pengelolaan Pariwisata Sejarah (<i>Heritage Tourism</i>)	25
3. Promosi Pariwisata.....	29
4. Kawasan Pariwisata	32
5. Arsitektur Lansekap	33
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	35
7. Geografi Pariwisata.....	36
C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Penentuan Partisipan (<i>Informan</i>).....	48



G. Instrumen Penelitian.....	49
H. Analisis Data.....	50
I. Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Kecamatan Trowulan.....	53
2. Gambaran Umum Desa Bejijong.....	57
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	59
1. Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	59
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	73
3. Penerapan Strategi Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	77
4. Keberlanjutan Pengelolaan Rumah Majapahit.....	82
C. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	93
1. Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	93
2. Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	10
3. Strategi Pengendalian Ketidaksesuaian Rumah Majapahit.....	10
4. Keberlanjutan Pengelolaan Rumah Majapahit.....	11
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	140



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Mojokerto..... 4

Tabel 2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 55

Tabel 3. Lokasi Objek Wisata di Kecamatan Trowulan 56

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Bejjong Menurut Mata Pencaharian Tahun 2015 59

Tabel 5. Macam-macam Pemanfaatan Rumah Majapahit Oleh Warga Desa Bejjong 68

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Seni, Budaya dan Olahraga Disporabudpar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Rumah Majapahit.....	8
Gambar 2. Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 3. Peta Kecamatan Trowulan	53
Gambar 4. Peta Situs Percandian Trowulan.....	56
Gambar 5. Rumah-rumah Majapahit Desa Bejijong.....	67
Gambar 6. Pemanfaatan Rumah Majapahit Menjadi Toko-toko Sembako ..	69
Gambar 7. Pemanfaatan Rumah Majapahit Menjadi Warung dan Toko Alat Tulis.....	70
Gambar 8. Pemanfaatan Rumah Majapahit Menjadi Galeri (<i>art shop</i>) dan <i>Homestay</i>	72
Gambar 9. Promosi Rumah Majapahit Melalui Media Sosial (Instagram @kabarmojokerto)	85
Gambar 10. Brosur Peringatan Ulang Tahun Majapahit “Getah Getih Ring Majapahit”.....	88
Gambar 11. Bagan Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	99
Gambar 12. Bagan Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	106
Gambar 13. Bagan Teori Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit.....	108
Gambar 14. Bagan Keberlanjutan dan Pengelolaan Rumah Majapahit.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata saat ini telah berkembang menjadi salah satu industri yang menjanjikan untuk mendapatkan devisa bagi suatu negara. Setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan serta memaksimalkan sektor pariwisata yang dimiliki. Indonesia merupakan negara yang sedang berupaya untuk mengembangkan dan memaksimalkan sektor industri pariwisatanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan potensi pariwisata sangat melimpah. Karena letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim *sub-tropis*, sehingga memiliki bentang alam yang indah dan lengkap mulai dari pegunungan sampai bawah lautnya.

Selain potensi wisata alam yang sangat melimpah, Indonesia juga memiliki potensi wisata sejarah (*heritage tourism*) yang berupa benda-benda, bangunan maupun situs peninggalan bersejarah. Sebagian dari peninggalan bersejarah tersebar hampir di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan lain sebagainya. Peninggalan bersejarah ini mampu menggambarkan nilai-nilai budaya, hingga sistem sosial masyarakat pada masanya. Menurut Wahab dalam Ariffudin (2013) kegiatan pariwisata yang ingin menggali pengetahuan terhadap pola hidup dan tradisi bangsa lain, kepurbakalaan, sisa-sisa peninggalan bersejarah termasuk dalam bagian pariwisata untuk jenis kebudayaan (*cultural tourism*) atau bisa disebut juga



heritage tourism. Pemanfaatan peninggalan sejarah di masa lalu hanya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan ‘mempelajari’ dan ‘menjual’.

Seiring berkembangnya industri pariwisata diikuti pula dengan terjadinya perubahan pola konsumsi dari para wisatawan yang tidak lagi hanya ingin santai dan menikmati *sun, sea, dan sand*. Menurut Santosa (2012) Pola konsumsi wisatawan telah berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi yakni menikmati kreasi budaya dan peninggalan sejarah serta *nature* atau eko-wisata dari suatu daerah maupun suatu negara. Pengembangan *heritage tourism* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2012 dengan gagasan utama menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata *heritage* yang menawarkan berbagai daya tarik wisata berbasis budaya dan sejarah (beritasatu.com). Pengembangan *heritage tourism* tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki Indonesia, yang memiliki banyak sekali kota-kota dengan kekayaan gedung-gedung bersejarah dan bangunan bersejarah, serta situs-situs peninggalan sejarah kuno.

Salah satu wisata *heritage* yang dimiliki Indonesia dan telah dikenal di mancanegara, bahkan merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia yaitu kompleks per candian Borobudur yang terletak di kota Magelang Jawa Tengah. Selain kompleks per candian Borobudur, Indonesia juga masih memiliki situs per candian yang tidak kalah menariknya dengan candi Borobudur. Situs per candian tersebut adalah Situs Trowulan yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Wilayah Kecamatan Trowulan yang memiliki suatu potensi besar pada sektor pariwisatanya berupa situs



peninggalan kerajaan Majapahit. Situs peninggalan kerajaan Majapahit tersebut berupa bangunan candi-candi peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit yang tersebar di lima Desa diseluruh wilayah Kecamatan Trowulan. Ditemukannya situs percandian di wilayah Kecamatan Trowulan dan sekitarnya, yang menurut para ahli arkeologi merupakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Keberadaan situs-situs percandian tersebut menjadi potensi besar dalam sektor pariwisata di Kecamatan Trowulan. Potensi yang ada tersebut dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), mulai dari perawatan sampai perlindungan situs percandian Kecamatan Trowulan. Selain potensi berupa situs percandian peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kecamatan Trowulan juga mempunyai beberapa potensi lainnya berupa wisata budaya atau kesenian daerah seperti sanggar seni dan usaha kerajinan berupa cinderamata untuk wisatawan, yang bisa dijadikan sebagai suatu atraksi wisata menarik.

Kecamatan Trowulan memiliki keunikan dan daya tarik yang sangat potensial untuk dilakukan pengembangan dalam sektor pariwisatanya yang lebih gencar dan lebih baik agar dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi.

Hal tersebut dapat dipicu dengan kebijakan presiden Indonesia, Joko Widodo yang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019 mendatang (Republika, 2015). Mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Trowulan, seharusnya mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke wilayah Jawa Timur maupun pada tingkat nasional umumnya.

Namun kenyataan yang terjadi di Kecamatan Trowulan tidak demikian. Jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Trowulan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Hal itu berbanding terbalik dengan perkembangan peningkatan akomodasi yang ada di Kecamatan Trowulan. Penurunan jumlah wisatawan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kunjungan Wisatawan di Kecamatan Trowulan

Objek Wisata	Tahun		
	2013	2014	2015
Candi-candi	367.567	336.443	223.578
Situs-situs	33.775	75.776	68.848
Museum Majapahit	249.676	124.215	146.689
Kolam Kuno Ngiluk	48	240	482
Jumlah Total	651.066	536.674	439.597

Sumber : doc.BPCB Mojokerto, Jawa Timur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016)

Sementara itu di sisi lain perkembangan pariwisata yang berada di Kecamatan Trowulan sudah cukup baik dengan didukung oleh tersedianya restoran/rumah makan yang terus meningkat setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dilihat pada katalog Statistik Kecamatan Trowulan Dalam Angka 2015. Tahun 2012 terdapat sejumlah lima restoran/rumah makan besar dan 43 kedai/warung makan, selanjutnya pada tahun 2013 terdapat delapan restoran/rumah makan besar dan 74 kedai/warung makan, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 20 restoran/rumah makan besar dan 178 kedai/warung makan. Sementara untuk penginapan atau hotel di Kecamatan Trowulan

terdapat satu hotel bintang tiga yaitu Sun Place dan juga terdapat satu *homestay* Lesehan Kampung Air.

Ketidakselarasan antara perkembangan pariwisata dengan jumlah wisatawan di Kecamatan Trowulan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan. Menurut Rosyadi dkk (2014) permasalahan tersebut dapat terjadi karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit Kecamatan Trowulan serta koordinasi antara pengelola cagar budaya dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Permasalahan lainnya yang ada di Kecamatan Trowulan diantaranya, seperti belum adanya diversifikasi produk/daya tarik wisatanya atau pembaharuan atraksi wisata yang ada di Kecamatan Trowulan. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh Anwar (2009) sebagai berikut:

“Kurang nya respon serta partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pengembangan industri pariwisata di Mojokerto khususnya di Trowulan juga merupakan suatu kendala yang cukup serius. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peninggalan sejarah dan purbakala, khususnya masyarakat di sekitar Trowulan juga menjadi kendala sekaligus ancaman bagi pengembangan obyek wisata budaya di Trowulan.”

Permasalahan tersebut merupakan ancaman berbahaya bagi perkembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan apabila tidak segera diselesaikan. Adanya potensi besar yang dimiliki harus dapat memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar situs percandian di Trowulan. Potensi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan



Trowulan juga tidak kalah potensialnya dengan potensi wisata sejarah yang ada untuk dikembangkan. Beberapa masyarakat Desa yang potensial di sekitar situs percandian Kecamatan Trowulan diantaranya adalah Desa Bejijong, Sentonorejo dan Jatipasar yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa wisata kreatif. Potensi-potensi yang dimiliki ketiga Desa tersebut selain terdapatnya candi di masing-masing Desa diantaranya adalah usaha kerajinan dari logam serta kuningan yang ada di Desa Bejijong.

Kerajinan pahat patung batu dan ukiran kayu yang ada di Desa Jatipasar, sementara Desa Sentonorejo yang memiliki potensi berupa kesenian adat. Sehingga dengan potensi wisata yang dimiliki Kecamatan Trowulan, adanya kegiatan pariwisata juga harus dapat memberdayakan masyarakat setempat, terutama ketiga Desa yang disebutkan. Menurut Wearing dalam Sunaryo (2013) “peran masyarakat merupakan kunci sukses dan keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata yang dapat diketahui dari tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal”.

Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat berarti dalam upaya pengembangan pariwisata daerah. Masyarakat juga harus merasa dilibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata atau merasa di berdayakan. Menurut Sunaryo (2013: 215) “pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepannya”. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang



ada tersebut muncullah ide dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada awal Desember 2010. Ide tersebut adalah merekonstruksi rumah-rumah penduduk di sekitar Kecamatan Trowulan menjadi rumah Majapahit, untuk memotivasi masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan (MajaTama, 2015).

MajaTama (2015) membahas, ide pembangunan rumah Majapahit baru mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014, setelah adanya usulan yang berisikan bahwa masyarakat Kecamatan Trowulan sangat mendukung program Gubernur Jawa Timur. Usulan tersebut didukung penuh serta ditandatangani oleh 10 kepala Desa di Kecamatan Trowulan dan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan kampung Majapahit sebesar Rp. 5,92 milyar Sedangkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto menganggarkan dana *sharing* sebesar Rp. 1,48 milyar, sehingga total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 7,4 milyar. Ide pembangunan rumah Majapahit tersebut kemudian didukung dengan Peraturan Bupati Mojokerto No. 27 Tahun 2015 tentang

“Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015”. Pembangunan rumah Majapahit dilakukan pada tiga Desa yaitu, 200 unit di Desa Bejjong, 50 unit di Desa Jatipasar, dan 46 unit di Desa Sentonorejo.

Inti dari ide pembangunan rumah Majapahit merupakan upaya untuk menciptakan suatu daya tarik wisata yang baru untuk menarik wisatawan lebih banyak lagi. Pencetusan ide tersebut juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan dengan cara melakukan pembangunan rumah Majapahit di tiga Desa (Bejijong, Sentonorejo, dan Jatipasar) yang memiliki lansekap seperti pada zaman Kerajaan Majapahit. Pengertian arsitektur lansekap sendiri dijelaskan oleh Hakim (2012:3) yang mengatakan:

“pada hakikatnya arsitektur lansekap adalah ilmu dan seni perencanaan dan perancangan serta pengaturan dari lahan, penyusunan elemen-elemen alam dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya, dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya, hingga pada akhirnya dapat tersajikan suatu lingkungan yang fungsional dan estetis.”



Gambar 1. Model Rumah Majapahit
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2016)

Adanya pembangunan rumah Majapahit di tiga Desa tersebut, Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga pemerhati budaya bermaksud



mengajak masyarakat bekerjasama untuk menghidupkan kembali lansekap serta suasana seperti perkampungan pada zaman kerajaan Majapahit. Pembangunan rumah Majapahit juga menjadi inovasi baru (daya tarik baru) dan memotivasi masyarakat agar mau terlibat serta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan serta mempromosikan Trowulan sebagai wisata Kampung Majapahit. Promosi dalam pariwisata menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006) merupakan kegiatan komunikasi untuk memperkenalkan suatu atraksi wisata kepada calon wisatawan agar mengunjungi atraksi wisata yang dipromosikan. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan berbagai macam aktivitas seperti melakukan periklanan, promosi penjualan, dan informasi dari mulut ke mulut. Namun setelah 137 rumah Majapahit di Desa Bejjong selesai dibangun, tidak sedikit bangunan tersebut berubah fungsi menjadi warung, toko dan kios bensin (Bangsaonline.com). Perubahan fungsi tersebut menjadi suatu ketidaksesuaian yang dapat mengakibatkan promosi tidak bisa berjalan secara optimal.

Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan rumah Majapahit. Pihak pengusul pembangunan rumah Majapahit (Supriyadi) mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan rumah Majapahit adalah untuk membuat atraksi wisata baru yang nantinya dapat digunakan sebagai penginapan (*homestay*), *art shop street*, dan sebagai perkampungan Majapahit. Pendapat tersebut dipertegas oleh Edi (perwakilan pengurus Desa) mengatakan bahwa pembangunan rumah Majapahit diharapkan dapat mendukung program Desa wisata di Bejjong.



Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Pembangunan Rumah Majapahit Dalam Mewujudkan Kampung Majapahit”**.

B. Rumusan Masalah

1. Ketidaksiesuaian apa saja yang terjadi dalam pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit di Desa Bejjong?
2. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksiesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit?
3. Bagaimanakah strategi yang diterapkan oleh Dinas terkait untuk mengendalikan ketidaksiesuaian pembangunan Rumah Majapahit?
4. Bagaimanakah keberlanjutan pengelolaan rumah Majapahit dalam upaya mempromosikan kawasan wisata Trowulan sebagai kampung Majapahit?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketidaksiesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejjong.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksiesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi strategi dalam pengendalian ketidaksiesuaian pemanfaatan pembagunan Rumah Majapahit.



4. Mendeskripsikan dan menganalisis keberlanjutan pengelolaan rumah Majapahit dalam upaya mempromosikan kawasan wisata Trowulan sebagai kampung Majapahit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata khususnya pengembangan atau pembangunan kawasan pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto maupun masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan wisata Trowulan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk membantu memperjelas pemahaman isi dari penelitian ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi, tujuan



penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat isi dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bagaimana teori yang mendukung untuk dijadikan landasan ilmiah yang berkaitan dengan judul dan keseluruhan permasalahan yang akan diteliti, yang dalam penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit dan promosi pariwisata.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian secara berturut-turut dibahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta keabsahan data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lokasi yang meliputi penyajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang menjawab rumusan permasalahan, serta saran-saran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat Desa Bejijong untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebagai acuan penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baru. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti antara lain:

1. Anwar (2009)

Anwar (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Potensi Wisata Budaya Situs Sejarah Peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui daya tarik yang dimiliki oleh obyek wisata Trowulan, upaya pengembangan potensi obyek wisata Trowulan, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan obyek wisata Trowulan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa objek wisata Trowulan memiliki kekuatan diantaranya berbagai situs bersejarah peninggalan kerajaan Majapahit yang dimilikinya. Namun dalam upaya pengembangan objek wisata Trowulan mengalami berbagai kendala diantaranya minimnya dana yang tersedia, persebaran situs situs sejarah yang terpencar

di area yang cukup luas, serta kurangnya respon dan partisipasi masyarakat setempat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pengembangan industri pariwisata di Trowulan menjadi kendala yang cukup serius.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar adalah lebih menekankan pada strategi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan rekonstruksi tiga Desa di Kecamatan Trowulan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan dengan pembangunan rumah-rumah (teras rumah) warga bernuansakan zaman Kerajaan Majapahit. Namun setelah pembangunan rumah Majapahit selesai, terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa warga.

2. Sugihartoyo dan Wahyu (2010)

Sugihartoyo dan Wahyu (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Wisata Kota Tua Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian *Urban Heritage*”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menyusun strategi pengembangan *urban heritage tourism* yang dapat menyatukan seluruh aktivitas modern dengan potensi *urban heritage* yang ada di wilayah studi berdasarkan potensi serta permasalahan yang ada, guna menghidupkan kembali Koridor Kali Besar sebagai upaya pelestarian *urban heritage*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT



(*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Penelitian tersebut

menghasilkan dua strategi yaitu; strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek antara lain:

- a. Memanfaatkan bangunan-bangunan tua dan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi di sepanjang Koridor Kali Besar untuk menunjang kegiatan wisata.
- b. Memanfaatkan dukungan dari organisasi peduli kota tua untuk menunjang kegiatan wisata.
- c. Memanfaatkan pengadaan bus Trans Jakarta untuk menunjang kegiatan wisata.
- d. Memanfaatkan fasilitas pendukung wisata untuk menunjang kegiatan wisata.

Sementara strategi jangka panjang yang dihasilkan antara lain:

- a. Meningkatkan promosi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah studi.
- b. Memanfaatkan daya tarik wisata yang berdekatan dengan wilayah studi untuk menarik minat para pengunjung datang ke kawasan Kali Besar.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugihartoyo dan Wahyu adalah menganalisa suatu ketidaksesuaian pemanfaatan dalam program pengembangan destinasi wisata. Ketidaksesuaian pemanfaatan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan pembangunan rumah

Majapahit. Peneliti tidak akan merumuskan suatu strategi, melainkan menganalisa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit serta strategi pengendaliannya.

3. Ariffudin (2013)

Ariffudin (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Peran *Brand* Borobudur Dalam Pariwisata dan *World Heritage*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran *brand* Borobudur dilihat dari perspektif pariwisata dan *world heritage*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jalur deskriptif-analitis secara khusus mengakar pada perspektif citra suatu entitas. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa Borobudur mampu berperan sebagai salah satu objek dan tujuan wisata masyarakat daerah maupun internasional. Selain itu, dengan berbagai macam upaya promosi yang dilakukan sebagai warisan budaya dunia Borobudur mampu menjadi ikon pariwisata religi di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari media-media yang berperan sebagai *brand* guna membentuk, membangun, dan menciptakan identitas pada suatu entitas pariwisata.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariffudin adalah sama-sama meneliti tentang upaya mempromosikan suatu destinasi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menekankan pada upaya promosi kawasan wisata Kecamatan Trowulan melalui pembangunan rumah Majapahit di Desa Bejijong. Perbedaan penelitian adalah adanya



ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit yang dapat menjadi penghambat upaya mempromosikan Kampung Majapahit di Trowulan.

4. Yunani (2014)

Yunani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Berbasis Komputer Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Jawa Barat”. Tujuan penelitian tersebut adalah mengevaluasi dan menilai pentingnya peran sistem informasi dalam promosi pariwisata di Jawa Barat. Sementara itu metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Pariwisata Daerah tidak memiliki *home-page* khusus yang mampu menawarkan informasi baru secara rinci tentang fasilitas pariwisata untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian oleh Yunani adalah, sama-sama menganalisa upaya promosi suatu destinasi wisata. Sementara itu perbedaan dari penelitian oleh Yunani dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah promosi pada penelitian Yunani lebih berbasis komputer. Sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini melihat promosi melalui berbagai media yang ada.

5. Rosyadi dkk (tanpa tahun)

Rosyadi dkk (tanpa tahun) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah”. Penelitian tersebut

bertujuan untuk menganalisa pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, serta aktor-aktor yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengelolaan Situs Majapahit Trowulan melalui regulasi dan anggaran sudah dilaksanakan. Namun, dalam hal regulasi masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan.

Hasil penelitian dari Rosyadi dkk ini juga menemukan bahwa anggaran masih menjadi kendala di berbagai program. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan yaitu Bappeda (sebagai pihak perencana, Disporabudpar (menangani urusan kebudayaan) dan BPCB (sebagai UPT Pemerintah Pusat di lingkungan Kemendikbud). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi dkk adalah lebih menekankan pada pengelolaan secara khusus dari pembangunan rumah Majapahit sebagai upaya promosi pariwisata Kecamatan Trowulan.

B. Kajian Teoritis

1. Kajian Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata telah banyak dibahas di berbagai literatur mengenai pariwisata, serta beragam pula pengertian yang bisa didapatkan. Namun berbagai literatur pada prinsipnya mempunyai arti

atau makna yang relative sama. Salah satunya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataaan:

“wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Adapun kesamaan dari berbagai literatur tentang pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok keluar dari lingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk rekreasi dan mencari kesenangan, serta untuk menikmati fasilitas yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah di tempat wisata yang tidak dapat dinikmati di tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu dan juga tidak untuk mencari pekerjaan tetap.

Adanya kegiatan pariwisata pada suatu daerah tentunya tidak lepas dari potensi yang dimilikinya. Salah satu alasan seseorang atau kelompok untuk berkunjung ke suatu tempat atau daerah adanya suatu daya tarik yang memunculkan ketertarikan seseorang atau kelompok tersebut untuk berkunjung. Serta dengan adanya fasilitas lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sunaryo (2013: 25) menjelaskan berbagai komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan pariwisata suatu daerah (*tourism product designing*) adalah sebagai berikut:



1) Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata secara sederhana seringkali diklasifikasikan berdasarkan pada jenis dan temanya, yaitu biasanya dibagi menjadi tiga jenis tema daya tarik wisata sebagai berikut: alam, budaya (*heritage*), dan minat khusus. Berbagai jenis daya tarik wisata tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting pada sisi produk wisata, terutama dalam rangka menarik kunjungan wisatawan ke destinasi.

2) Amenitas atau Akomodasi

Fasilitas amenities atau akomodasi dalam pengertian ini adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kunjungan ke suatu destinasi.

3) Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas dan transportasi yang dimaksud adalah segenap fasilitas dan moda angkutan yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Aksesibilitas dan transportasi dibedakan ke dalam berbagai matra yang meliputi: matra transportasi darat (kereta api dan kendaraan bermotor lainnya), matra transportasi laut (kapal pesiar dan kapal-kapal penyebrangan), matra transportasi udara (pesawat terbang).

4) Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik seperti: pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal dan jaringan telekomunikasi serta beberapa fasilitas fisik lainnya (jaringan listrik, air minum, toilet dan sebagainya).

5) Fasilitas Pendukung Wisata Lainnya

Fasilitas yang dimaksud adalah berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan selama melakukan kunjungan di suatu destinasi, seperti: keamanan, rumah makan, biro perjalanan, hiburan malam, fasilitas perbankan.

6) Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pariwisata

Kelembagaan dan sumberdaya manusia yang dimaksud adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola kepariwisataan dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi, baik dari unsur Pemerintah, swasta atau industri dan masyarakat. Contohnya, dinas pariwisata daerah, asosiasi industri perjalanan wisata (ASITA), persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI), asosiasi jasa pemandu wisata, kelompok sadar wisata maupun masyarakat yang terkait dengan kepariwisataan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pariwisata secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar destinasi wisata. Karena kegiatan pariwisata akan selalu memunculkan suatu interaksi dengan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah harus mampu memberikan kontribusi positif atau memberdayakan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata yang ada. Seperti halnya yang dikatakan oleh Sunaryo (2013: 215) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepannya. Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), yaitu biasanya mereka yang sedang tergolong kedalam masyarakat marjinal.

Menurut Wearing dalam Sunaryo (2013) pentingnya peran masyarakat, merupakan kunci sukses atau keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata yang dapat diketahui dari tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Jadi merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Karena keunikan masyarakat lokal baik berupa elemen fisik maupun



non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada masyarakat tersebut merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat di atas Sunaryo (2013: 219) mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakekatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pengembangan kepariwisataan.
- 2) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- 3) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan masyarakat, dan
- 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

c. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Berlandaskan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, kemudian dalam pengembangan kepariwisataan dikenal suatu strategi pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Strategi tersebut dikenal dengan istilah *community-based tourism development* (CBT). Menurut Sunaryo (2013: 138) konstruksi CBT pada prinsipnya merupakan salah satu

gagasan penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapat banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Sunaryo (2013: 140) juga mengatakan pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat (CBT); yaitu:

- 1) Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan
- 2) Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan
- 3) Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat yang hidup berdampingan dengan suatu destinasi wisata menjadi bagian dari sistem kepariwisataan yang saling terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang baik dalam pengembangan kepariwisataan yang berbasis masyarakat. Para pakar CBT seperti Yaman & Mohd (dalam Sunaryo, 2013) juga telah menekankan adanya beberapa kunci penting yang bisa digunakan dalam pengelolaan pembangunan kepariwisataan yang menggunakan pendekatan CBT, yaitu diantaranya:

- 1) Adanya dukungan fasilitas dari pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator maupun badan regulasi pengelolaan SDM dan penguatan kelembagaan.

- 2) Adanya partisipasi aktif dari para *stakeholder*, karena CBT secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri kepariwisataan yang tumbuh dari masyarakat.
- 3) Pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata maupun keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha kepariwisataan.
- 4) Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan yang dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan.
- 5) Penguatan institusi lokal yang bertujuan mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan pengunjung. Yang paling baik adalah terbentuknya lembaga sosial dengan kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua masyarakat.
- 6) Adanya keterkaitan dan koordinasi yang efektif antara level regional dan nasional.

2. Perencanaan dan Pengelolaan Pariwisata Sejarah (*Heritage Tourism*)

Salah satu jenis pariwisata yang mengandalkan pengembangan potensi dan kekhasan suatu daerah adalah pariwisata sejarah (*Heritage Tourism*). Cahyadi dan Jajang (2009) mengatakan pariwisata pusaka (*heritage tourism*) adalah “sebuah kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal, benda-benda cagar budaya, dan alam beserta



isinya di tempat asalnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman budaya dan alam bagi pengunjungnya". *Heritage tourism* merupakan bentuk pariwisata yang kompleks meliputi pendidikan, wisata, serta pelestarian budaya maupun alam dan aktifitas ekonomi. Pengembangan *heritage tourism* yang baik akan mampu memberikan kontribusi berupa keuntungan ekonomi yang didapatkan baik pengelola maupun masyarakat. Selain itu pengelolaan *heritage tourism* yang baik juga mampu menjaga kelestarian budaya, karena budaya merupakan atraksi utama dalam *heritage tourism*.

Perencanaan dan pengelolaan pariwisata menurut Hadiwijoyo (2012) berarti suatu angan-angan yang akan diwujudkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang melalui pariwisata. Tujuan perencanaan dan pengelolaan pariwisata lebih lanjut adalah untuk meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang agar dapat tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah turut serta berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Mnasef dalam Hadiwijoyo (2012) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkordinasi untuk menarik wisatawan, serta menyediakan semua kebutuhan wisatawan selama berkunjung ke suatu destinasi wisata. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, barang dan jasa, maupun fasilitas lainnya yang dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan.

Pengembangan dan pengelolaan pariwisata tentunya perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai potensi wisata yang dimiliki suatu daerah. Salah satunya Kecamatan Trowulan yang memiliki potensi wisata sejarah (*heritage*), sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan pariwisata yang sesuai yaitu *heritage tourism*. Adapun tahap-tahap pengembangan *heritage tourism* seperti yang dijelaskan oleh *National Trust of Historic Preservation* (NTHP) (tanpa tahun), yaitu:

1) *Asses the Potential*

Menganalisa terlebih dahulu mengenai kondisi lokasi yang akan dikembangkan sebagai objek wisata *heritage*, baik dari potensi yang dapat menarik wisatawan maupun daya dukung lokasi dan pelayanan yang dapat diberikan kepada wisatawan. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah keberadaan fasilitas pendukung wisata di sekitar lokasi, *event*, penginapan, infrastruktur yang memadai, dan adanya organisasi pendukung pengembangan wisata *heritage*.

2) *Plan and Organize*

Kerjasama antara masyarakat lokal dan sektor bisnis untuk menciptakan program wisata *heritage* yang baik. Usaha-usaha yang berperan dalam industri pariwisata seperti Biro Perjalanan dan organisasi pariwisata maupun sektor usaha seperti pemilik penginapan dan rumah makan serta pemerintah juga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar apabila dapat bersinergi langsung. Bentuk kerjasama dalam hal ini adalah untuk mempermudah proses

pelaksanaan di lapangan serta dukungan dari segi dana atau modal yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata *heritage*.

3) *Prepare, Protect, and Manage*

Perencanaan jangka panjang merupakan hal yang penting dalam mengembangkan jenis wisata *heritage*. Tersedianya atraksi yang berkualitas dan pelayanan prima menjadi kunci penting dalam pengembangan wisata *heritage*, apabila belum tersedia maka harus segera dibangun. Penyediaan layanan informasi mengenai atraksi dan pelayanan yang ditawarkan baik dalam bentuk buku panduan, peta, *website*, maupun penanda arah menuju lokasi merupakan salah satu poin dalam pengembangan wisata *heritage*.

Perlindungan terhadap kondisi dan kualitas sumber daya wisata *heritage* juga sangat penting agar dapat mempertahankan nilai budaya dan sejarah yang nantinya dapat dinikmati oleh wisatawan.

Perlindungan yang dilakukan juga untuk mempertahankan keberlanjutan industri pariwisata yang dikelola. Kesulitan dalam koordinasi serta pengawasan terhadap pengembangan industri pariwisata mengakibatkan perlunya perencanaan yang mendalam dan jelas sejak awal.

4) *Market for Success*

Mempererat atau menjalin kerjasama dengan jurnalis dan media informasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai wisata *heritage* yang dimiliki sangat membantu dalam pemasaran



destinasi tersebut. Penyediaan sarana pemasaran secara langsung melalui media informasi juga efektif, tetapi membutuhkan biaya yang lebih banyak. Komunikasi yang *repetitive* melalui *website* saat ini lebih efektif karena mudah diterima oleh setiap orang. Pembuatan logo dari program wisata *heritage* yang dimiliki juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan wisata *heritage*.

Selain itu pengembangan wisata *heritage* harus mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata *heritage* harusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata *heritage* tersebut.

3. Promosi Pariwisata

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006) promosi secara umum merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang tidak terpisahkan dan harus dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasanya. Kegiatan promosi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga alat untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli atau menggunakan jasa yang disediakan. Promosi dalam pariwisata merupakan kegiatan komunikasi guna memperkenalkan suatu atraksi wisata kepada konsumen (calon pengunjung). Serta mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi atraksi wisata tersebut atau destinasi pariwisata di suatu daerah.



Kegiatan promosi dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi yang sering disebut dengan bauran promosi. Bauran promosi adalah perangkat promosi yang mencakup beberapa aktivitas. Adapun aktivitas-aktivitas dalam bauran promosi menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006) sebagai berikut:

a. Periklanan

Periklanan merupakan bentuk komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan. Peran periklanan dalam promosi jasa adalah untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri dengan perusahaan lain yang mendukung *positioning* jasa.

b. Penjualan Perseorangan

Sifat penjualan perseorangan dapat dikatakan lebih luwes karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Perbedaannya dengan media periklanan adalah pesan yang disampaikan melalui media ini ditujukan kepada calon pembeli potensial secara langsung.

c. Promosi Penjualan

Semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Point dari promosi penjualan terdiri atas brosur, lembar informasi, dan lain-lain.

d. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat merupakan upaya promosi penting lainnya, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih luas. Contohnya pameran, mensponsori beberapa acara, dan mengadakan bakti sosial.

e. Informasi dari Mulut ke Mulut

Peranan seseorang sangat penting dalam mempromosikan jasa. Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain pelanggan tersebut akan memberitahukan kepada yang lainnya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut. Sehingga informasi dari mulut ke mulut memiliki pengaruh besar terhadap promosi jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya.

f. Pemasaran Langsung

Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan promosi yang terdiri dari enam area yaitu; *direct mail*, *mail order*, *direct response*, *direct selling*, *telemarketing*, *digital marketing*.

4. Kawasan Pariwisata

a. Pengertian Kawasan Pariwisata

Menurut Adisasmita (2010: 127) “kawasan adalah bentang permukaan (alam) dengan batas-batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Seperti kawasan lindung, budidaya, pesisir pantai, pariwisata, dan lainnya. Sedangkan wisata merupakan perjalanan atau bepergian. Jadi kawasan wisata adalah bentang permukaan yang dikunjungi atau didatangi oleh banyak orang (wisatawan) karena kawasan tersebut memiliki objek wisata yang menarik”. Kawasan wisata juga dapat diartikan suatu tempat dimana tempat tersebut memiliki obyek wisata baik berupa wisata alam, buatan maupun budaya yang menjadi daya tarik bagi banyak orang (wisatawan) untuk mengunjungi kawasan tersebut.

b. Kawasan Strategis Pariwisata

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional. Menjelaskan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

5. Arsitektur Lansekap

a. Pengertian Arsitektur Lansekap

Menurut Hakim (2012: 3) mengatakan pada hakikatnya arsitektur lansekap adalah ilmu dan seni perencanaan (*planning*) dan perancangan (*design*) serta pengaturan (*management*) dari lahan, penyusunan elemen-elemen alam dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya, dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya, hingga pada akhirnya dapat tersajikan suatu lingkungan yang fungsional dan estetis.

Komponen kegiatan arsitektur lansekap terlihat adanya klasifikasi sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat, yaitu 1. Perencanaan Lansekap (*Landscape Planning*), 2. Perancangan Tapak (*Site planning*), dan 3. Perancangan Detail Lansekap (*Detailed Landscape Design*).

1) Perencanaan Lansekap (*Landscape Planning*)

Perencanaan lansekap adalah proses kolaboratif untuk memberdayakan peran-serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembebasan lahan, pengembangan, konektivitas, pendanaan, dan pengelolaan sebuah ruang terbuka. Perencanaan lansekap mendefinisikan ruang lansekap sebagai sebidang tanah milik publik atau swasta, yang dilestarikan atau memiliki potensi untuk dilestarikan dengan tujuan-tujuan konservasi atau rekreasi.

Tujuan perencanaan lansekap mencakup preservasi dan konservasi karakter habitat alamiah (*natural habitat*) untuk kepentingan

ekologis, rekreasi, lingkungan; kepentingan konservasi dan preservasi tanah dan air, kepentingan perlindungan karakter sejarah dan budaya masyarakat; kepentingan estetika, kepentingan bersifat agrikultural; dan kepentingan pengelolaan komunitas atau pertumbuhan wilayah dari sisi pembangunan, industri atau ekstraksi sumber daya alam.

Perencanaan lansekap dalam pariwisata juga sangat penting untuk menjaga kelestarian atau melakukan penataan lansekap suatu daya tarik wisata (destinasi wisata). Perencanaan lansekap dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana lansekap Desa pada zaman kerajaan Majapahit. Sehingga wisatawan dapat menikmati suatu perkampungan yang bertemakan kampung Majapahit. Bagi pemerintah kota, perencanaan lansekap akan membantu pengelolaan kota dalam hal antara lain:

- a) Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait lingkungan hidup dan tata ruang.
- b) Mengimplementasi proyek-proyek ruang terbuka.
- c) Mendukung program kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
- d) Meningkatkan peran serta warga untuk menjaga ruang terbuka sebagai sebuah aset kota.

2) Perancangan Tapak (*Site planning*)

Perancangan tapak, di dalamnya juga tercakup lansekap *design*, merupakan usaha penanganan tapak secara optimal melalui

proses keterpaduan penganalisaan dari suatu tapak dan kebutuhan program penggunaan tapak, menjadi suatu sintesa yang kreatif.

Setiap elemen dan fasilitas akan diletakkan di atas tapak dalam keterpaduan fungsi dan selaras dengan karakteristik tapak dan lingkungan alamnya. Keterpaduan dalam menganalisis ini amat

sangat diperlukan seperti dalam penanganan; tapak *resort* daerah rekreasi, tata ruang luar daerah industri, daerah pendidikan, daerah bagian wilayah kota, daerah pemukiman, dan sebagainya.

Perancangan tapak dalam pariwisata diperlukan untuk menata tata letak fasilitas pendukung pariwisata dan juga menjaga karakteristik suatu destinasi wisata agar tetap terjaga kelestariannya.

3) Perancangan Detail Lanskap (*Detailed Landscape Design*)

Perancangan detail lanskap adalah usaha seleksi dan ketepatan penggunaan komponen atau elemen, material atau bahan lanskap, tanaman, kombinasi pemecahan detail berbagai elemen taman.

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Ibrahim (1998) merupakan suatu manajemen pengelolaan kota yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruangnya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, akan dapat diketahui serta dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian fungsi

ruang yang tidak terkendali dan tidak terarah dari perencanaan awal.

Pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila telah dilakukan perencanaan yang baik dan berkualitas.

Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan baik akan membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian fungsi ruang dan dapat menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sehingga perlu dilakukannya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang seperti: pengawasan dan penertiban. Kasus pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah terjadinya ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian pemanfaatan dari pembangunan rumah Majapahit dengan tujuan pembangunan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menambah atraksi wisata, *art shop*, *home stay*, dan menjadi *landmark* dari wilayah Kecamatan Trowulan yaitu sebagai perkampungan Majapahit (Supriyadi, 2016). Berdasarkan uraian di atas ketidaksesuaian pemanfaatan yang terjadi menyebabkan upaya mempromosikan Kampung Majapahit di Trowulan tidak dapat berjalan secara optimal dan tidak memiliki arah yang jelas.

7. Geografi Pariwisata

a. Pengertian Geografi Pariwisata

Pengertian dari geografi pariwisata terdapat beberapa pandangan seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut: menurut

Williams (1998: 16) pariwisata (dengan fokus atas bepergian dan perpindahan orang, barang, dan jasa melalui ruang dan waktu) adalah

fenomena utama geografis, karena itu ada banyak cara melalui perspektif geografi yang dapat menjelaskan subjek pariwisata. kemudian pendapat tersebut dikembangkan lagi oleh Williams (2009: 3):

“Tourism is an intensely geographic phenomenon. If we view human geography as being concerned essentially with the patterns and consequences of the economic, social, cultural and political relationships between people, and between people and the spaces and places that comprise their environment, then the annual migration of millions of travellers worldwide within the activity that we label as ‘tourism’ is a process that human geographers should not ignore”.

Artinya, pariwisata adalah bagian dari fenomena geografis. Jika dilihat dari geografi manusia sebagai hal yang berkaitan utama dengan pola dan konsekuensi dari ekonomi, sosial, budaya dan hubungan antara politik dengan manusia, serta antara manusia dengan ruang dan waktu yang terdiri dari lingkungan mereka. Kemudian migrasi tahunan dari jutaan pelancong di seluruh dunia dalam aktivitas yang kita kenal sebagai “pariwisata” adalah suatu proses geografi manusia yang mestinya tidak dapat diabaikan.

Pendapat lain dari Lew Alan A, C. Michael Hall dan Dallen J. Timothy (2008: 3) geografi (pariwisata) dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan interaksi dari dua sistem utama. Pertama, sistem sosial dan ekologis yang menghubungkan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan lingkungannya. Kedua, sistem ruang yang menghubungkan suatu daerah di permukaan bumi dengan yang lainnya. Berdasarkan sudut pandang geografi, ilmu

kepariwisataan memerlukan pemahaman mengenai tempat asal wisatawan (membangkitkan daerah wisatawan), destinasi wisata, dan hubungan antara tempat asal dan tujuan, yang mencakup rute kendaraan, hubungan bisnis dan pemasaran, dan motivasi wisatawan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa geografi pariwisata adalah suatu cabang daripada ilmu geografi atau suatu fenomena dalam ilmu geografi yang berfokus utama pada perpindahan manusia serta pola hubungan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dengan manusia. Mencakup rute menuju daerah tujuan wisata, hubungan bisnis dan pemasaran, dan motivasi wisatawan.

Konsep-konsep geografi seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, interaksi, gerakan, keterkaitan, dan nilai guna menjadi dasar dalam menjelaskan fenomena-fenomena pariwisata. Peranan dalam mempelajari geografi pariwisata adalah untuk:

- 1) Mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di setiap daerah (wilayah).

Artinya, peranan geografi pariwisata bagi wisatawan adalah mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di masing-masing daerah sebelum memutuskan untuk mengunjunginya. Sementara bagi pengelola adalah untuk mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimiliki di setiap daerahnya agar dapat menjadi pariwisata unggulan.

2) Mengetahui serta memahami karakteristik aktivitas wisatawan berdasarkan daerah asal wisatawan dan tempat tujuan wisatanya.

Artinya, peranan geografi pariwisata adalah untuk mengetahui kecenderungan pemilihan keputusan berkunjung wisatawan ke tempat wisatanya berdasarkan daerah asalnya.

Karena wisatawan cenderung akan memilih tempat wisata yang tidak terdapat di daerahnya atau berbeda sekali dengan daerah asalnya dengan alasan untuk menikmati sesuatu yang tidak pernah didapatkan di daerah asalnya. Sehingga para pengelola dapat menentukan segmen pasar yang cocok untuk tempat wisata yang dikelolanya.

Geografi juga memiliki pandangan sendiri terhadap geografi pariwisata (Hadiwijoyo, 2012) yang memfokuskan pada:

- 1) Pergerakan manusia
- 2) Interaksi wilayah
- 3) Potensi sumber daya alam
- 4) Aksesibilitas
- 5) Dampak lingkungan (fisik dan sosial)
- 6) Adanya persamaan dan perbedaan potensi kepariwisataan antara satu daerah dengan daerah lain.

b. Lansekap Pariwisata

Lew, Hall dan Timothy (2008) menjelaskan lansekap merupakan fokus dalam ilmu geografi karena terdapat hubungan antara penduduk lokal, wisatawan, proses ekonomi, lingkungan fisik dan budaya. Lansekap memiliki kekuatan untuk menggambarkan atau menjadi simbol dalam pariwisata. Lansekap dari suatu tempat wisata



sering kali digunakan untuk mempromosikan suatu destinasi wisata, baik melalui media elektronik, media cetak dan media lainnya. Lansekap suatu tempat wisata menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Karena lansekap merupakan kesatuan dari suatu destinasi wisata, seperti halnya *New York city skyline* dan *Hong Kong's harbor* yang menjadi simbol lansekap daerah wisatanya. Sehingga lansekap tempat wisata juga sering kali diabadikan oleh wisatawan melalui foto sebagai suatu kenangan abadi.

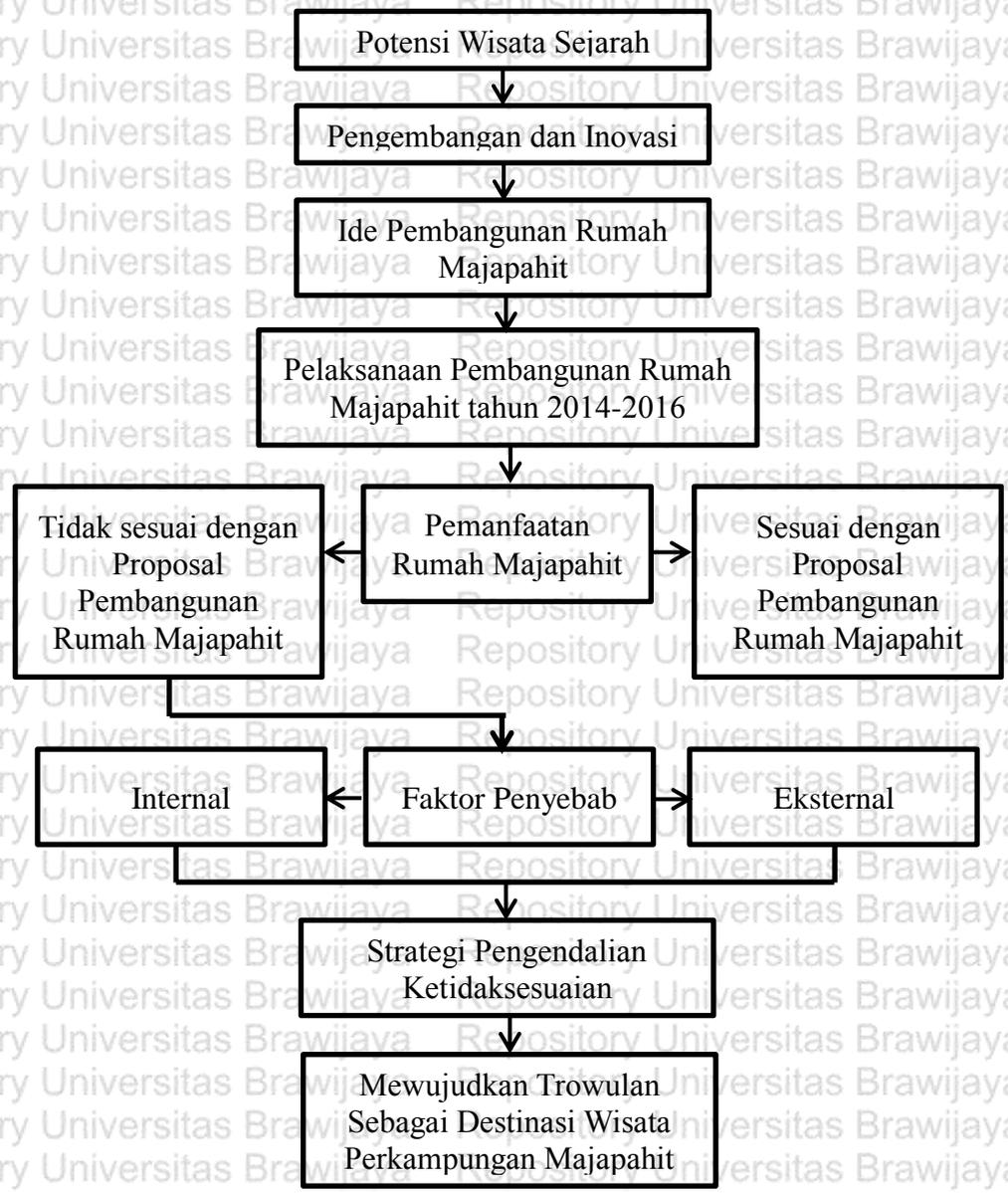
Perkembangan lansekap yang menjadi ikon tempat wisata menimbulkan perubahan besar dalam penggunaan lahan serta arus wisatawan yang begitu besar, akibatnya terjadi degradasi lingkungan, pembangunan yang bertentangan, persoalan daya tampung dan perubahan sosial. Oleh karena itu perlu dikembangkannya mengenai ilmu lansekap pariwisata, geografi dan ilmu sosial lainnya mengembangkan lansekap pariwisata sejak tahun 1990 ketika itu ekonomi pariwisata menjadi penguasa di dunia industri jasa. Pengembangan tersebut mencakup kebijakan lansekap, nilai dan penaksiran lansekap, perlindungan kualitas dan penggunaan lahan pada lansekap lokal, daerah, nasional. Sehingga sampai saat ini banyak bermunculan upaya untuk pelestarian kawasan alam dalam pariwisata yang sering disebut dengan *ecotourism* atau pariwisata berbasis pemberdayaan lingkungan (Lew, Hall dan Timothy, 2008).



Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa, lansekap pariwisata merupakan suatu pemandangan atau lansekap yang menjadi gambaran serta ikon tempat wisata, kota atau bahkan suatu negara. Seperti, Pasar Malioboro di Jogjak, situs percandian Kerajaan Majapahit di Trowulan, dan lain sebagainya. Sementara ilmu lansekap pariwisata merupakan studi dalam bidang lansekap yang digunakan untuk menata lansekap suatu tempat atau daerah wisata agar tidak mengakibatkan dampak yang negatif terhadap kawasan alam dan keberlangsungan pariwisata itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Sumber: Olahan Peneliti (2016)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti maka, jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian yang

dilakukan oleh peneliti ini akan menguraikan manfaat serta pemanfaatan dari pembangunan rumah Majapahit dan perkembangan pariwisata di kawasan wisata Trowulan dengan adanya pembangunan rumah Majapahit.

Pembangunan rumah Majapahit tersebut dapat dijadikan sebagai atraksi wisata baru maupun sebagai fasilitas pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Trowulan, seperti penginapan (*homestay*) yang bernuansakan rumah pada zaman kerajaan Majapahit. Sehingga pembangunan rumah Majapahit tersebut memberikan peluang usaha atau peluang meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang rumahnya dijadikan objek pembangunan rumah Majapahit.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini akan membatasi peneliti dalam memperoleh atau menggali data yang relevan dengan rumusan masalah.



Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012: 208) “fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejjong meliputi:

- a) Pemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah.
- b) Bentuk-bentuk pemanfaatan bangunan Rumah Majapahit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejjong.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit di Desa Bejjong.

- a) Internal
- b) Eksternal

3. Penerapan strategi dalam upaya mengendalikan ketidaksesuaian pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit oleh DISPORABUDPAR Kab. Mojokerto serta yang pihak-pihak terkait.

- a) Sosialisasi
- b) Pelatihan
- c) Pengawasan dan penertiban

4. Keberlanjutan pengelolaan rumah Majapahit dalam upaya mempromosikan Desa Bejjong sebagai Kampung Majapahit, yang meliputi:

- a) Promosi yang dilakukan
- b) Analisis program-program lanjutan dari pembangunan rumah Majapahit di Desa Bejjong



C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti akan melakukan penelitian, tempat peneliti mencari dan menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Trowulan ini karena potensi wisata yang dimiliki yaitu situs peninggalan Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar pada masanya. Selain itu adanya upaya peningkatan pada sektor pariwisata oleh pemerintah Mojokerto, dengan melakukan pembangunan Rumah Majapahit pada teras rumah-rumah penduduk di tiga Desa (Bejjong, Jatipasar, Sentonorejo). Situs penelitian dilakukan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Mojokerto, serta Desa Bejjong yang dilakukan program pembangunan rumah Majapahit.

Alasan peneliti memilih Desa Bejjong sebagai situs penelitian adalah, karena Desa Bejjong yang mendapatkan jumlah unit Rumah Majapahit terbanyak diantara dua desa yang lainnya. Selain itu Desa Bejjong juga memiliki kurang lebih empat objek wisata yang telah dikenal banyak masyarakat yaitu patung budha tidur (mahavihara), candi brahu, candi gentong, dan makam siti inggil. Tidak hanya itu, Desa Bejjong juga merupakan desa wisata pengrajin kuningan yang juga menjadi mata pencaharian sebagian warga desa.



D. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber meliputi perwakilan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, kepala Desa Bejjong atau perwakilannya, serta perwakilan masyarakat yang rumahnya menjadi obyek pembangunan rumah Majapahit di Desa Bejjong. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara mengenai pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit. Pemanfaatan tersebut mungkin dapat berupa penggunaan rumah Majapahit untuk sarana penunjang pariwisata di ketiga Desa (Bejjong, Sentonorejo, Jatipasar) seperti akomodasi (*homestay*). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data lainnya yang berhubungan dengan pembangunan rumah Majapahit.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2013:266) pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan observasi, dokumentasi, materi-materi visual, serta upaya merancang protokol untuk merekam dan mencatat informasi.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data antara lain.

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan.



Wawancara akan dilakukan kepada kepala atau perwakilan dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, perwakilan masyarakat yang rumahnya menjadi obyek pembangunan rumah Majapahit, serta kepala Desa Bejjong. Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono (2012: 233) “jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur”. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Namun peneliti tetap membuat pedoman wawancara sebagai landasan peneliti melakukan wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah langkah pengumpulan data dengan turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Peneliti dapat merekam atau mencatat baik secara terstruktur maupun semiterstruktur. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai partisipan maupun non-partisipan hingga partisipan utuh. Observasi akan dilakukan pada salah satu Desa yang ditetapkan dalam program pembangunan rumah Majapahit yaitu Desa Bejjong, dan peneliti bertindak sebagai non-partisipan.



3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik (Sugiyono, 2012). Dokumentasi yang dibutuhkan adalah foto rumah Majapahit, data-data yang terkait dan mendukung penelitian ini.

F. Penentuan Partisipan (*Informan*)

Pemilihan partisipan pada penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposeful*) untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Menurut Creswell (2008) dalam penelitian kualitatif, peserta atau partisipan yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti (*purposeful*) yaitu melakukan pemilihan terhadap orang yang dapat membantu peneliti dalam memahami sebuah fenomena. Objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah masyarakat warga Desa Bejjong yang dibangun rumah Majapahit. Lebih khusus lagi warga yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan atau ketidak sesuaian pemanfaatan dari pembangunan rumah Majapahit. Sehingga langkah penentuan partisipan yang akan peneliti lakukan sebagaimana telah dipaparkan di atas yaitu dengan menggunakan *confirming or disconfirming sampling* dengan tujuan untuk menjelaskan atau mengungkap kasus yang jelas maupun tidak jelas.

Partisipan utama pada penelitian ini adalah pihak pengusul (Bapak Supriyadi) dan perwakilan Disporabudpar. Karena Bapak Supriyadi memiliki



peran penting dalam terwujudnya pembangunan Rumah Majapahit yaitu sebagai pengusul yang menghubungkan beberapa pihak seperti Pemerintahan, Budayawan, dan juga masyarakat. Selain itu alasan peneliti memilih kedua informan tersebut dikarenakan kedua informan diharapkan mampu menjelaskan ketidaksesuaian pemanfaatan Rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejjong.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 223) “dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri”. Namun selanjutnya setelah masalah yang akan dipelajari dan fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan buku catatan.

1. Peneliti : Peneliti pada penelitian ini bersifat sebagai nonpartisipan, peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan menganalisisnya.
2. Pedoman Wawancara: daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk melakukan wawancara atau digunakan dalam pengumpulan data dari narasumber.



3. Alat Perekam: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Penggunaan alat perekam perlu memberitahu kepada narasumber apakah dibolehkan atau tidak.
4. Kamera: digunakan untuk memotret pembicaraan peneliti dengan narasumber, adanya foto akan meningkatkan keabsahan penelitian dan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.
5. Buku Catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan atau inti pokok dari percakapan dengan narasumber.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2013:274) merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data.

Artinya analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak. Langkah-langkah analisis menurut Creswell (2013:276) sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah ini membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya

secara keseluruhan. Menentukan gagasan umum berdasarkan perkataan partisipan.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori dengan istilah khusus.
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data.

I. Keabsahan Data

Validitas pada penelitian kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas pada penelitian kuantitatif, tidak sejajar pula dengan reliabilitas (pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (validasi eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau *sampel* yang baru). Menurut Creswell (2013: 285)

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Terdapat delapan



strategi validitas yang dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif, antara lain: *triangulate*, membuat deskripsi yang kaya dan padat, mengklarifikasi bias, menyajikan informasi yang berbeda (negatif), memanfaatkan waktu yang relatif lama, mengajak auditor (*external auditor*). Peneliti pada penelitian ini akan menggunakan strategi “triangulasi sumber”, yaitu mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2013).

BAB IV

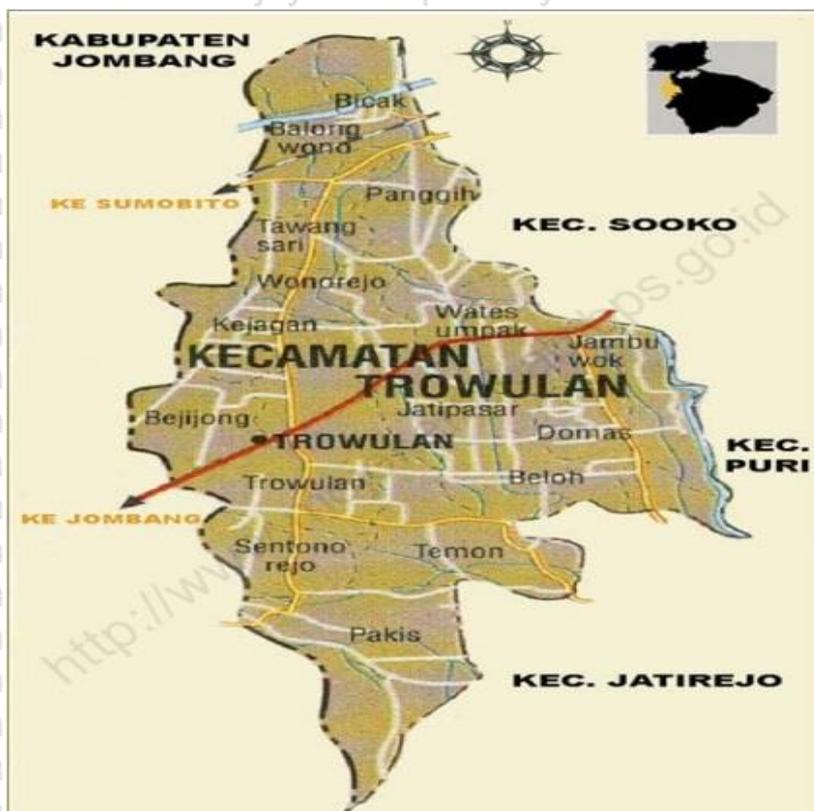
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Kondisi umum lokasi penelitian dideskripsikan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek penelitian. Hal-hal yang dideskripsikan meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum Kecamatan Trowulan

Trowulan merupakan wilayah yang mempunyai potensi wisata *heritage* melimpah. Pada masa Kerajaan Majapahit, Trowulan disebut dengan “Wilwatikta” atau biasa disebut sebagai ibukota Kerajaan Majapahit.



Gambar 3. Peta Kecamatan Trowulan

a. Letak Geografis Kecamatan Trowulan

Kecamatan Trowulan berada di sebelah Barat Daya Kabupaten Mojokerto. Secara geografis Kecamatan Trowulan terletak antara $111^{\circ}20,13$ sampai $111^{\circ}40,17$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}18,35$ sampai $7^{\circ}18,47$ Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Trowulan terletak pada ketinggian antara 25 meter sampai dengan 40 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah meliputi :

- 1) Batas sebelah timur : Kec. Sooko, Kec. Puri, Kec. Jatirejo
- 2) Batas sebelah barat : Kabupaten Jombang
- 3) Batas sebelah selatan : Hutan KPH Kabupaten Jombang
- 4) Batas sebelah utara : Kabupaten Jombang

b. Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Trowulan $\pm 39.20 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 16 desa, dengan luas terbesar $4,58 \text{ km}^2$ (Desa Trowulan) dan luas terkecil $1,52 \text{ km}^2$ (Desa Panggih). Semua wilayah Kecamatan Trowulan merupakan dataran rendah.

c. Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Trowulan pada akhir tahun 2014 mencapai 81.514 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 41.215 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 40.299 jiwa. Desa Trowulan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 8.804 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah desa Panggih 3.205 jiwa. Kepadatan penduduk

Kecamatan Trowulan sebesar 2.079,4 orang per km² dengan desa terpadat adalah desa Watesumpak sebesar 2.685 orang per km². Hal tersebut dapat dikarenakan desa tersebut merupakan sentral pembuatan patung batu, sehingga terbukanya lapangan pekerjaan yang menjadi daya tarik untuk berdomisili di desa Watesumpak.

d. Industri Pengolahan

Jumlah perusahaan industri pengolahan di Kecamatan Trowulan pada tahun 2014 sebanyak 88 perusahaan. Meliputi industri besar sebanyak 22 perusahaan, 18 perusahaan berskala sedang, 18 perusahaan berskala kecil, dan 30 industri rumah tangga.

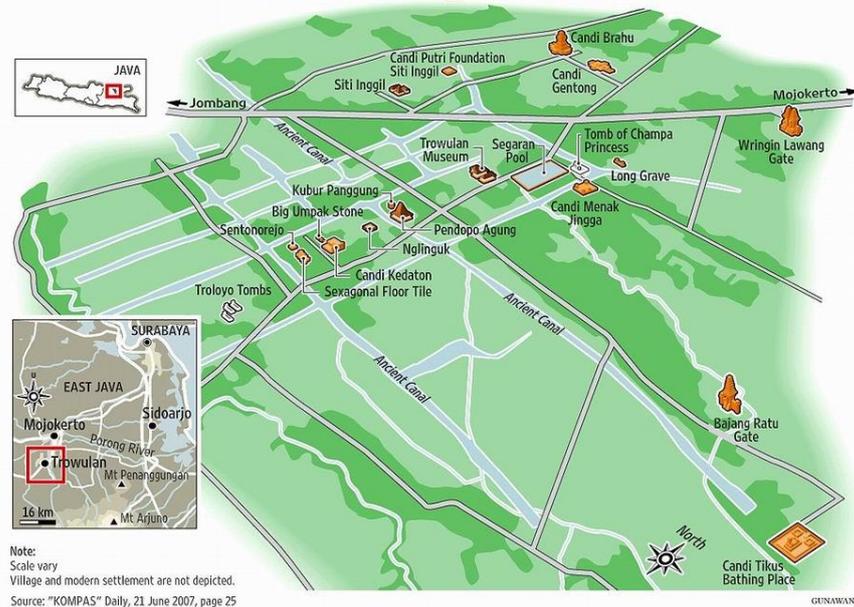
Tabel 2. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Batu Bata	302	410
Pandai Besi	1	2
Ukiran Kayu	7	6
Seni Ukir Batu	15	80
Pengerajin Rotan	1	12
Pengerajin Bambu	1	4
Cor Logam	9	31
Konveksi	1	3
Kerajinan Bordir	1	2
Industri Sepatu / Sandal	6	15
Percetakan	1	2
Las	4	13
Industri Paving / Batako	2	6
Makanan dan Minuman Ringan	12	41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (2015)

e. Potensi Pariwisata

Trowulan Archaeological Site



Gambar 4. Peta Situs Percandian Trowulan

Sumber :

s58.photobucket.com/user/FCruithni/media/TrowulanArchaeologicalSiteMap.gif.html

Kecamatan Trowulan memiliki potensi pariwisata berupa situs percandian peninggalan Kerajaan Majapahit. Sebagian besar candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit terdapat di Kecamatan Trowulan, sehingga Kecamatan Trowulan sering disebut sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit.

Tabel 3. Lokasi Objek Wisata di Kecamatan Trowulan

No.	Lokasi Desa	Objek Wisata	Fasilitas yang Dimiliki
1.	Bejijong	a. Candi Brahu b. Candi Gentong c. Situs Siti Inggil d. Mahavihara Majapahit	Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah Vihara, Patung Budha Tidur

2.	Trowulan	a. Meseum Purbakala b. Candi Minak Jingga c. Kolam Segaran d. Kubur Panjang e. Permatasari	Koleksi Arca Pendidikan Sejarah Kolam Air Pendidikan Sejarah Kolam Renang
3.	Sentonorejo	a. Tradisi Grebeg Suro b. Tradisi Khaul Syeh Jumadil Kubro c. Alun-alun Umpak d. Lantai Segi Enam e. Makam Putri Cempa f. Makam Troloyo	Religi Religi Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah Aula, Penginapan, Masjid
4.	Temon	a. Candi Bajang Ratu b. Candi Tikus	Pendidikan Sejarah Pendidikan Sejarah
5.	Jati Pasar	Candi Wringinlawang	Pendidikan Sejarah
6.	Karangeruk	Candi Griting	Pendidikan Sejarah
7.	Panggih	Petilasan Hayam Wuruk	Pendidikan Sejarah
8.	Ngigluk	Pendopo Agung	Pendidikan Sejarah
9.	Watesumpak	Pusat Perkulakan Sepatu (PPST)	Pusat Perkulakan Sepatu

Sumber : Mojokertokab.go.id (2015)

2. Gambaran Umum Desa Bejjong

Desa Bejjong merupakan salah satu desa yang letaknya terdapat di bagian barat wilayah kecamatan Trowulan. Terdapat beberapa potensi wisata di Desa Bejjong ini diantaranya Candi Brahu, Candi Gentong, Situs Siti Inggil, dan Mahavihara Majapahit (Patung Budha Tidur).



a. Letak Geografis Desa Bejjong

Desa Bejjong adalah desa yang paling barat letaknya dan paling dekat dengan kantor Kecamatan Trowulan kurang lebih nol kilometer. Batas-batas desa ini antara lain :

- 1) Sebelah timur : Desa Trowulan
- 2) Sebelah barat : Kecamatan Mojoagung-Jombang
- 3) Sebelah selatan : Desa Trowulan
- 4) Sebelah utara : Desa Kejagan

b. Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Desa Bejjong kurang lebih 195,185 Ha dengan penggunaan lahan 127 Ha digunakan untuk persawahan dan 68,185 Ha digunakan sebagai tanah darat. Sedangkan secara administratif Desa Bejjong terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Bejjong (luas 116,848 Ha) dan Dusun Kedungwulan (luas 78,337 Ha).

c. Penduduk

Menurut data jumlah penduduk Desa Bejjong tahun 2015 total jumlah penduduk sebanyak 3.874 jiwa yang terdiri dari 1.208 kepala keluarga.

Jumlah penduduk yang ada bila dibandingkan dengan luas Desa sebesar 195,185 Ha, maka kepadatan penduduk di Desa Bejjong adalah 1987 jiwa per Km².

d. Mata Pencarian

Berikut adalah komposisi penduduk Desa Bejjong menurut mata pencahariannya di tahun 2015.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Bejjong Menurut Mata Pencaharian Tahun 2015

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	179	15,26
2	Buruh tani	252	21,48
3	Karyawan swasta	105	8,95
4	Pengrajin	412	35,12
5	PNS	88	7,50
6	Pedagang	38	3,24
7	Montir	5	0,43
8	TNI/POLRI	8	0,68
9	Dokter	2	0,17
10	Perawat	6	0,15
11	Lain-lain	78	6,65

Sumber : *Profil Desa Bejjong Tahun 2015*

Berdasarkan tabel tersebut mata pencaharian penduduk Desa Bejjong yang paling banyak dilakukan adalah sebagai pengrajin. Jenis kerajinan yang banyak ditekuni masyarakat Desa Bejjong adalah pengrajin cor kuningan yang tersebar di Desa Bejjong khususnya di Dusun Kedungwulan.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemanfaatan Rumah Majapahit

Pembangunan rumah Majapahit adalah suatu upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan pada kawasan wisata di Kecamatan Trowulan.

Terlebih lagi potensi wisata sejarah yang dimiliki Kecamatan Trowulan sangat besar, bisa dilihat dari tersebarnya peninggalan-peninggalan



Kerajaan Majapahit di wilayah Kecamatan Trowulan. Oleh karena itu muncul ide dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan dengan merekonstruksi rumah-rumah warga menjadi rumah Majapahit. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengurus pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Ide awal itu ceritanya pada tahun 2010 kita membaca *online* itu ada kalimat dari Pakde, kalo tidak salah di kompas.com beliau ingin membuat sesuatu di Kecamatan Trowulan berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Kemudian keesokan harinya langsung kita respon. Usulan saya ditanda tangani oleh Kepala Desa se-Kecamatan Trowulan, empat tahun kemudian baru di respon, seperti itu ceritanya. Oh iya. Rame-ramenya itu waktu pak SBY (Susilo Bambang Yudoyono) berkunjung ke Kecamatan Trowulan.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa Bejjong, sebagai berikut :

“ide awal pembangunan rumah Majapahit itu memang kita membaca dari teman-teman pemerhati budaya yang mengusulkan pada tahun antara 2009 atau 2010 itu mengusulkan adanya rekonstruksi kembali seperti apa rumah Majapahit. ada teman yang namanya pak Supriyadi itu mengajukan ke gubernur dan direspon pada tahun 2014 kemarin.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Usulan yang diajukan oleh Bapak Supriyadi bersama dengan rekan-rekan pemerhati budaya lainnya, baru mendapat respon dari Gubernur pada tahun 2014. Respon tersebut berupa bantuan dana atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan rumah Majapahit dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 5,92 milyar. Pembangunan rumah Majapahit tersebut dimulai pada tahun 2014, sekitar bulan September.



Rumah Majapahit merupakan suatu keunikan bentuk serta arsitektur rumah pada zaman Kerajaan Majapahit yang berusaha dimunculkan kembali pada masa sekarang. Keunikan tersebut berbentuk arsitektur rumah zaman dahulu yang menjadi suatu daya tarik wisata baru di Kecamatan Trowulan. Desa Bejjong merupakan salah satu desa yang rumah-rumahnya dirubah atau dibangun menjadi rumah Majapahit, ada sekitar 200 unit rumah yang dibangun menjadi rumah Majapahit.

Jumlah tersebut dibangun pada beberapa tempat tertentu yang dianggap strategis atau disebut dengan ring 1, ring 2, dan ring 3. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa Bejjong, sebagai berikut :

“Karena anggaran yang diberikan terbatas sedangkan minat dari masyarakat begitu luar biasa, kita membuat syarat-syarat bahwa yang dibangun rumah Majapahit adalah ring 1 dan ring 2. Ring 1 itu dari jalan di ujung selatan desa sampai dengan candi brahu itu ring 1. Ring 2 itu dari depan terminal sampai dengan siti inggil, dan ring 3 di vihara itu.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Pembangunan rumah Majapahit tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pariwisata di Kecamatan Trowulan serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan rumah Majapahit dapat dibagi menjadi dua antara lain pemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bejjong.

a. Pemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah

Pembangunan rumah Majapahit pada dasarnya merupakan suatu upaya pengembangan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan



Trowulan. Adanya pembangunan rumah Majapahit diharapkan dapat lebih mengenalkan situs-situs di Kecamatan Trowulan serta mendukung program desa wisata. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Redi selaku perwakilan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) Mojokerto, sebagai berikut :

“banyak, memang untuk mengenalkan situs-situs di Trowulan terus untuk istilahnya supaya seragam, kedua untuk kedepannya buat *homestay* dan lain sebagainya.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di kantor DISPORABUDPAR).

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa Bejjong, sebagai berikut :

“rumah Majapahit secara luas nanti akan membantu program desa wisata, kenapa? Karena bagaimanapun juga Trowulan serta Bejjong merupakan salah satu cagar budaya dan disini juga termasuk desa wisata juga. Makanya dengan adanya rumah Majapahit nantinya diharapkan dapat membantu untuk pelaksanaan desa wisata. Untuk sementara pemanfaatannya kedepan kita usahakan sebagai *homestay* untuk wisatawan yang datang kesini supaya mengetahui kegiatan masyarakat Bejjong mulai dari pagi sampai malam, dari mata pencaharian sampai apapun budayanya nanti bisa dilihat di sini.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Pembangunan rumah Majapahit diharapkan mampu memicu agar kunjungan wisatawan lebih meningkat lagi serta menyediakan fasilitas bagi wisatawan. Rumah Majapahit juga diharapkan dapat dijadikan sebagai *homestay* untuk wisatawan yang berniat untuk menginap. Sehingga wisatawan dapat menghemat biaya dengan tidak menginap di hotel, selain itu wisatawan dapat merasakan suasana tinggal di rumah pada zaman kerajaan Majapahit. Disamping itu rumah

Majapahit juga dapat dijadikan sebagai galeri-galeri dari kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, senagai berikut :

“Disamping menambah pariwisata, pernik-pernik itu bukan hanya candi saja. Kalau bisa ditambah lagi unsur-unsur lain termasuk pariwisata. Rumah Majapahit harapannya nanti bisa untuk menjual hasil karya (*art shop*), sebagai *art shop* maksud saya. Masyarakat juga, *home stay* macam-macam. Jadi kalau *art shop* terlihat menarik satu deret seperti di Jawa Tengah itu ada kasongan atau apa itu, nanti arahnya kedepan bisa seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Intinya pembangunan rumah Majapahit adalah untuk mendukung pariwisata yang ada di Kecamatan Trowulan, dan juga mendukung program desa wisata seperti yang dilakukan di desa Bejjong. Selain menjadi pendukung sektor pariwisata di Kecamatan Trowulan, rumah Majapahit juga dapat diproyeksikan menjadi suatu perkampungan ala Majapahit dan menjadi salah saut wisata andalan di Mojokerto maupun Jawa Timur. Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Harapan saya setelah ini nanti muncul, memang tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, harus bertahap. Memang kita punya konsep besar. Jadi setelah adanya rumah Mojopahit inipun nanti pariwisatanya otomatis bisa naik, otomatis UKM disini akan dikenal. Intinya harapan kita tetap pariwisata jadi ujung tombak di Trowulan. Juga tentang kebesaran masa lalu itu bisa bangkit kembali dalam era masa kini, maksudnya dengan kepariwisataan, Majapahit itu.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).



Menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu yang tidak sebentar. Pembangunan rumah Majapahit adalah awal dari konsep besar yang direncanakan untuk mewujudkan desa wisata (Kampung Majapahit).

Tujuan pembangunan rumah Majapahit secara tertulis telah disebutkan dalam proposal atau usulan “Restorasi Fisik Desa Sekecamatan Trowulan Sebagai Area Desa Wisata dan Perkampungan Majapahit”. Usulan tersebut diajukan oleh Bapak Supriyadi melalui lembaga Sanggar Bhagaskara yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh kepala desa Kecamatan Trowulan. Adapun tujuan program rekonstruksi rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan adalah:

- 1) Semakin terangkatnya nama besar bekas Kerajaan Majapahit pada tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Program rekonstruksi rumah Majapahit merupakan bentuk apresiasi serta bukti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas pernyataan Pemerintah Pusat yang menetapkan Kecamatan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional.
- 3) Adanya program rekonstruksi rumah Majapahit tahap lanjutan yang merata di wilayah Kecamatan Trowulan, dapat membendung pengaruh arsitektur rumah modern di Kecamatan Trowulan.
- 4) Adanya program rekonstruksi rumah Majapahit yang merata di Kecamatan Trowulan akan semakin memperkuat nama Trowulan



sebagai bekas ibukota Kerajaan Majapahit di tingkat nasional ataupun internasional.

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan warisan sejarah budayanya sendiri.

6) Membuka ruang kreatifitas dibidang usaha industri pariwisata seni dan budaya pada masyarakat Trowulan secara umum, serta harapan akan bisa mengalihkan aktifitas kerja atau mata pencaharian beberapa kelompok masyarakat yang dapat merusak kawasan cagar budaya.

7) Terciptanya peluang usaha disektor pariwisata pada wilayah Trowulan yang nantinya akan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan mengenai pemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah dapat disimpulkan bahwa rumah Majapahit dapat membatu program desa wisata yang diinginkan kedepannya. Rumah Majapahit juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai usaha dibidang industri pariwisata seperti *art shop* atau *homestay*. Adanya rumah Majapahit juga diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan warisan Kerajaan Majapahit yang dikemas dalam desa wisata Kampung Majapahit.



b. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bejjong

Masyarakat desa Bejjong menyambut dengan baik pembangunan atau rekonstruksi rumah-rumah menjadi rumah Majapahit. Warga sangat terbuka dan antusias dengan pembangunan rumah Majapahit. Rata-rata warga merasa senang ataupun bangga rumahnya direkonstruksi menjadi rumah Majapahit. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Tajudin selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“kalau mengenai pembangunan sangat bagus. rumah Majapahit ini dapat membatu warga disini karena rumah Majapahit ini bisa dijadikan untuk menghidupkan wisata dari area Majapahit ini, juga bisa mengundang tamu untuk lihat-lihat atau foto-foto intinya bergunalah bagi warga disini.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Tajudin).

Tanggapan lain dinyatakan olah Ibu Eni selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“bangga juga senang dikasih rumah secara gratis dan disini juga mau dijadikan kampung Majapahit.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Eni).

Begitu juga tanggapan Ibu Masrukah yang mengatakan, sebagai berikut :

“kalau saya berterimakasih adanya rumah Majapahit bisa jualan membuka warung, membuka kios-kios, penginapan juga boleh katanya.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Masrukah).

Adanya pembangnan rumah Majapahit menambah daya tarik wisata di desa Bejjong, sehingga wisatawan dapat merasakan suasana layaknya berada pada zaman kerajaan Majapahit dahulu dan dapat



berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat. Rumah Majapahit juga memberikan manfaat bagi warga desa Bejjong itu sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh warga antara lain menjadikan rumah warga terlihat lebih bagus dan unik menjadi ciri khas rumah tradisional ala zaman kerajaan Majapahit.



Gambar 5. Rumah-Rumah Majapahit Desa Bejjong

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh warga sangat beragam, namun terdapat beberapa warga yang menggunakan atau memanfaatkan rumah Majapahit kurang sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa warga memanfaatkan rumah Majapahit untuk membuka toko sembako, warung makan, dan lain sebagainya. Tabel 5 di bawah ini menyebutkan berbagai macam pemanfaatan yang dilakukan oleh warga.

Tabel 5. Macam-Macam Pemanfaatan Rumah Majapahit Oleh Warga Desa Bejjong

No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah
1	Warung Makan/ Kopi	9
2	Toko Sembako (Klontong)	9
3	Salon Kecantikan	1
4	Alat-alat Tulis	2
5	Toko Aksesoris (Tas)	1
6	Galeri Cor Kuningan	6
7	Galeri Batik Majapahit	4
8	<i>Homestay</i>	10

Sumber : *olahan peneliti (2016)*

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat diketahui terdapat sekitar 20 warga yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan. Ketidaksesuaian pemanfaatan ini dapat membuat tujuan utama yang diharapkan seperti yang sudah disebutkan di atas akan terhambat. Selain dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut setidaknya dapat mengurangi keindahan rumah Majapahit. Seperti terlihat pada gambar 6 mengenai pemanfaatan rumah Majapahit menjadi toko-toko sembako. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Iya, ini semacam apa, euforia dari masyarakat sendiri. Ini juga belum ada pendampingan. Seharusnya Pemerintah Mojokerto Kabupaten ini memberikan pendampingan sehingga masyarakat lebih terarah. Selama ini disupayakan, jadi mereka jualan apa, kopi, segala macam, ada yang patung juga. Jadi permasalahan itu kan seharusnya ada pendampingan, kembali karena anggaran ini 90% dari provinsi, yang 10% dari kabupaten. Seharusnya karena ini wilayah kabupaten, pendampingannya itu mutlak dari kabupaten. Hal ini yang belum saya temui disitu. Sehingga terjadi



di masyarakat ada yang dijadikan itu tadi, warung kopi, segala macam. Mungkin itu nanti kedepan harus itu Pemerintah Daerah, untuk teman-teman akademisi mendorong. Itu tugasnya disitu, mendorong Pemerintah Daerah. Selama ini kosong, tidak ada kegiatan sama sekali. Seharusnya setiap masyarakat yang mendapat program rumah ini setiap satu bulan satu kali periodik itu ada pendampingan dari Dinas Pariwisata, itu nggak ada disini. Harus ini nanti.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).



Gambar 6. Pemanfaatan Rumah Majapahit Menjadi Toko-toko Sembako

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016

Belum adanya pendampingan dari pemerintah daerah setelah pembangunan rumah Majapahit selesai menjadikan warga kurang terarah dalam memanfaatkan rumah Majapahit. Sehingga warga memanfaatkan rumah-rumah tersebut tanpa konsep yang jelas dan

tidak tertata. Tidak hanya digunakan untuk toko sembako seperti gambar 6 di atas, beberapa warga juga menggunakannya untuk membuka warung dan toko alat tulis. Apa lagi ketidaksesuaian pemanfaatan itu terdapat di area ring 1 dan ring 2 yang sering dilalui wisatawan. Seperti terlihat pada gambar 7 mengenai pemanfaatan rumah Majapahit menjadi warung makan dan toko alat tulis.



Gambar 7. Pemanfaatan rumah Majapahit Menjadi Warung dan Toko Alat Tulis

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016.

Namun ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit tersebut masih dianggap suatu hal yang wajar bagi DISPORABUDPAR maupun dari aparat desa. Karena kepemilikan rumah-rumah Majapahit tersebut dihibahkan kepada masing-masing warga, sehingga

warga bebas memanfaatkan rumah Majapahit sesuai kehendak masing-masing. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa, sebagai berikut :

“iya tidak apa-apa. Karena itu diserahkan sebagai kepemilikan, dirawat, dan dimanfaatkan untuk apapun silahkan kalau dibuat toko silahkan tidak masalah. Karena toko juga sebagai mata pencaharian kalau kita menenggok pada zaman dahulu rumah-rumah Majapahit ada yang dipakai untuk warung iya kan? Orang Majapahit dulu kan juga ada yang membuka kedai, penginapan, dan untuk apapun kan seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Redi selaku perwakilan DISPORABUDPAR, sebagai berikut :

“iya memang, terserah pemilik rumah. Mau dipakai untuk warung, toko ataupun *homestay* karena itu memang hak miliknya mereka. Kita Cuma membangun rumah supaya seragam untuk pemanfaatannya itu masing-masing.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di kantor DISPORABUDPAR).

Berdasarkan dua pendapat di atas, pihak pemerintah hanya memberikan amanah kepada warga untuk merawat dan tidak merusak ataupun mengubah bentuk bangunan yang sudah ada.

Tidak seluruh warga melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan tetapi ada juga warga yang memanfaatkan rumah Majapahit sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh pihak pengusul. Pemanfaatan tersebut berupa galeri cor kuning, galeri batik, dan juga *homestay*. Seperti pada gambar 8 mengenai pemanfaatan rumah Majapahit menjadi galeri (*art shop*) dan *homestay*.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh warga desa Bejjong maka dapat disimpulkan bahwa ada



Gambar 8. Pemanfaatan Rumah Majapahit Menjadi Galeri (art shop) dan Homestay

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016.

ketidakselarasan antara pihak pengusul dengan pemerintah (DISPORABUDPAR dan aparatur desa Bejijong) mengenai pemanfaatan rumah Majapahit. Pihak pengusul mengatakan bahwa beberapa warga telah melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit dari yang sebenarnya diharapkan menjadi *art shop* maupun *homestay*. Namun tidak demikian dengan pihak pemerintah atau pengawas pembangunan rumah Majapahit yang mengatakan bahwa warga yang memanfaatkan rumah Majapahit menjadi toko, warung, dan lain sebagainya bukan merupakan suatu ketidaksesuaian. Karena selain rumah Majapahit menjadi hak pemilik rumah masing-masing sehingga warga bebas memanfaatkan untuk apapun, keadaan pada

zaman dahulu juga pasti ada pemilik rumah yang melakukan pemanfaatan serupa.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit

a. Faktor Internal

Ketidaksesuaian pemanfaatan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi warga melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit adalah mata pencaharian warga. Beberapa warga yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan mengatakan sebelum adanya rumah Majapahit mata pencaharian warga dahulunya adalah sebagai pedagang sembako. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Agus selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“begini mas ceritanya, sebenarnya yang dibangun rumah ini adalah di jalan pariwisata yang tidak di jalan pariwisata ya tidak dan juga yang mau saja. Intinya awal dulu itu tidak boleh dipakai untuk membuka toko, saya sebelum dibangun rumah Majapahit ini sebenarnya sudah memiliki toko, jadi saya awalnya tidak mau. Karena rumah itu sebenarnya buat penginapan kalau ada turis supaya ada fungsinya, lalu saya ditawarkan sama bapak lurah yang sekarang “mbak sudah ikut saja tidak apa-apa untuk nanti kedepannya” jadi saya terima dengan perjanjian nantinya saya pakai membuka toko. Karena penghasilan saya dari toko soalnya dari dulu sudah membuka toko. Kalau saya ikut dibangun rumah Majapahit ini dan tidak dipakai untuk usaha ya ditempatin hantu nanti. Lalu bapak lurah bilang “iya tidak apa-apa soalnya anda sudah lebih dulu memiliki toko dulunya” karena orang-orang yang lain boleh kenapa saya tidak! ada yang dipakai buat jualan reco (patung-patung) dan lain-lain. Jadi rumah saya ini yang terakhir karena yang lain sudah dibangun rumah saya belum, lalu kata pak lurah “supaya merata dan kelihatan rajin mbak” jadilah

dibangun rumah Majapahit ini. Ini nanti akan mendapatkan pagar yang rumahnya dibangun rumah Majapahit.” Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Agus).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nur selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“ya tidak memilih mas karena ini dulunya toko juga. Lalu saya rehab seperti ini, ada rumah Majapahit lalu saya ganti. Tokonya dulu ya seluas ini, lalu ada rumah Majapahit dan saya ingin lalu tokonya saya potong karena rumah Majapahit ini terbatas hanya beberapa meter saja. Jadi saya rubah saya ganti rumah Majapahit ini.” (Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Nur).

Warga cenderung memanfaatkan rumah Majapahit untuk usaha yang telah dilakukan atau ditekuni sebelum adanya pembangunan rumah Majapahit di desa Bejjong ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Ibu Santi selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“ya karena awalnya dulu juga saya membuka toko seperti ini mas.”

Serta pernyataan yang disebutkan oleh Bapak Tajudin selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“karena dulu memang sebelum ada rumah Majapahit ini asalnya toko, inginnya mau membuka toko berhubung apa. . . sesudah pembangunan rumah ini tokonya tertutup akhirnya begini dibuat tempat apa adanya seperti toko. Warga yang lain juga seperti itu tidak hanya disini saja.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Tajudin).

Selain faktor usaha yang telah dilakukan sebelum pembangunan rumah Majapahit, ada pula warga yang beralih profesi setelah pembangunan rumah Majapahit. Beberapa warga yang beralih profesi memanfaatkan rumah Majapahit sebagai warung makan dan

toko perlengkapan alat tulis. Beragam peralihan profesi dari beberapa warga antara lain, dari pengrajin cor kuningan menjadi penjual alat tulis dan pengerajin batu bata merah menjadi penjual makanan (pemilik warung). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Eni Yulianti selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“ya. . . dulu usaha cor kuningan disini. Sekarang sudah tidak lagi jadi saya pakai untuk lainnya ini.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Eni).

Begitu juga dengan pernyataan dari Ibu Masrukah selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“oh. . . tidak pernah, dulunya mencetak batu bata. Sakit-sakitan, tidak kuat untuk ke sawah jadi terfikirkan untuk membuka warung saja untuk menambah uang saku anak.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Masrukah).

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor internal penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan rumah majapahit adalah faktor mata pencaharian warga. Baik warga yang dahulunya memang sudah memiliki toko sembako sebelum pembangunan rumah Majapahit. Maupun warga yang beralih profesi dari pengerajin cor kuningan atau pengerajin batu bata merah menjadi pemilik toko alat tulis atau pemilik warung.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal penyebab ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan. Hal ini sesuai



dengan pernyataan dari Bapak Tajudin selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“kalau pesan tidak ada, tapi harus dijaga gitu. Ada suratnya yang mengatakan harus dijaga supaya tidak dipakai sembarangan begitu kemudian seberguna mungkin untuk pemilik rumah.” (Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Tajudin).

Hal ini juga diperkuat pernyataan dari Ibu Nur selaku warga pemilik rumah Majapahit, sebagai berikut :

“kalau menyuruh tidak. Saya sendiri yang mau membuka toko, tapi tidak dibuat membuka toko semuanya ada yang dibuat ruang tamu, ada yang dibiarkan kosong, kalau saya menggunakannya untuk membuka toko supaya apa ya. . . tempatnya itu lebih sejuk.” (Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di rumah Ibu Nur).

Sosialisasi dan pembinaan merupakan hal yang penting dalam upaya mengembangkan suatu destinasi wisata. Kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang pariwisata sehingga perlu adanya pembinaan kepada masyarakat mengenai pariwisata, termasuk pemanfaatan rumah Majapahit agar lebih tertata dan program desa wisata dapat terwujud. Namun pada kenyataannya setelah pembangunan belum ada pembinaan secara khusus kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Iya, ini semacam apa, euforia dari masyarakat sendiri. Ini juga belum ada pendampingan. Seharusnya Pemerintah Mojokerto Kabupaten ini memberikan pendampingan sehingga masyarakat lebih terarah. Selama ini disupayakan, jadi mereka jualan apa, kopi, segala macam, ada yang patung juga. Jadi permasalahan itu kan seharusnya ada pendampingan, kembali karena anggaran ini



90% dari provinsi, yang 10% dari kabupaten. Seharusnya karena ini wilayah kabupaten, pendampingannya itu mutlak dari kabupaten. Hal ini yang belum saya temui disitu. Sehingga terjadi di masyarakat ada yang dijadikan itu tadi, warung kopi, segala macam. Mungkin itu nanti kedepan harus itu Pemerintah Daerah, untuk teman-teman akademisi mendorong. Itu tugasnya disitu, mendorong Pemerintah Daerah. Selama ini kosong, tidak ada kegiatan sama sekali. Seharusnya setiap masyarakat yang mendapat program rumah ini setiap satu bulan satu kali periodik itu ada pendampingan dari Dinas Pariwisata, itu nggak ada disini. Harus ini nanti.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Belum adanya pembinaan atau pendampingan dapat menyebabkan perencanaan pengembangan kampung Majapahit terhambat. Seperti yang terjadi saat ini pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit yang dilakukan oleh warga desa Bejjong tidak terarah dengan jelas. Bahkan beberapa warga memanfaatkan rumah Majapahit yang tidak berhubungan dengan pariwisata atau pengembangan pariwisata. Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan yang terjadi begitu rumit ditambah dengan hak kepemilikan rumah Majapahit yang dihibahkan kepada masing-masing warga. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan ini masing-masing ya, masing-masing penerima. Jadi bukan, desa hanya memfasilitasi, Pemerintah Daerah juga tidak pengelola. Jadi milik, ini hibah jadi milik masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

3. Penerapan Strategi Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit

Strategi pengendalian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pemanfaatan akan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pentingnya pengendalian dalam upaya pengembangan suatu destinasi wisata adalah untuk menghindari kemungkinan ketidaksesuaian fungsi yang tidak terkendali dan tidak terarah. Strategi pengendalian ketidaksesuaian dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan dan penertiban.

a. Sosialisasi

Seperti yang telah dijelaskan pada faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian, kurangnya sosialisasi dan pembinaan merupakan faktor eksternal penyebab terjadinya ketidaksesuaian. Pembangunan rumah Majapahit memiliki tujuan untuk mendukung pariwisata yang ada di Kecamatan Trowulan. Namun sosialisasi yang kurang kuat akhirnya dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian yang dilakukan warga. Awalnya sosialisasi pembangunan rumah Majapahit yang diharapkan dapat bermanfaat bagi warga dan juga untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kecamatan Trowulan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :



“Iya, intinya rambu-rambunya itu tadi, *art shop* dan *homestay*.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Pernyataan lain yang diungkapkan oleh pihak DISPORABUSPAR justru mengatakan hal yang berlawanan dengan pihak pengusul pembangunan rumah Majapahit. Bapak Redi selaku perwakilan DISPORABUDPAR, sebagai berikut :

“iya memang, terserah pemilik. Mau dibikin warung, toko ataupun *homestay* karena itu memang hak miliknya mereka. Kita hanya membangun rumah supaya seragam untuk pemanfaatannya ya masing-masing.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di kantor DISPORABUDPAR).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya, sebagai berikut :

“iya tidak apa-apa. Karena itu diserahkan sebagai kepemilikan, dirawat, dan dimanfaatkan untuk apapun silahkan kalau dibuat toko tidak masalah. Karena toko juga sebagai mata pencaharian kalau kita menengok pada zaman dahulu rumah-rumah Majapahit ada yang dipakai untuk warung iya kan? Orang Majapahit dulu juga ada yang membuka kedai, penginapan, dan untuk apapun seperti itu. Supaya alami apa yang diinginkan masyarakat, kita juga akan membantu masyarakat bahwa pariwisata itu butuh ini, dan ini, dan ini sehingga masyarakat perlu mempersiapkan diri sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Contohnya seperti jualan cinderamata, untuk oleh-oleh, “oh saya siap untuk *homestay*” silahkan, “saya siap untuk jualan makanan” silahkan tidak masalah yang penting rumah itu tidak dirubah tidak dirusak melainkan harus dirawat.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor Balai Desa Bejjong).

Adanya perbedaan sosialisasi tersebut dapat menjadi suatu hambatan untuk mewujudkan tujuan awal yang ingin dicapai. Perbedaan penyampaian tentang sosialisasi ini juga dapat menyebabkan kesalahan pemahaman dari warga guna mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pelatihan

Selain sosialisasi pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pelatihan ataupun pembinaan. Pelatihan atau pembinaan dilakukan agar pemanfaatan yang diharapkan dapat terpenuhi dan terarah. Namun setelah pembangunan sekitar 200 unit rumah Majapahit di desa Bejjong telah selesai belum ada upaya pembinaan yang dilakukan. Sehingga terkesan hanya dilakukan pembangunan rumah Majapahit saja tanpa ada kelanjutannya. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Kita sudah sering usulkan, Pemkab untuk segera ada pendampingan. Tapi sampai bulan ini belum ada juga. Permasalahan itu ditambah juga di kabupaten ini sering terjadi rotasi kepemimpinan itu. Setiap berapa tahun sekali atau satu tahun sekali bahkan belum ada, itu ganti kepala dinas. Susahnya gitu.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Belum adanya pembinaan yang dilakukan terutama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan. Walaupun rumah Majapahit merupakan suatu hibah yang diberikan kepada masyarakat, pembinaan tetap perlu dilakukan agar pembangunan rumah Majapahit bermanfaat dengan maksimal. Dikonfirmasi dari pihak DISPORABUDPAR menyatakan bahwa nantinya akan dilakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Redi selaku perwakilan DISPORABUDPAR, sebagai berikut :



“untuk membangkitkan Majapahit itu sendiri juga apa ya, tidak mudah untuk membangkitkan budayanya tidak hanya rumah Majapahit saja sebenarnya kalau memang mau Majapahit seperti dulu. Nah ini harus kita gali perlahan-lahan awalnya mungkin rumah Majapahit dulu dan kedepannya disitu ada pembinaan-pembinaan kesenian mungkin seperti itu kedepannya. Harapannya seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di kantor DISPORABUDPAR).

c. Pengawasan dan penertiban

Upaya pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan yang terakhir adalah pengawasan dan penertiban. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan kembali hal-hal yang dianggap menyimpang dari perencanaan awal. Tetapi upaya pengawasan maupun penertiban dari ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit mendapat suatu kendala. Kendala tersebut adalah rumah Majapahit merupakan hibah yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak bisa memberikan sanksi kepada masyarakat pemilik rumah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Masyarakat selalu tidak bisa dipaksa, jadi kita bina. Kalau harapan kita nanti ada semua, kalau saya dari sanggar sendiri ini nanti yang kedepan yang di sekitar jalan ini saya bikin kaos gambar candi-candi itu ya, di blok sini. Kalau disana kita titip batik-batik yang anda lihat tadi, itu usaha-usaha sanggar kita. Jadi supaya tidak fatal ketika dibikin kopi, segala itu, gambaran itu saya tutup dengan itu, kita titip batik walaupun hanya 10 lembar, 20 lembar. Masyarakat saya coba, di depan itu saya kasih tulisan galeri batik, sebenarnya untuk apa, menutupi itu yang dipakai warung-warung kopi supaya tidak fatal. Yang kesalahan mutlak memang kalau saya bilang ini Pemkab, seharusnya mendampingi, segala macam.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Penertiban dengan membuat sangsi bagi warga yang melakukan ketidaksesuaian jelas tidak akan efektif. Maka dari itu strategi yang diterapkan sekarang yaitu dengan pembinaan secara persuasif. Contohnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyadi yaitu memberikan peluang usaha dengan menitipkan hasil batik maupun kerajinan dari sanggar beliau kepada warga. Sehingga ketidaksesuaian yang telah terjadi tidak menular kepada warga-warga yang lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai penerapan strategi pengendalian ketidaksesuaian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara perencanaan pemanfaatan yang telah diusulkan dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Sementara dari aspek pelatihan atau pembinaan masih belum dilaksanakan. Setelah pembangunan rumah Majapahit selesai Pemerintah Kabupaten belum memberikan tindak lanjut yang terkait dengan pembinaan kepada warga khususnya warga yang menerima program pembangunan rumah Majapahit. Selain itu dari aspek pengawasan dan penertiban tidak dapat sepenuhnya dilakukan karena rumah Majapahit yang merupakan hibah untuk warga, sehingga Pemerintah tidak dapat memaksa warga untuk memanfaatkan dalam hal tertentu. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan adalah dengan menitipkan hasil kerajinan khas yang berupa cor kuninya maupun batik Majapahit kepada warga pemilik rumah Majapahit untuk dijual.



4. Keberlanjutan Pengelolaan Rumah Majapahit

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya berfokus pada perencanaan dan pembangunan saja, namun juga harus memperhatikan pengelolaannya. Hal ini karena pengelolaan merupakan kemudi dalam mewujudkan perencanaan yang telah disusun. Adanya perencanaan dan pembangunan saja tanpa adanya pengelolaan dapat menyebabkan perencanaan dan pembangunan yang telah dilakukan sia-sia. Oleh karena itu selain perencanaan dan pembangunan diperlukan pula pengelolaan yang baik guna mencapai kesuksesan dalam pengembangan destinasi wisata. Seperti halnya di Kecamatan Trowulan yang sedang melakukan pengembangan destinasi wisatanya.

Upaya pengembangan yang dilakukan adalah menciptakan destinasi wisata bertemakan perkampungan ala Majapahit (Kampung Majapahit) dengan membangun teras rumah berarsitekturkan ala rumah Majapahit pada zaman dahulu. Pembangunan rumah Majapahit tersebut dilakukan di tiga desa di Kecamatan Trowulan yaitu Bejjong, Jatipasar, dan Sentonorejo. Setelah pembangunan rumah Majapahit tersebut selesai khususnya di desa Bejjong, belum ada keberlanjutan pengelolaan mengenai rumah Majapahit. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan ini masing-masing, masing-masing penerima. Jadi bukan, desa hanya memfasilitasi, Pemerintah Daerah juga tidak pengelola. Jadi milik, ini hibah jadi milik masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Belum adanya pengelolaan mengenai rumah Majapahit yang telah dibangun dapat menyebabkan munculnya permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan destinasi wisata. Padahal dengan adanya rumah Majapahit merupakan potensi yang baru dalam sektor pariwisata serta memiliki manfaat yang besar baik bagi warga sekitar dan juga sektor pariwisata desa Bejjong maupun Kecamatan Trowulan secar keseluruhan. Seperti pernyataan dari Bapak Redi selaku perwakilan DISPORABUDPAR, sebagai berikut :

“banyak, masyarakat sekarang ini yang dulunya tidak punya ruang tamu jadi dimanfaatkan untuk ruang tamu. Bentuknya jadi seragam terus apa namanya, otomatis dengan keindahan itu orang-orang sekitar sana dengan sendirinya menjaga kebersihan lingkungannya itu. Itu dampak yang terlihat sekarang, kalau untuk wisatawan mungkin sedikit meningkat dari pada yang sebelumnya.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di kantor DISPORABUDPAR).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Sangat sangat memungkinkan. Jadi ini saja kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun kemarin jauh meningkat dari kunjungan wisatanya. Banyak menarik dari setelah adanya booming rumah majapahit ini membuat orang penasaran seperti apa rumah majapahit. Kedepannya tinggal mengemas, jadi saya dengar ini tahun ini akan dikasih sama anggaran Pemkab ini sepertinya, untuk membangun pagar.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Pengelolaan yang baik mutlak diperlukan dalam upaya pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Trowulan khususnya desa Bejjong itu sendiri. Keberlanjutan pengelolaan rumah Majapahit kemudian dilihat dari



aspek promosi dan program-program lanjutan dari pembangunan rumah Majapahit.

a. Promosi yang dilakukan

Promosi yang merupakan bagian dari bauran pemasaran dilakukan untuk memperkenalkan suatu atraksi wisata kepada calon pengunjung serta mempengaruhi agar calon pengunjung tertarik untuk mengunjungi atraksi wisata tersebut. Termasuk pembangunan rumah Majapahit yang tentunya memerlukan promosi agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Adapun upaya mempromosikan rumah Majapahit antara lain dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Promosi Rumah Majapahit Melalui Media Sosial

(Instagram @kabarmojokerto)

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016.



Salah satu promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial baik dari akun pribadi maupun akun yang memang membahas khusus mengenai Mojokerto. Promosi melalui media sosial ini dianggap cukup efektif karena pada era saat ini sebagian besar masyarakat memiliki akun media sosial. Sehingga dengan promosi melalui media sosial dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas daripada cara-cara promosi sebelum adanya media sosial. Selain dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, promosi melalui media sosial juga tidak memerlukan biaya yang besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa, sebagai berikut :

“strategi secara terorganisir kita mungkin masih berjalan 50 persen, lalu mungkin secara personal bisa dilihat di media sosial. kalau secara terstruktur belum ada, dulu pernah ada kita dulu pernah membuat webnya dua kali tahun 2009 dan 2011 karena *hosting* harus beli jadinya tidak diperpanjang. tapi teman-teman sekarang sudah bisa sendiri melalui media sosial masing-masing jadi mereka yang banyak mempromosikannya.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Selain melalui media sosial promosi juga dilakukan dengan pengadaan *event* atau tradisi dan upacara adat. *Event* atau upacara ada tersebut diselenggarakan di obyek-obyek wisata yang ada di Kecamatan Trowulan. *Event* tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan dan sudah masuk dalam kalender wisata Provinsi dari Kabupaten Mojokerto. Seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini tentang jadwal *event* budaya di kawasan situs Trowulan.

**Tabel 6. Jadwal Kegiatan Seni, Budaya & Olahraga Disporabudpar
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 di Trowulan**

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi
1	Pemilihan Duta wisata Gus dan Yuk	30 April 2016	Candi Bajang Ratu
2	Ngontel bareng di Bumi Majapahit II	15 Mei 2016	Pendopo Agung Trowulan
3	Festival musik patrol	17 Juni 2016	Trowulan
4	Ruwat Agung Nuswantara Majapahit	6-9 Oktober 2016	Pendopo Agung
	Festival dan Gebyar Macapat	6 Oktober 2016	Trowulan
	Unduh-unduh Patirtaan	6 Oktober 2016	
	Ruwat Sukerto massal	7 Oktober 2016	
	Mangesti Suro	7 Oktober 2016	
	Kirab Agung Nuswantara Majapahit	9 Oktober 2016	
5	Haul Syekh Jumadil Kubro	17-18 Oktober 2016	Komplek Makam Troloyo
	Kirab Haul Syekh Jumadil Kubro	17 Oktober 2016	
	Lailatul Hadrah	17 Oktober 2016	
	Khotmil Qur'an	18 Oktober 2016	
	Pengajian Umum	18 Oktober 2016	
6	Larung Sesaji	13 November 2016	Kolam Segaran Trowulan
7	Pergelaran Ludruk	18 November 2016	Museum Trowulan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dari website resmi Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, 2016.

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beragam *event* budaya yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Event-event budaya tersebut diharapkan dapat menjadi sarana interaksi

langsung antara wisatawan dengan masyarakat setempat dan wisatawan

juga bisa menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Selain *event* yang

telah dijadwalkan tersebut terdapat pula *event-event* yang

diselenggarakan oleh beberapa komunitas-komunitas beserta sanggar-

sanggar di Kecamatan Trowulan. Seperti peringatan ulang tahun

Majapahit yang ke 723 tahun dengan tajuk “Getah Getih Ring Majapahit” pada tanggal 06-26 November 2016. *Event* tersebut diselenggarakan oleh seluruh komunitas-komunitas pemerhati budaya yang ada di wilayah Trowulan dan bekerjasama dengan media massa maupun komunitas pemerhati budaya lainnya di luar wilayah Trowulan. Acara pada *event* tersebut juga sangat menarik diantaranya ada Kirab pusaka Majapahit, Pementasan kolosal, konser musik Jazz dan lain sebagainya. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 10 brosur Getah Getih Ring Majapahit.



Gambar 10. Brosur Peringatan Ulang Tahun Majapahit “Getah Getih Ring Majapahit”

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, 2016.

Event Getah Getih Ring Majapahit secara tidak langsung dapat mempromosikan rumah Majapahit khususnya di desa Bejjong karena beberapa acara dalam *event* tersebut ditempatkan di candi brahu yang ada di desa Bejjong. Sehingga masyarakat dapat mengikuti *event* sekaligus juga dapat melihat-lihat perkampungan ala Majapahit di desa Bejjong. Namun promosi yang khusus tentang rumah Majapahit belum dilakukan secara maksimal. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Iya, jadi kita tidak berani booming langsung publikasi, bahaya itu nanti, yang malu itu kita sendiri. Harus kita lihat dulu, kita publikasi itu lihat kesiapan masyarakat. mungkin mudah-mudahan tahun depan.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Kesiapan masyarakat merupakan faktor penting dalam mempromosikan destinasi wisata Kampung Majapahit di desa Bejjong. Bila promosi besar-besaran dilakukan, namun masyarakat belum siap sepenuhnya akan memunculkan kekecewaan dari wisatawan yang datang.

b. Program lanjutan dari pembangunan rumah Majapahit

Keberlanjutan dari program pembangunan rumah Majapahit juga ikut menentukan kesuksesan pengembangan Kampung Majapahit menjadi destinasi wisata unggulan. Memang untuk mewujudkan destinasi wisata Kampung Majapahit tidak mudah, selain memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik juga diperlukan kesiapan dari

masyarakat yang menjadi objek. Untuk itu perlu adanya program lanjutan yang menjadi pelengkap dari pembangunan rumah Majapahit. Program selanjutnya yang sudah direncanakan khususnya pada desa Bejjong adalah pembangunan pagar Majapahitan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Edi selaku perwakilan aparatur desa, sebagai berikut :

“tahun ini ada namanya ‘pagar majapahit’ dan akan dibangun dari ujung selatan sampai utara.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Pagar, iya itu terutama yang dapat rumah Majapahit itu dapat pagar, bertahap memang apalagi nanti kalau sudah ada pagar lalu aksesoris lain akan lebih menarik.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Pembangunan pagar Majapahit diharapkan dapat lebih mencerminkan suasana perkampungan ala Majapahit. Tidak hanya pembangunan pagar Majapahit di desa Bejjong saja, program lanjutan yang lainnya adalah pembangunan kembali sekitar 300 unit rumah Majapahit. Namun pembangunan rumah Majapahit yang selanjutnya dilakukan di desa yang berbeda yaitu desa Watesumpak, desa Trowulan, dan desa Temon. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Ada, itu pagar kalau di Bejjong sendiri ya, pagar jelas tahun ini, kemudian tahun ini juga dari provinsi juga turun untuk tiga desa, lanjutan kemarin itu yang tahap awal Bejjong, Sentono, sama Jati



Pasar. Kalau yang tahun ini ada yang Watesumpak, Desa Trowulan, sama Temon, masing-masing kurang lebih dapat sekitar 100 rumah, jadi 300 rumah. Usulan ini juga sudah saya kirim sampai tahun 2020 kalau tidak salah kemarin itu. Usulan berikutnya saya berharap satu kecamatan itu dapat. Kecamatan Trowulan itu sudah masuk dalam KCBN (Kawasan Cagar Budaya Nasional). Nah itu kurang lebih ada 18 desa, itu nanti yang saya bidik. Yang masuk kawasan KCBN itu harus dapat rumah-rumah seperti itu. Itu karena yang masuk KCBN diperkirakan tilas kawasan elit ibukota saat itu, ibukota Majapahit. Maka dari itu kita klop disitu, 18 desa, itu rencana jangka panjangnya dari sanggar seperti itu. Tapi sudah saya kirim proposalnya ke Pak Gubernur sampai tahun 2020.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Jadi program pembangunan rumah Majapahit belum sepenuhnya selesai, tetapi tiga desa yang merupakan pembangunan tahap awal yaitu desa Bejjong, Jatipasar, dan Sentonorejo telah sepenuhnya selesai.

Konsep besar pengembangan pariwisata untuk mewujudkan wisata Kampung Majapahit memang tidak mudah. Selain memerlukan waktu yang cukup lama ada juga hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Hal yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi selaku perwakilan aparaturnya desa, sebagai berikut :

“kita juga mengharapkan adanya pembangunan pariwisata secara *continue* maksudnya adalah jangka panjang, 35 atau 50 tahun lagi tidak masalah yang penting rekonstruksi itu berjalan lancar. misalkan seperti ini, pemerintah membuat suatu kajian atau perencanaan (*blue print*) pembangunan pariwisata secara keseluruhan di Kabupaten Mojokerto dan dibuatlah aturan siapapun bupatinya itu harus dilaksanakan tidak bongkar-pasang. Kali ini sektor Trowulan kita benahi tahun ini sampai selesai berikutnya dimana? Trawas, Pacet dan sebagainya. lansekapnya dan *blue print* ada, pembangunan pariwisata jangka panjang 30 atau 50 tahun tidak masalah yang penting terstruktur dan terjadwal

sesuai dengan yang diinginkan. sebenarnya kita bangun rumah mau gaya apa? sekarang hari ini kita pondasinya dulu besok tahun depan temboknya begitu terstruktur. bukan berarti hari ini saya mau membuat rumah gaya seperti ini pondasi seperti ini besok yang meneruskan anaknya dan tidak suka model seperti ini ganti lagi pondasinya akhirnya berhenti besoknya lagi yang meneruskan saudaranya, kalau seperti itu tidak jadi-jadi. maka kalau ada aturan bentuk pariwisata Kabupaten Mojokerto seperti ini. hari ini bupatinya si “A” oh Cuma bisa bangun pondasinya saja, besok bupatinya ganti kita tinggal meneruskan saja apa yang ada seperti itu. tidak mereka membuat konsep dan *maind-set* sendiri-sendiri akhirnya bongkar-pasang dan tidak akan jadi.” (Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di kantor balai Desa Bejjong).

Inti dari pernyataan diatas adalah permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangan pariwisata pada umumnya yaitu berganti-gantinya kebijakan seiring dengan pergantian pemegang kekuasaan. Sering kali didapati bahwa perbedaan kebijakan yang diberlakukan pada akhirnya akan membuat pengembangan yang telah dikerjakan di periode sebelumnya terbengkalai atau bahkan dihancurkan dan memulai dengan konsep baru dari awal lagi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Supriyadi selaku pengusul pembangunan rumah Majapahit, sebagai berikut :

“Kita sudah sering usulkan, Pemkab untuk segera ada pendampingan. Tapi sampai bulan ini belum ada juga. Permasalahan itu ditambah juga di kabupaten ini sering rotasi pimpinan itu ya. Setiap berapa tahun sekali atau satu tahun sekali bahkan belum ada, itu ganti kepala dinas. Susahnya gitu.” (Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2016, bertempat di rumah Bapak Supriyadi).

Berdasarkan penjelasan mengenai program lanjutan dari pembangunan rumah Majapahit terdapat isu atau permasalahan yang terjadi diantaranya adalah kesiapan masyarakat masih dianggap kurang

siap. Sehingga tidak dilakukan upaya promori yang menggebu-gebu, namun dilakukan promosi secara perlahan-lahan dan mempersiapkan masyarakat agar lebih baik lagi. Selain kesiapan masyarakat yang masih dianggap kurang siap, kekhawatiran akan terjadinya perubahan kebijakan juga menjadi permasalahan dalam pengembangan pariwisata yang telah direncanakan. Perubahan kebijakan ini biasanya disebabkan adanya pergantian pemegang kekuasaan tertinggi.

C. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit

Rumah Majapahit adalah suatu program rekonstruksi rumah-rumah warga desa Bejjong dan dua desa lainnya di Kecamatan Trowulan. Rekonstruksi yang dilakukan hanya pada bagian teras atau ruang tamu milik warga tidak secara menyeluruh. Pembangunan rumah Majapahit merupakan ide yang dikemukakan oleh gubernur Jawa Timur untuk membuat sesuatu di Trowulan yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Ide tersebut kemudian direspon oleh komunitas pemerhati budaya di Trowulan dengan mengusulkan konsep pembangunan rumah Majapahit yang ditanda tangani Kepala Desa se-Kecamatan Trowulan kepada Gubernur Jawa Timur. Usulan yang diajukan pada tahun 2010 tersebut baru mendapatkan respon dari Gubernur Jawa Timur empat tahun kemudian pada tahun 2014.



Tahun 2014 Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan rumah Majapahit total sebesar Rp. 7,4 milyar. Bantuan keuangan khusus tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto No. 27 tahun 2015 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan rumah Majapahit Tahun Anggaran 2015”. Bantuan disalurkan kepada masing-masing Desa yang mendapatkan program pembangunan rumah Majapahit salah satunya Desa Bejjong. Sekitar 200 unit rumah di Desa Bejjong mendapatkan program rekonstruksi rumah Majapahit. Pembangunan rumah Majapahit dimulai pada September 2014 dan selesai pada awal Tahun 2016.

Pembangunan rumah Majapahit bertujuan untuk memunculkan daya tarik wisata yang baru di Kecamatan Trowulan dan lebih memperkenalkan situ-situs di Kecamatan Trowulan kepada masyarakat Indonesia maupun mancanegara, sebagaimana yang tercantum pada poin lima dan enam dalam usulan program rekonstruksi rumah Majapahit. Poin lima berbunyi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan warisan sejarah budayanya sendiri. Serta poin enam yang berbunyi membuka ruang kreatifitas dibidang usaha industri pariwisata seni dan budaya pada masyarakat Trowulan secara umum, serta harapan akan bisa mengalihkan



aktifitas kerja atau mata pencaharian beberapa kelompok masyarakat yang dapat merusak kawasan cagar budaya.

Selain itu menurut hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi (pengusul) serta perwakilan pihak Pemerintah menyatakan pembangunan rumah Majapahit diharapkan dapat menjadi penunjang program desa wisata serta fasilitas bagi wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Trowulan seperti *homestay*. Menurut Sunaryo (2013: 25) fasilitas amenities atau akomodasi adalah berbagai jenis fasilitas dan kelengkapan yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap selama melakukan kegiatan berwisata. Pemanfaatan sebagai *homestay* juga dapat memberikan pengalaman kepada wisatawan yang menginap untuk mengikuti kegiatan masyarakat Bejjong. Tidak hanya sebagai *homestay* rumah Majapahit juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga yang menerima rekonstruksi rumah Majapahit tersebut seperti galeri dari hasil kerajinan atau juga sebagai tempat berfoto (photo boot).

Upaya rekonstruksi rumah Majapahit tersebut dilakukan untuk lebih menghidupkan suasana perkampungan pada zaman Kerajaan Majapahit dan menguatkan akan nilai sejarah yang pernah ada di Desa Bejjong yaitu merupakan satuan wilayah pusat Kerajaan Majapahit. Namun setelah rekonstruksi atau pembangunan sekitar 200 unit rumah Majapahit selesai dilaksanakan pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa warga desa Bejjong tidak sesuai dengan tujuan utama pembangunan



rumah Majapahit tersebut. Pemanfaatan yang dilakukan beberapa warga desa di antaranya adalah membuka warung makan, membuka toko sembako, dan toko-toko lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan utama rekonstruksi atau pembangunan rumah Majapahit. Tujuan utama meningkatkan kesadaran serta membuka ruang kreatifitas masyarakat dibidang industri pariwisata seperti *homestay* dan *art shop* yang menunjang pariwisata dan usaha kecil menengah (UKM) setempat.

Pemanfaatan rumah Majapahit sebagai toko sembako, warung makan, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan pariwisata dapat dikategorikan sebagai suatu ketidaksesuaian pemanfaatan.

Ketidaksesuaian pemanfaatan seperti yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut tidak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pariwisata bahkan dapat berdampak negatif terhadap upaya peningkatan pariwisata di Desa Bejijong. Sehingga ketidaksesuaian tersebut akan dapat menghambat perencanaan yang telah disusun. Hadiwijoyo (2012) menyebutkan bahwa perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah suatu angan-angan yang akan diwujudkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang melalui pariwisata. Menurut wawancara dengan Bapak Supriyadi yang merupakan pengusul program pembangunan rumah Majapahit, menyebutkan bahwa tidak adanya pendampingan dari pihak-pihak terkait yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan oleh beberapa warga Desa Bejijong.



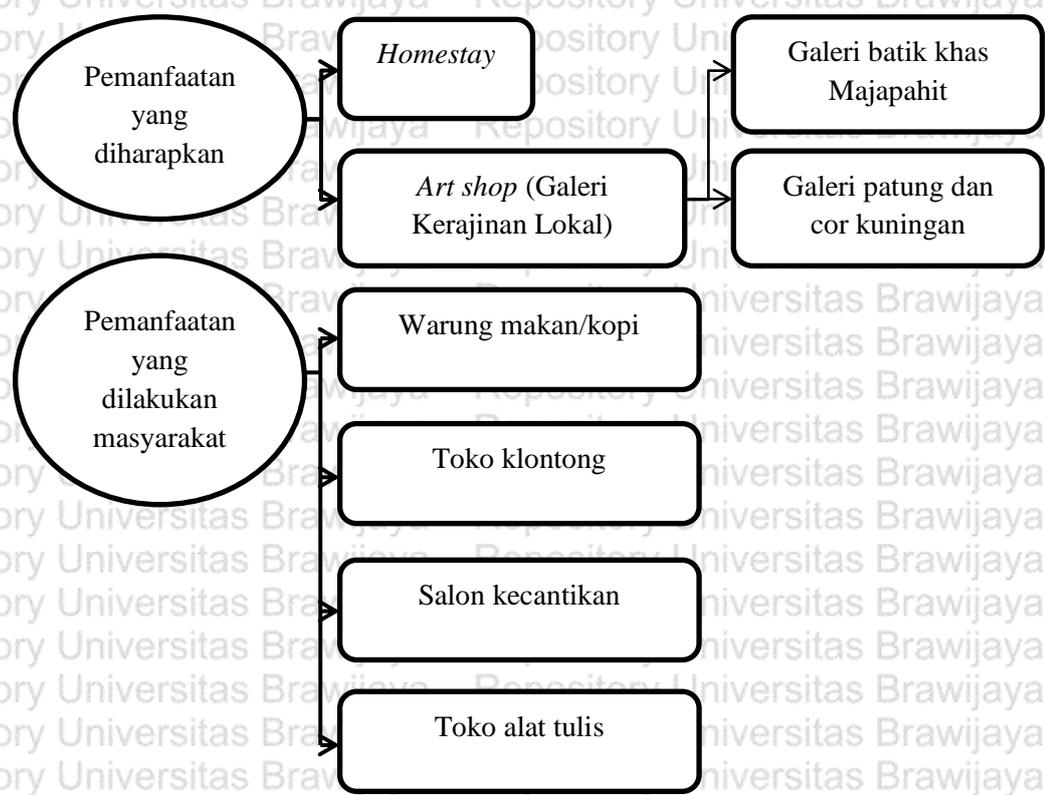
Selama ini belum ada pendampingan yang dilakukan kepada warga Desa Bejijong yang mendapat program rumah Majapahit setelah rumah-rumah tersebut selesai dibangun. Seharusnya dilakukan pendampingan atau pembinaan kepada warga yang mendapat program rumah Majapahit dari pihak Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Kabupaten agar pemanfaatan lebih dimaksimalkan pada sektor pariwisata. Namun dikonfirmasi dari pihak perwakilan Disporabudpar dan perwakilan aparat desa, menyatakan yang sebaliknya bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa warga bukanlah merupakan suatu permasalahan. Karena selain rumah-rumah yang telah terbangun adalah hak milik masing-masing warga juga pada zaman Kerajaan Majapahit dahulu terdapat pula warga yang berjualan baik berupa toko-toko maupun warung-warung makan dan kopi. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan atau usaha-usaha berdagang seperti membuka toko dan warung sudah menjadi mata pencaharian bagi beberapa warga pada zaman dahulu maupun warga desa Bejijong sekarang ini.

Terdapat dua macam pandangan dan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan dari pembangunan rumah Majapahit ini. Pada satu sisi pengembangan pariwisata harus dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengembangan maupun pengelolaan pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh Sunaryo (2013: 215) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepannya. Adanya pembangunan rumah Majapahit di Desa Bejijong diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata dengan memanfaatkan rumah tersebut sebagai *homestay* ataupun *art shop*. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan rumah Majapahit tersebut secara lebih maksimal lagi.

Namun di sisi lain, bila warga yang mendapatkan program rumah Majapahit tersebut dipaksa memanfaatkan rumah tersebut untuk satu hal tertentu tanpa dibekali dengan pembinaan yang tepat maka akan percuma saja bahkan dapat mematikan mata pencaharian warga. Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemberian sangsi kepada warga, karena rumah tersebut merupakan hibah yang diberikan kepada warga dan menjadi hak masing-masing pemilik sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan serta pembinaan yang baik dan berkala dari Pemerintah melalui Dinas pariwisata maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pariwisata untuk mewujudkan desa wisata (Kampung Majapahit) di Desa Bejijong.





Gambar 11. Bagan Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 11 bagan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit terdapat dua perbandingan yaitu pemanfaatan yang diharapkan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh warga penerima program rekonstruksi rumah Majapahit di Desa Bejijong. Maksud dari pemanfaatan yang diharapkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan program rekonstruksi tersebut dan telah ditetapkan dalam perencanaan. Harapan paling utama tentunya adalah untuk memunculkan atau menghidupkan kembali lansekap perkampungan pada zaman Kerajaan Majapahit serta mewujudkan desa wisata (Kampung Majapahit) dan menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak perekonomian di Kecamatan Trowulan. Lansekap atau arsitektur lansekap menurut Hakim



(2012) mengatakan bahwa arsitektur lansekap adalah ilmu dan seni perencanaan, perancangan, serta pengaturan dari lahan dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya, sehingga tersajikan lingkungan yang fungsional. Perencanaan lansekap merupakan proses kolaboratif untuk memberdayakan peran-serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembebasan lahan, pengembangan, konektivitas, pendanaan, dan pengelolaan suatu ruang terbuka.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah dilakukan dengan adanya program rekonstruksi rumah Majapahit yang merupakan keputusan yang disepakati oleh seluruh kepala desa di Kecamatan Trowulan. Pemerintah hanya memlontarkan pernyataan untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit, dan kemudian direspon dengan mengusulkan konsep pembangunan rumah Majapahit oleh masyarakat melalui tim pengusul dari sanggar Bhagaskara dan seluruh kepala desa Kecamatan Trowulan. Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku pihak pengusul menyebutkan bahwa sekitar tahun 2010 dari berita *online* (kompas.com) Gubernur Jawa Timur ingin membuat sesuatu di Trowulan berkaitan dengan kerajaan Majapahit, kemudian diajukanlah usulan konsep pembangunan ruamh Majapahit.

Konsep tersebut memiliki tujuan beberapa diantaranya adalah membuka kreatifitas masyarakat dibidang industri pariwisata di Trowulan, dan juga terciptanya peluang usaha di sektor pariwisata untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan yang diharapkan adalah pemanfaatan dalam sektor pariwisata atau yang berhubungan dengan industri pariwisata, seperti *homestay* ataupun galeri hasil kerajinan masyarakat (*art shop*).

Namun pada prakteknya terdapat beberapa warga yang melakukan pemanfaatan rumah Majapahit tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari perencanaan pembangunan rumah Majapahit. Beberapa pemanfaatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan seperti gambar 11 berupa warung kopi, toko kelontong, salon kecantikan dan toko alat tulis. Beberapa pemanfaatan yang dilakukan oleh warga tersebut memang kurang berhubungan dengan industri pariwisata melainkan kebutuhan secara umum. Pemanfaatan tersebut juga tidak sesuai atau dapat dikatakan menyimpang dari harapan dan tujuan pembangunan rumah Majapahit seperti yang telah direncanakan, serta juga dapat menghambat upaya untuk mempromosikan destinasi wisata Kampung Majapahit.

2. Faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit

Suatu tindakan yang dilakukan oleh individu pasti memiliki alasan atau sebab tersendiri yang mendorong untuk melakukan tindakan tersebut.

Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan oleh beberapa warga Desa

Bejjong yang mendapatkan program rumah Majapahit dalam memanfaatkan rumah tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa

warga Desa Bejjong dapat dikategorikan ke dalam suatu ketidaksesuaian pemanfaatan berupa menjadikan rumah Majapahit sebagai warung, toko sembako dan lain sebagainya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan warga melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mendorong beberapa warga melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan dalam bentuk rumah Majapahit dijadikan sebagai warung, toko sembako, dan lain sebagainya adalah mata pencaharian warga sebelum adanya rumah Majapahit. Sebagian besar warga yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit dahulunya telah menekuni profesi seperti berjualan sembako, sehingga adanya pembangunan rumah Majapahit juga dimanfaatkan untuk kembali membuka toko sembako. Selain itu ada pula yang dikarenakan keinginan untuk beralih profesi dari sebelumnya seperti salah satu warga yang dulunya berprofesi sebagai pengerajin batu bata setelah adanya rumah majapahit memutuskan untuk membuka warung makan. Hal ini merupakan dampak positif dari pembangunan rumah Majapahit yang dapat meningkatkan atau membuka peluang bagi warga untuk menambah penghasilannya. Namun pemanfaatan yang dilakukan tersebut kurang sesuai dengan perencanaan awal pembangunan rumah Majapahit yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *homestay*, *art shop*, dan penunjang program desa wisata.

Seharusnya rumah Mahapahit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan pariwisata dan memberikan kesejahteraan kepada warga khususnya di Desa Bejijong melalui pariwisata. Tidak mudah pula untuk mempengaruhi warga agar melakukan pemanfaatan yang sesuai dengan perencanaan awal pembangunan rumah Majapahit. Selain hak kepemilikan atas rumah tersebut, permasalahan lainnya yang dihadapi adalah kesiapan warga untuk menerima datangnya pariwisata juga masih kurang. Warga belum memahami sepenuhnya manfaat dari pariwisata dan belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendapatkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anwar (2009) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi suatu kendala untuk mengembangkan pariwisata di Kecamatan Trowulan.

Selain faktor internal terdapat pula faktor eksternal yang menyebabkan beberapa warga Desa Bejijong melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit. Faktor eksternal yang paling berdampak adalah kesalahpahaman sosialisasi pada awal pembagunan dan juga tidak adanya pembinaan kepada warga setelah program pembangunan rumah Majapahit selesai dilaksanakan. Terjadinya kesalahpahaman mengenai sosialisasi pemanfaatan rumah Majapahit tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak pengusul (Bapak Supriyadi) dengan pihak pengawas atau pelaksana pembangunan (Disporabudpar). Sehingga terjadi kesalahan dalam penyampaiannya kepada warga mengenai pemanfaatan

rumah Majapahit kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa warga (narasumber) yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan mengatakan bahwa tidak ada anjuran mengenai pemanfaatan rumah Majapahit secara khusus dari Disporabudpar.

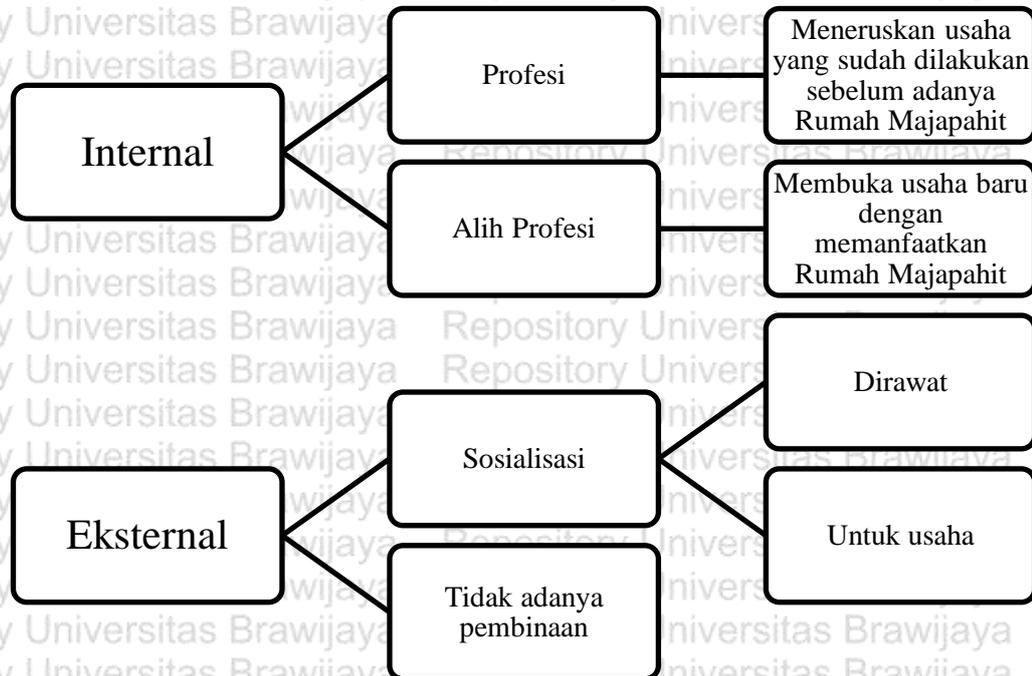
Berkaitan dengan pemanfaatan rumah Majapahit, beberapa narasumber mengatakan Disporabudpar hanya menyampaikan bahwa rumah Majapahit bisa digunakan untuk usaha. Usaha yang dipahami oleh warga Desa Bejjong berdasarkan anjuran dari Disporabudpar adalah usaha secara umum tidak hanya terbatas untuk penunjang pariwisata. Sehingga warga cenderung memilih untuk melanjutkan usaha seperti membuka kembali toko sembako maupun beralih membuka warung makanan dan kopi pada rumah Majapahit yang didapatkan. Kurangnya koordinasi antara pihak pengusul pembangunan dengan pengawas pembangunan rumah Majapahit menyebabkan pemahaman yang berbeda dari warga Desa Bejjong.

Faktor eksternal selanjutnya yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan adalah tidak adanya pembinaan maupun pendampingan kepada warga desa yang mendapatkan program rumah tersebut. Setelah program pembangunan rumah Majapahit di Desa Bejjong selesai sampai saat ini masih belum ada pembinaan ataupun pendampingan kepad warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengusul pembangunan mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto selaku pemegang otoritas administratif memberikan



pendampingan atau pembinaan kepada warga yang mendapatkan program rumah Majapahit. Pendampingan dapat dilakukan baik melalui lembaga resmi Pemerintah seperti Disporabudpar, membentuk lembaga khusus pendampingan desa wisata, dan atau memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Terlebih lagi di Kecamatan Trowulan juga terdapat beberapa lembaga atau komunitas seperti Komunitas Save Trowulan dan Komunitas Genta (Gerakan Cinta Majapahit).

Pembinaan atau pendampingan juga merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan kesiapan warga yang telah disebutkan sebelumnya pada faktor internal. Adanya pembinaan atau pendampingan nantinya dapat mempersiapkan warga untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh warga Desa Bejjong dan dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya di Kecamatan Trowulan. Pembinaan atau pendampingan juga berguna untuk membimbing warga supaya lebih terarah dalam pemanfaatan rumah Majapahit guna mencapai tujuan utama pembangunan rumah Majapahit. Oleh karena itu pembinaan atau pendampingan mutlak diperlukan oleh warga khususnya warga yang mendapat program rumah Majapahit baik pembinaan dari Pemerintah Kabupaten secara langsung maupun dari komunitas yang ada. Sehingga tujuan dari pembangunan rumah Majapahit dapat dicapai dan dapat mewujudkan Kecamatan Trowulan sebagai destinasi wisata Kampung Majapahit.



Gambar 12. Bagan Faktor Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian

Pemanfaatan Rumah Majapahit

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017

3. Strategi pengendalian ketidaksesuaian rumah Majapahit

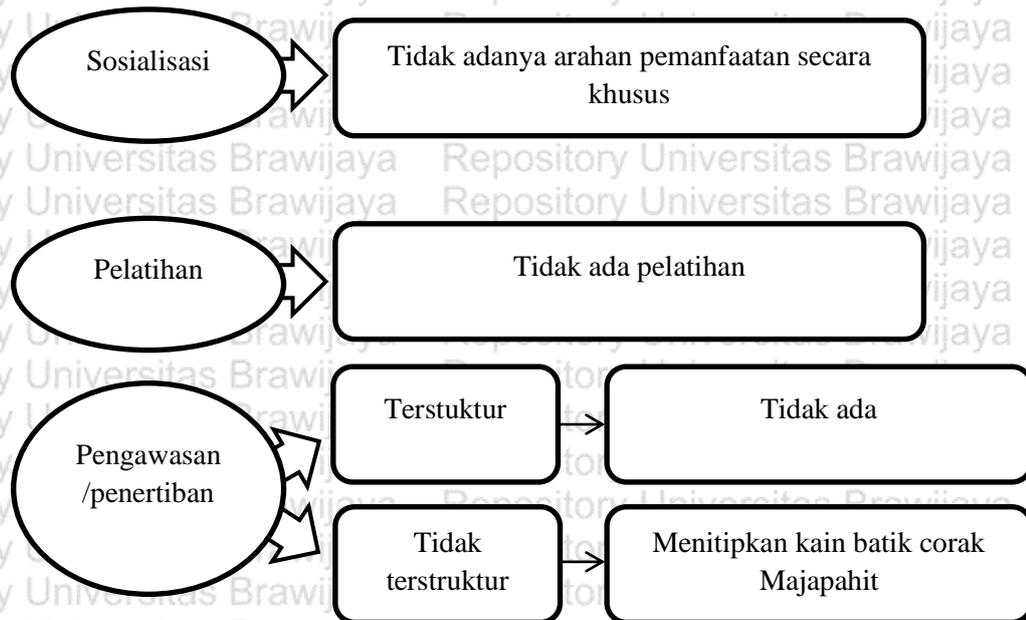
Ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit yang terjadi khususnya pada pada Desa Bejjong tentunya memerlukan suatu strategi untuk dapat memberikan solusi atas ketidaksesuaian tersebut. Ibrahim (1998) pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu manajemen pengelolaan yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pemanfaatan telah berlangsung sesuai dengan yang ditetapkan. Upaya pengendalian pemanfaatan dapat dilakukan melalui pengawasan dan penertiban, pengawasan pemanfaatan berupa laporan perubahan pemanfaatan, pemantauan ketidaksesuaian pemanfaatan, dan evaluasi rencana pemanfaatan. Sedangkan penertiban ketidaksesuaian

pemanfaatan diantaranya melalui pemberian sanksi administratif, perdata, pidana. Namun pada kasus ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit terutama pada Desa Bejjong belum sesuai dengan strategi yang dijelaskan teori tersebut.

Sebelum pembangunan rumah Majapahit, tidak ada penetapan strategi pengendalian ketidaksesuaian baik berupa pengawasan maupun penertiban sebagai langkah antisipasi bila terjadi ketidaksesuaian. Begitu pula setelah terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit oleh beberapa warga, masih belum ada strategi yang dilakukan untuk mengarahkan ke tujuan pemanfaatan yang sesuai dengan perencanaan awal sebagai penunjang pariwisata. Tidak adanya strategi pengendalian ketidaksesuaian dikarenakan setelah pembangunan rumah Majapahit selesai, rumah tersebut merupakan hibah yang diberikan kepada warga. Sehingga warga memanfaatkan rumah Majapahit sesuai kehendak masing-masing walaupun pemanfaatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan strategi pengendalian seperti yang dijelaskan pada teori yaitu pengawasan dan penertiban tidak akan dapat diterapkan secara penuh pada kasus ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit di Desa Bejjong. Terlebih lagi pada tahap penertiban, apabila penertiban dilakukan dengan pemberian sanksi maka dapat memunculkan suatu konflik baru yang nantinya dapat memperburuk situasi. Hal tersebut dikarenakan rumah Majapahit yang merupakan hibah untuk warga seperti

yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga tidak mungkin memberikan sanksi kepada warga terhadap apa yang dilakukan pada rumahnya sendiri.



Gambar 13. Bagan Teori Pengendalian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 13 bagan tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan serta pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan yang terjadi yaitu sosialisasi, pelatihan, serta pengawasan atau penertiban. Upaya sosialisasi dilakukan untuk memberikan arahan kepada warga mengenai pemanfaatan yang seharusnya dilakukan. Pelatihan dilakukan guna memberikan ilmu atau bekal pengetahuan kepada warga dalam melakukan pemanfaatan secara tepat dan terarah. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pengetahuan

serta wawasan tentang bagaimana memanfaatkan dan juga pengelolaan mengenai pemanfaatan yang dilakukan. Terakhir adalah pengawasan dan penertiban untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan dengan tujuan yang ditetapkan serta penertiban untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan yang direncanakan dapat terwujud.

Belum ada upaya pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit di Desa Bejijong yang dilakukan baik dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun provinsi. Seperti yang terlihat pada gambar 13 tidak ada arahan secara khusus mengenai pemanfaatan rumah Majapahit agar dimanfaatkan dibidang pariwisata. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Edi (perwakilan aparaturnya desa) yang mengatakan bahwa rumah Majapahit tersebut diserahkan sebagai kepemilikan warga supaya dirawat dan dimanfaatkan untuk apapun tidak apa-apa. Pernyataan yang sama dikatakan oleh Bapak Redi (perwakilan Disporabudpar) mengatakan pemanfaatan rumah Majapahit tersebut terserah pemilik rumah mau dipakai untuk warung, toko, ataupun *homestay* karena itu merupakan hak milik masyarakat. Sedangkan pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Supriyadi (pengusul pembangunan rumah Majapahit) mengatakan bahwa inti atau rambu-rambu pemanfaatan rumah Majapahit yaitu untuk *art shop* atau *homestay*.

Berdasarkan ketiga pernyataan dari narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak pelaksana pembangunan mengenai sosialisasi awal dalam hal

pemanfaatan rumah Majapahit yang telah selesai dibangun.

Kesalahpahaman mengenai sosialisasi pemanfaatan rumah Majapahit tersebut mengakibatkan tidak terarahnya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti pemanfaatan menjadi warung kopi, toko klontong, dan lain sebagainya. Sehingga pemanfaatan yang terjadi di lokasi tidak sesuai atau menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam tujuan pembangunan rumah Majapahit poin enam dan tujuh. Membuka ruang kreatifitas dibidang industri pariwisata pada masyarakat Trowulan dan terciptanya peluang usaha disektor pariwisata di wilayah Kecamatan Trowulan.

Selanjutnya adalah pelatihan sebagai salah satu cara mengendalikan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejijong. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan untuk membuka usaha dibidang pariwisata dan juga bagaimana cara untuk menjalankan atau mengelola usaha-usaha dalam bidang pariwisata, seperti pengelolaan *homestay*. Namun sampai saat ini belum ada pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada warga Desa Bejijong baik seluruhnya maupun warga penerima program rekonstruksi rumah Majapahit. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi mengatkan bahwa sudah sering mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk segera diadakan pendampingan atau pelatihan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Redi menyatakan bahwa

untuk membangkitkan suasana ala Majapahit serta budayanya tidak mudah, harus digali secara perlahan dengan awal rumah Majapahit ini dan kedepannya pembinaan-pembinaan kesenian kedepannya.

Oleh karena itu upaya pembinaan atau pelatihan seperti yang dikatakan oleh Bapak Redi serta pelatihan mengenai pengelolaan *homestay* harus segera dilakukan supaya pemanfaatan rumah Majapahit dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelatihan dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan menunjuk lembaga tertentu ataupun menjalin kerjasama dengan organisasi seperti komunitas pemerhati budaya serta pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pariwisata.

Pengadaan kegiatan pelatihan sesegera mungkin setidaknya dapat mencegah bertambahnya ketidaksesuaian yang dilakukan warga, atau bahkan memunculkan kesadaran dari warga dan beralih melakukan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan rumah Majapahit.

Apabila pelatihan yang dilakukan sukses, maka sektor pariwisata akan dapat memberikan kontribusi maksimal baik terhadap pendapatan ekonomi desa maupun pendapatan ekonomi daerah Kabupaten Mojokerto.

Tidak hanya itu, apabila kegiatan atau sektor pariwisata berkembang pesat maka Desa Bejijong akan dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kecamatan Trowulan yang memiliki potensi wisata *heritage* melimpah.

Selanjutnya adalah pengawasan atau penertiban sebagai salah satu upaya pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit di



Desa Bejjong. Menurut Ibrahim (1998) kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan pengawasan dan penertiban, pengawasan merupakan usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi yang ditetapkan serta penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana. Pada kasus ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit di Desa Bejjong tidak dilakukan pengawasan setelah pembangunan rumah tersebut selesai dilaksanakan. Begitu pula dengan upaya penertiban secara terstruktur oleh pihak Pemerintah Daerah belum dilakukan, namun secara tidak terstruktur telah dilakukan penertiban melalui batik kain hasil dari sanggar bhagaskara yang dititipkan oleh Bapak Supriyadi kepada warga penerima program rumah Majapahit. Seperti pernyataan dari Bapak Supriyadi mengatakan bahwa upaya penertiban dilakukan dengan menitipkan kain batik hasil buatan sanggar untuk menutupi rumah-rumah Majapahit yang dipakai untuk warung-warung kopi dan toko kelontong, walaupun hanya 10 sampai 20 lembar kain saja.

Strategi yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai upaya pengendalian ketidaksesuaian adalah penertiban secara persuasif, seperti pembinaan kepada warga penerima rumah Majapahit tentang pemanfaatan maksimal untuk menunjang pariwisata. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Supriyadi yaitu dengan menitipkan hasil-hasil kerajinan yang dibuat oleh anggota sanggar berupa batik khas corak Majapahit kepada beberapa warga yang mendapat program rumah Majapahit. Menitipkan



hasil usaha dari pihak sanggar tersebut merupakan upaya untuk menutup atau mengendalikan ketidaksesuaian yang telah terjadi agar tidak lebih banyak lagi yang melakukan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit. Warga juga dapat memperoleh manfaat dari batik yang dititipkan oleh sanggar berupa keuntungan dari hasil penjualan kain batik tersebut. Sehingga upaya pengendalian ketidaksesuaian dengan cara menitipkan hasil usaha dari sanggar setempat dapat memberikan manfaat positif bagi warga dan dapat meminimalkan atau menutup ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit.

Selain upaya kecil yang telah dilakukan oleh Bapak Supriyadi strategi pengendalian ketidaksesuaian dapat dilakukan dengan mengadakan program pembinaan kepada warga penerima program rumah Majapahit. Pembinaan dapat berupa pelatihan untuk pengelolaan rumah Majapahit sebagai *homestay* maupun *art shop*, mulai dari kualitas pelayanan, kelayakan (kebersihan dan fasilitas). Pembinaan lain juga dapat berupa pelatihan untuk mengemas potensi menjadi suatu paket wisata, seperti pengemasan industri terakota menjadi paket wisata maupun pengemasan proses membatik untuk menjadi paket wisata. Sehingga wisatawan dapat berinteraksi dan mencoba proses pembuatan terakota dan proses pembuatan batik Majapahit.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memusatkan atau menyediakan tempat khusus untuk warga sebagai tempat berjualan semacam kantin. Tentunya tempat yang disediakan tersebut juga di *design*

dengan arsitektur seperti zaman Majapahit. Tempat tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk menjual makanan tradisional dan juga membuka potensi kuliner tradisional yang ada. Solusi tersebut harus didukung dengan pembinaan kepada warga untuk membangkitkan kuliner lokal yang dimiliki atau bahkan menciptakan suatu kuliner baru yang dapat menjadi ciri khas kuliner Majapahit. Sehingga warga tidak perlu menggunakan rumah Majapahit yang telah dibangun sebagai warung makan atau warung kopi.

Hal lain yang dapat dilakukan kepada warga yang memanfaatkan rumah Majapahit menjadi toko sembako adalah dengan membuat desain baru atau sedikit merubah desain dari rumah yang sudah dibangun. Karena Pemerintah ataupun pihak lainnya tidak dapat memaksakan seluruh warga untuk memanfaatkan rumah Majapahit menjadi seperti *homestay* atau *art shop*. Upaya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah menyesuaikan desain rumah supaya lebih sesuai dengan pemanfaatan rumah yang digunakan sebagai toko sembako. Sehingga dengan desain yang sedikit berbeda dapat menjadi pembeda pula untuk rumah yang digunakan sebagai *homestay* dan rumah yang digunakan untuk kegiatan usaha berdagang warga ataupun yang hanya digunakan sebagai runag tamu.

4. Keberlanjutan pengelolaan rumah Majapahit

Mewujudkan suatu destinasi wisata atau desa wisata yang sukses tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih lagi untuk mewujudkan desa wisata perkampungan Majapahit di Kecamatan

Trowulan. Gumelar (2010) menyatakan meskipun berada di wilayah pariwisata tidak harus semua lingkungan dijadikan sebagai daya tarik wisata serta potensi desa wisata bergantung kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk dapat mewujudkan desa wisata perkampungan Majapahit. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara seluruh stakeholder baik Pemerintah, lembaga masyarakat setempat, serta pihak swasta.

Namun sampai saat ini tidak ada pengelolaan secara khusus yang menangani rumah Majapahit atau desa wisata perkampungan Majapahit, hal ini sesuai dengan pernyataan Rosyadi dkk (JAP, Vol.2, No.5) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa masih belum terdapat regulasi khusus mengatur pengelolaan dan pelestarian Situs Majapahit Trowulan. Sehingga terkesan hanya dilakukan program pembangunan rumah Majapahit saja tanpa adanya keberlanjutan pengelolaan setelah seluruh rumah selesai dibangun. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tidak adanya program pembinaan kepada warga penerima rumah Majapahit menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan oleh warga. Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi mengatakan bahwa belum ada pengelolaan secara terstruktur dan untuk saat ini masih dikelola oleh masing-masing pemilik rumah, karena rumah Majapahit tersebut merupakan hibah untuk warga. Tetapi pengelolaan secara terstruktur harus tetap ada supaya arah dari pembangunan rumah Majapahit dapat tercapai

yaitu sebagai penunjang pariwisata dan mewujudkan desa wisata perkampungan Majapahit.

Pembangunan rumah Majapahit juga masih dilakukan pada desa-desa lain di wilayah Kecamatan Trowulan. Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi mengatakan bahwa perencanaan jangka panjang telah disampaikan kepada Gubernur sampai pada tahun 2020 nantinya, dengan membangun rumah Majapahit pada 18 desa di Kecamatan Trowulan.

Sementara program lanjutan dari pembangunana rumah Majapahit terutama di Desa Bejjong sendiri adalah pembangunan pagar Majapahitan yang saat ini telah selesai dilaksanakan. Pembangunan pagar Majapahit dilakukan pada seluruh rumah-rumah warga di jalan utama dan jalan yang menuju objek wisata. Hal tersebut masih merupakan upaya pembangunan fisik untuk lebih menguatkan dan memunculkan suasana perkampungan pada zaman Kerajaan Majapahit.

Namun upaya pembangunan fisik yang masih terus dilakukan harus di imbangi dengan pembinaan ataupun pengelolaan yang baik pula supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Terlebih lagi pembangunan yang dilakukan dengan bertahap, sehingga pembangunan tahap pertama yang telah selesai pasti memerlukan pembinaan atau perhatian supaya dapat menjadi contoh dan evaluasi untuk pebangunan tahap berikutnya. Gumelar (2010) menyatakan pengelolaan desa wisata harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek sumber daya manusia, keuangan, material, pengelolaan, dan aspek pasar

dalam satu wadah organisasi masyarakat. Organisasi tersebut dapat berupa badan pengelola desa wisata yang unsur-unsur pengelolanya direkrut dari masyarakat setempat dan mendahulukan peranan para pemuda berlatar belakang pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan. Artinya pengelolaan desa wisata harus melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Belum adanya badan pengelola dari pengembangan desa wisata perkampungan Majapahit merupakan pekerjaan bagi pihak Pemerintah Desa maupun Kabupaten untuk segera membentuk badan pengelolaan desa wisata perkampungan Majapahit. Pembentukan badan pengelola desa wisata dapat menjadi suatu upaya sekaligus strategi dalam mengatasi permasalahan ketidaksesuaian yang terjadi dan mengarahkan kepada warga untuk pemanfaatan secara tepat dan sesuai dengan perencanaan. Adanya badan pengelola juga dapat melakukan pengemasan paket wisata yang lebih baik dan menarik, karena untuk saat ini masih sedikit paket wisata yang ditawarkan sementara potensi masih banyak yang belum dikemas menjadi paket wisata. Selain itu pembentukan badan pengelola desa wisata juga dapat membimbing masyarakat supaya lebih siap dalam menerima pariwisata baik dari segi pelayanan sampai dengan inovasi baru yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pengemasan paket wisata dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi atau bekerjasama dengan biro perjalanan wisata baik yang ada di wilayah Mojokerto maupun biro-biro perjalanan di luar kota.

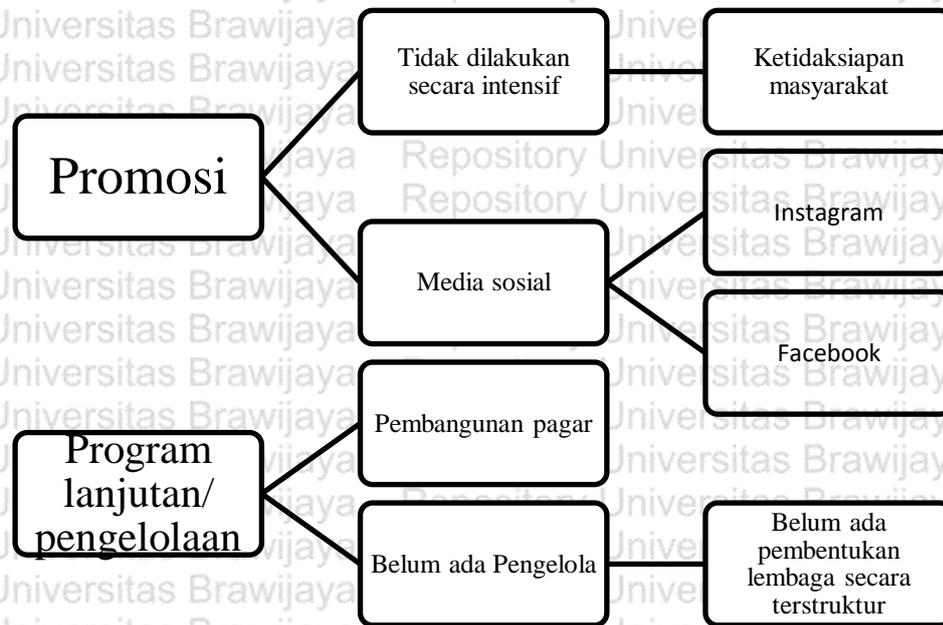
Selama ini masih belum ada upaya kerjasama antara biro perjalanan wisata dengan masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pariwisata. Kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata juga dapat dijadikan sebagai upaya kelanjutan dari program pembangunan rumah Majapahit, jadi biro perjalanan wisata dapat memasukkan rumah-rumah Majapahit ke dalam paketnya baik sebagai tempat menginap dan lain sebagainya. Salah satu program lanjutan yang juga dapat dilakukan adalah menyediakan transportasi tradisional yang dikemas menjadi satu paket dengan paket-paket wisata yang sudah ada. Adanya transportasi tradisional nantinya dapat memberikan gambaran suasana perkampungan Majapahit lebih kuat lagi.

Selanjutnya adalah memperkenalkan daya tarik wisata yang dimiliki kepada calon wisatawan atau masyarakat secara luas yang biasa disebut dengan promosi. Lopyadi dan Hamdani (2006) juga menyebutkan promosi dalam pariwisata merupakan kegiatan komunikasi guna memperkenalkan suatu atraksi wisata kepada konsumen (calon pengunjung) serta mempengaruhi konsumen untuk mengunjungi atraksi tersebut. Kegiatan promosi dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi sering disebut dengan bauran promosi yang mencakup beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut seperti periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung. Tidak semua aktivitas promosi harus dilakukan dalam mempromosikan suatu atraksi wisata atau destinasi

wisata, upaya promosi dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti yang telah disebutkan.

Belum ada upaya promosi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah melalui dinas maupun aparatur Desa Bejjong sendiri. Namun upaya promosi yang ada telah mengalir dengan sendirinya melalui media sosial dari masyarakat sekitar dan juga dari wisatawan yang telah berkunjung secara langsung. Seperti *event* upacara adat untuk memperingati hari ulang tahun Kerajaan Majapahit yang dikemas menjadi paket wisata dan *posting* ke media sosial, sehingga dapat menarik minat calon wisatawan untuk berkunjung serta mengikuti *event* tersebut. Selain itu hal yang menyebabkan promosi tidak dilakukan secara maksimal adalah kurangnya kesiapan masyarakat desa untuk mengelola potensi wisata yang dimiliki.

Cara mengatasi permasalahan kurangnya kesiapan masyarakat yang menjadi hambatan dalam upaya promosi adalah dengan mengadakan pelatihan maupun pembinaan untuk membangun desa wisata yang baik secara periodik baik dari pihak Pemerintah ataupun pihak desa itu sendiri. Selain itu dapat juga dengan cara memberikan contoh atau pembelajaran langsung kepada masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa wisata yang telah maju dan sukses. Sehingga masyarakat akan dengan sendirinya menyadari bahwa potensi wisata yang dikembangkan dengan baik akan memberikan dampak yang bermanfaat pula, serta masyarakat juga akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki daerahnya.



Gambar 14. Bagan Keberlanjutan dan Pengelolaan Rumah Majapahit

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017

Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa upaya mempromosikan desa wisata “Perkampungan Majapahit” tidak dilakukan secara maksimal atau disupayakan mengalir apa adanya. Hal tersebut dikarenakan kemampuan masyarakat yang juga belum siap untuk menghadapi serta mengelola potensi wisata yang dimiliki ataupun dalam hal memberikan pelayanan secara maksimal. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Bapak Supriyadi bahwa sebelum melakukan promosi secara maksimal sebaiknya melihat terlebih dahulu kesiapan masyarakat baru dilakukan publikasi atau promosi. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga tidak memberikan rasa kekecewaan dari wisatawan yang datang berkunjung.

Menurut Lopyadi dan Hamdani (2006) mengatakan bahwa promosi pariwisata dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas yang sering disebut dengan bauran promosi. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain iklan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung. Pada era modern saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga upaya promosi dapat dilakukan dengan mudah dan bahkan setiap individu dapat menjadi agen atau pelaku promosi dengan memanfaatkan teknologi. Begitu pula yang terjadi di Desa Bejjong yang sedang dikembangkan sebagai salah satu desa wisata Perkampungan Majapahit di Kecamatan Trowulan, banyak wisatawan ataupun masyarakat setempat yang secara tidak langsung melakukan promosi dengan cara mengunggah foto-foto atau video di akun media sosial masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Edi menyebutkan belum ada strategi promosi secara terstruktur, namun banyak dari masyarakat atau siapapun yang ikut mempromosikannya melalui media sosial sendiri.

Secara teori aktivitas promosi melalui akun media sosial tersebut dapat dimasukkan kedalam informasi dari mulut ke mulut walaupun pada prakteknya memang tidak berbicara secara langsung. Tetapi secara tidak langsung individu tersebut telah memberitahukan kepada orang lain tentang pengalamannya setelah berkunjung dari suatu tempat dalam kasus ini adalah Desa Bejjong. Sehingga siapapun yang mengunggah pengalamannya selama berkunjung di Desa Bejjong kedalam akun media

sosialnya dapat dikatakan sebagai agen promosi. Dikatakan pula aktivitas promosi dari mulut ke mulut memiliki pengaruh yang besar terhadap promosi jasa bila dibandingkan dengan aktivitas promosi yang lainnya. Hal ini dikarenakan aktivitas promosi dari mulut ke mulut dapat diterima langsung oleh calon wisatawan melalui alat komunikasi masing-masing serta dapat menemukan lokasi obyek wisata dengan mudah.

Selain itu media lain seperti surat kabar, majalah, dan televisi juga memiliki peranan dalam mempromosikan bahkan juga dapat memberikan kritik serta evaluasi dari program rekonstruksi rumah Majapahit yang dilakukan salah satunya di Desa Bejjong. Seperti yang dilakukan oleh beberapa surat kabar baik online maupun cetak antara lain Bangsa online, Tempo, Kompas, Brilio, Detik, Jawapos dengan *headline* masing-masing. Salah satunya Brilio.net yang memuat kabar dengan *headline* “Melihat Kampung Majapahit di Trowulan, Jelajahi Permukiman Abad ke-14” yang berisikan artikel mengenai rumah-rumah Majapahit yang ada di Desa Bejjong disertai dengan foto-foto rumah Majapahit. Namun ada pula media yang memberikan kritik mengenai pemanfaatan yang tidak sesuai yaitu Tempo dengan *headline* “Ratusan Rumah Bergaya Arsitektur Majapahit Disalahgunakan”. Adanya kritik dari beberapa media surat kabar tersebut dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi program rekonstruksi rumah Majapahit serta strategi pengembangan yang dapat dilakukan kedepannya.

Berita-berita yang dimuat seperti pada beberapa media surat kabar tentang penyalahgunaan pemanfaatan rumah Majapahit tersebut mencerminkan kurangnya kesiapan atau kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hasil pengamatan peneliti juga membuktikan bahwa masih banyak masyarakat Desa Bejjong yang kurang menghiraukan potensi pariwisata atau tidak peduli terhadap pengembangan sektor pariwisata pada desa tersebut.

Terbukti dari hasil pengamatan peneliti jumlah sekitar 22 warga Desa Bejjong melakukan pemanfaatan rumah Majapahit yang tidak sesuai dengan tujuan program rekonstruksi rumah Majapahit, sedangkan sekitar 20 warga melakukan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan dan sisanya sekitar kurang lebih 100 warga tidak melakukan pemanfaatan. Sehingga wajar bila promosi tidak dilakukan secara gencar karena masih banyak masyarakat yang belum siap untuk menerima atau masuk ke dalam industri pariwisata. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan masyarakat untuk mampu menghadapi atau masuk ke dalam industri pariwisata, setelah itu dapat dilakukan promosi desa wisata “Perkampungan Majapahit” dengan gencar dan maksimal.

Selanjutnya adalah pengelolaan rumah Majapahit atau desa wisata “Perkampungan Majapahit” yang masih mempunyai program lanjutan dari rekonstruksi rumah Majapahit yaitu berupa pembangunan pagar bernuansa ala zaman Kerajaan Majapahit. Pembangunan pagar tersebut dilaksanakan pada bulan September tahun 2016 dan dibangun pada sepanjang jalan



utama di Desa Bejjong yang menuju objek-objek wisata seperti mahavihara, candi brahu, dan makam siti inggil. Saat ini sudah dapat dilihat hasil dari pembangunan pagar Majapahitan yang membuat semakin kuatnya kesan dan suasana perkampungan pada zaman Kerajaan Majapahit di Desa Bejjong.

Namun adanya program rekonstruksi rumah Majapahit dan pembangunan pagar Majapahitan tidak diiringi dengan upaya pengelolaan yang baik untuk mewujudkan Kecamatan Trowulan sebagai desa wisata perkampungan Majapahit. Menurut Hadiwijoyo (2012) pengelolaan pariwisata adalah suatu angan-angan yang akan diwujudkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang melalui pariwisata. Adapun tahap-tahap pengelolaan dan pengembangan pariwisata (*heritage tourism*) seperti yang disebutkan oleh *National Trust of Historic Preservation* yaitu *asses the potential, plan and organize, prepare protect and manage, market for success. Asses the potensial* merupakan langkah untuk menganalisa keadaan lokasi baik dari segi potensi maupun daya dukung serta pelayanan, selain itu juga termasuk keberadaan fasilitas pendukung seperti *event*, penginapan, infrastruktur, dan organisasi pendukung pengembangan pariwisata. Tahap ini telah dilakukan seperti yang telah diketahui potensi berupa candi peninggalan Kerajaan Majapahit merupakan potensi utama dari Desa Bejjong dan didukung dengan adanya *event-event* budaya yang ada.

Namun lain halnya dengan penginapan yang ada di Desa Bejjong masih tersedia sedikit, sampai saat ini hanya terdapat kurang lebih 10 *homestay* di Desa Bejjong baik rumah yang sudah direkonstruksi menjadi rumah Majapahit maupun tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi bahwa beberapa rumah warga anggota dari sanggar Bhagaskara yang dijadikan *homestay*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Edi yang mengatakan saat ini terdapat 10 warga yang siap menjadikan rumahnya sebagai *homestay*. Padahal terdapat sekitar kurang lebih 130 rumah yang direkonstruksi menjadi rumah Majapahit, namun hanya sekitar tujuh persen rumah yang dijadikan sebagai *homestay*. Sementara lebih dari 50 persen rumah lainnya belum dimanfaatkan untuk sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata dan hanya dijadikan sebagai ruang tamu saja.

Aspek selanjutnya adalah infrastruktur yang ada di Desa Bejjong ataupun Kecamatan Trowulan juga masih sedikit, terbukti dengan masih belum adanya pusat informasi mengenai pariwisata di Kecamatan Trowulan dan juga terminal transit untuk wisatawan. Pusat informasi wisata merupakan infrastruktur yang penting dan harus ada pada suatu destinasi wisata terutama seperti di Kecamatan Trowulan yang memiliki banyak objek wisata dan tersebar di beberapa desa. Sehingga wisatawan dapat mengetahui secara detail mengenai objek-objek wisata di Kecamatan Trowulan dan juga atraksi-atraksi atau *event* yang akan diselenggarakan agar dapat menarik minat wisatawan untuk tinggal lebih lama dan

mengikuti jalannya *event* tersebut. Oleh karena itu pengadaan pusat informasi harus segera dilakukan selain untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan tetapi juga untuk memperkuat minat berkunjung dari wisatawan. Pengadaan pusat informasi wisata tersebut juga akan lebih baik lagi apabila diintegrasikan dengan terminal transit, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam menjangkau objek-objek wisata yang ada di Kecamatan Trowulan.

Terminal transit yang dimaksudkan adalah tempat pemberhentian untuk wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sebagai tempat pemberhentian wisatawan yang memakai kendaraan pribadi. Terminal transit tersebut jugsan dapat menjadi titik awal untuk persebaran wisatawan sebagai upaya untuk pengendalian persebaran wisatawan, sehingga tidak terjadi penumpukan wisatawan pada satu objek wisata saja. Selain itu pada terminal transit juga dapat disediakan transportasi untuk mengantarkan wisatawan berkeliling ke objek-objek wisata di Kecamatan Trowulan, transportasi yang disediakan juga akan lebih baik dan menarik bila menggunakan transportasi tradisional seperti andong. Sehingga tidak hanya memunculkan suatu atraksi baru, namun juga dapat memberikan kemudahan untuk wisatawan serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya adalah adanya organisasi pendukung dalam pengembangan wisata *heritage*. Terdapat beberapa organisasi yang dapat



mendukung pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan seperti sanggar seni dan budaya Bhagaskara yang didirikan oleh Bapak Supriyadi dan bertempat di Desa Bejjong sendiri. Sehingga dapat menjadi potensi wisata lain atau pelengkap dari objek-objek wisata yang sudah ada di Desa Bejjong seperti candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Selain itu terdapat organisasi lain yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di Kecamatan Trowulan antara lain komunitas pemerhati budaya yang saat ini juga mempunyai kegiatan pembelajaran aksara jawa kuno. Kegiatan pembelajaran aksara jawa kuno tersebut dapat menjadi suatu atraksi baru yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah *plan and organize* yaitu mengupayakan terjalannya kerjasama antara masyarakat lokal dengan sektor bisnis untuk menciptakan program wisata yang baik. Seperti biro perjalanan wisata, pemilik penginapan, rumah makan serta juga Pemerintah merupakan suatu keuntungan apabila dapat bersinergi. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan misalnya mempermudah atau memperjelas prosedur di lapangan dan juga dukungan dari segi dana atau modal yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata *heritage*. Serta juga dapat berupa pelatihan kepada masyarakat baik yang terlibat secara aktif maupun keseluruhan untuk mengelola potensi wisata *heritage* mulai dari pengembangan potensi, pengemasan potensi atau atraksi budaya, pelayanan yang baik, sampai dengan upaya mempromosikannya.

Langkah tersebut belum sepenuhnya dilakukan pada Desa Bejijong, karena masih belum terjalannya kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait baik dari Pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak swasta (investor). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rosyadi dkk (tanpa tahun) menyebutkan bahwa Pemerintah hendaknya mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat, akademisi, serta pihak investor untuk bersama-sama menentukan langkah atau strategi menjaga kelestarian Situs Majapahit Trowulan. Tetapi Pemerintah pada periode tahun 2014 sampai 2016 telah memberikan pendanaan untuk program rekonstruksi rumah-rumah warga menjadi rumah Majapahit atas usulan yang diajukan oleh kelompok pemerhati budaya dan telah disetujui seluruh kepala desa di Kecamatan Trowulan. Hal tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah dalam mengapresiasi usulan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Namun setelah pembangunan rumah Majapahit selesai, belum ada upaya pelatihan terhadap masyarakat penerima program tersebut sehingga terjadi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan tujuan program rekonstruksi rumah Majapahit serta pemanfaatan yang tidak terarah.

Oleh karena itu sangat perlu adanya upaya pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat supaya dapat melakukan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan dan lebih terarah lagi mewujudkan desa wisata Perkampungan Majapahit. Pelatihan atau pembinaan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata terutama

dari Pemerintah pusat maupun Daerah untuk memberikan ilmu serta pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi pusat atraksi wisata Perkampungan Majapahit. Sehingga tidak terkesan hanya melakukan pembangunan secara fisik suatu desa wisata melainkan membangun secara keseluruhan unsur pariwisata mulai dari fisik sampai dengan sumber daya manusianya.

Tahap berikutnya adalah *prepare, protect, and manage* merupakan upaya perencanaan untuk jangka panjang dalam mengembangkan serta perlindungan terhadap kondisi dan kualitas sumber daya wisata *heritage*. Tersedianya atraksi dan pelayanan prima merupakan kunci penting dalam pengembangan wisata, seperti upacara-upacara adat atau perayaan memperingati hari-hari bersejarah pada wisata *heritage* harus dilestarikan sehingga bisa menjadi daya tarik bagi calon wisatawan. Selain itu penyediaan layanan informasi mengenai atraksi dan pelayanan yang ditawarkan merupakan salah satu poin penting dalam pengembangan wisata *heritage* baik berupa buku panduan, peta, *website*, maupun penunjuk arah untuk menuju lokasi objek wisata.

Desa Bejjong merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya situs Trowulan dan juga ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), sehingga dalam hal perlindungan telah dijamin oleh Pemerintah. Sementara pada segi penyediaan informasi masih kurang baik, karena belum ada pusat informasi wisata di Kecamatan Trowulan. Penunjuk arah yang juga masih

dirasa kurang banyak dan hanya terdapat di jalan-jalan utama, namun untuk Desa Bejjong sudah baik dari segi penunjuk jalan yang mengarahkan wisatawan ke objek wisata. Pembuatan *website* juga telah dilakukan, tetapi saat ini sudah tidak aktif lagi karena harus beli *hosting* untuk memperpanjang masa aktif *website* tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Edi menyatakan bahwa dahulu pernah ada pembuatan *website* dua kali pada tahun 2009 dan 2011, karena *hosting* harus beli jadinya tidak diperpanjang. Namun dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini fungsi *website* sedikit banyak telah digantikan dengan media sosial yang dapat memberikan informasi secara langsung dan memudahkan calon wisatawan mencari informasi.

Penggunaan media sosial pengelolaan salah satunya dalam promosi sudah sering dijumpai, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan atau membuat akun media sosial dan juga penggunaan media sosial yang lebih mudah dari pada *website*. Sehingga banyak pelaku-pelaku usaha terutama dibidang jasa yang menggunakan media sosial sebagai alat promosi jasa yang ditawarkan, salah satunya usaha jasa perjalanan wisata karena pada media sosial dapat memberikan informasi secara *update* setiap hari bahkan dalam hitungan menit. Desa Bejjong telah melakukan hal tersebut dengan membuat akun media sosial (instagram) yang diberi nama kampung majapahit dan juga *eksplora* Trowulan untuk memberikan informasi maupun mempromosikan secara *update* tentang Desa Bejjong ataupun *event* yang akan diselenggarakan.

Tahap yang terakhir adalah *market for success* merupakan upaya kerjasama dengan jurnalis dan media informasi yang menjadi perantara dalam pemasaran destinasi wisata. Komunikasi menjadi poin penting pada tahap ini, karena dengan komunikasi yang *repetitive* baik melalui *website* maupun melalui media sosial yang saat ini sering digunakan. Selain itu pembuatan logo dari program wisata *heritage* juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan wisata *heritage*. Desa Bejijong yang tengah melakukan upaya pengembangan wisata yaitu Perkampungan Majapahit, beberapa media (televise) juga telah banyak yang meliput terutama program rekonstruksi rumah Majapahit di Desa Bejijong. Desa Bejijong yang telah dikenal sebagai desa pengerajin baik patung sampai batik dan ditambah juga dengan program rekonstruksi rumah Majapahit, sehingga menjadi lebih menarik lagi bagi beberapa media untuk melakukan eksplorasi atau liputan terhadap program tersebut.

Hal lain yang perlu dilakukan seperti dijelaskan sebelumnya adalah pembuatan logo untuk program yang ada. Logo tersebut dapat mencerminkan suatu yang menjadi ciri khas tersendiri, sehingga mudah untuk diingat oleh masyarakat atau sering disebut dengan *image*. Namun pada program Perkampungan Majapahit belum ada logo yang dapat menjadi *image* dari program tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuknya suatu lembaga atau organisasi yang mengelola secara khusus program Perkampungan Majapahit agar program tersebut dapat terarah dan tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan rumah Majapahit merupakan suatu program rekonstruksi teras rumah-rumah warga pada desa-desa di Kecamatan Trowulan yang menyerupai bentuk rumah pada zaman kerajaan Majapahit. Pembangunan rumah

Majapahit tersebut dilakukan secara bertahap pada seluruh desa di Kecamatan Trowulan. Adapun tujuan awal dari pembangunan tersebut adalah sebagai *homestay* dan *art shop* ataupun untuk mendukung program desa wisata, tetapi mengalami perubahan fungsi pemanfaatan setelah pembangunan, sehingga terjadi ketidaksesuaian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan Rumah Majapahit yang dilakukan beberapa warga Desa Beji Jong berupa penggunaan rumah Majapahit untuk dijadikan toko, warung makan dan kopi, dan lain sebagainya. Terdapat ketidakselarasan antara pihak pengusul dengan pihak Pemerintah (Disporabudpar dan aparaturnya Desa Beji Jong) mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa warga. Pihak pengusul menyatakan bahwa beberapa warga telah melakukan ketidaksesuaian dengan menggunakan rumah majapahit sebagai toko, warung makan dan kopi, dan sebagainya. Namun pihak pemerintah

menyatakan sebaliknya bahwa hal tersebut di atas bukanlah merupakan suatu ketidaksesuaian. Karena rumah Majapahit yang sudah berdiri merupakan hak masing-masing pemilik serta mengacu pada zaman dahulu juga pasti ada warga yang melakukan pemanfaatan serupa.

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan warga melakukan pemanfaatan seperti membuka toko, warung makan dan kopi, dan sebagainya, faktor-faktor tersebut di bedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan warga melakukan pemanfaatan seperti disebutkan di awal adalah profesi warga penerima rumah Majapahit. Beberapa warga melanjutkan profesi yang telah dilakukan sebelum adanya pembangunan rumah Majapahit, sehingga warga memanfaatkan rumah Majapahit untuk meneruskan profesinya. Contohnya, warga yang dahulunya sudah membuka toko sembako sekarang masih memilik untuk membuka tokonya kembali. Selain itu ada warga yang memilih untuk beralih profesi setelah adanya rumah Majapahit, contohnya warga yang dulunya bekerja sebagai pengrajin batu bata merah sekarang beralih dengan membuka warung makan di rumah Majapahit miliknya sebagai profesi baru.
- Faktor eksternal yang menyebabkan warga memanfaatkan rumah Majapahit menjadi toko, warung makan dan kopi, dan sebagainya yang pertama adalah kesalahpahaman pada sosialisasi awal pembangunan rumah Majapahit. Sosialisasi yang diberikan kepada warga pada awal

pembangunan tidak ada anjuran dari pihak Pemerintah mengenai pemanfaatan rumah Majapahit secara detail. Kedua adalah tidak adanya pembinaan atau pendampingan kepada warga yang mendapatkan rumah Majapahit setelah pembangunan semua unit rumah selesai dilaksanakan. Belum dilakukannya pembinaan atau pendampingan kepada warga setelah selesainya pembangunan menyebabkan tidak terarahnya pemanfaatan rumah Majapahit.

3. Belum ada strategi yang diterapkan untuk mengendalikan ketidaksesuaian yang terjadi. Karena anggapan dari Pemerintah yang menyatakan bahwa tidak ada ketidaksesuaian yang dilakukan oleh warga. Namun dari pihak pengusul sendiri telah melakukan upaya pengendalian ketidaksesuaian pemanfaatan yaitu dengan menitipkan hasil karya dari Sanggar Bhagaskara berupa batik majapahitan kepada beberapa warga penerima rumah Majapahit untuk dijual.

4. Belum ada pengelolaan secara khusus yang menangani rumah Majapahit ataupun desa wisata perkampungan Majapahit, seperti pembentukan badan pengelola desa wisata. Sementara ini hanya ada program lanjutan setelah pembangunan rumah Majapahit berupa pembangunan pagar Majapahitan yang dilaksanakan pada bulan September 2016.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk pengembangan pariwisata serta mengendalikan ketidaksesuaian pemanfaatan rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejjong antara lain :

1. Pembinaan secara periodik kepada warga Desa Bejjong dalam bidang pariwisata. Baik pembinaan mengenai pemanfaatan rumah Majapahit secara tepat maupun pembinaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki.
2. Pembentukan badan pengelola desa wisata untuk mewujudkan Trowulan sebagai destinasi wisata Perkampungan Majapahit. Badan pengelola sangat dibutuhkan terutama agar dapat mengendalikan arah pemanfaatan pembangunan rumah Majapahit guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adanya badan pengelola nantinya dapat melakukan evaluasi dari program pembangunan rumah Majapahit, sehingga dapat menentukan langkah ataupun program-program pengembangan lanjutan dalam mewujudkan destinasi wisata Perkampungan Majapahit.
3. Pengemasan potensi pariwisata yang dimiliki menjadi paket wisata untuk menarik minat berkunjung wisatawan. Seperti paket belajar dan mencoba secara langsung membuat kerajinan cor kuningan, patung dari tanah liat, serta membatik. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pagelaran kesenian yang terjadwal secara rutin di luar

dari acara adat atau upacara adat. Pagelaran tersebut dapat berupa pementasan kolosal yang menceritakan kisah-kisah pada masa kerajaan Majapahit dahulu. Pengemasan paket wisata lain yang dapat dilakukan adalah penyediaan paket wisata berkeliling situs Trowulan dengan menggunakan transportasi tradisional seperti andong supaya lebih terasa suasana ala Perkampungan Majapahit.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penyedia jasa pariwisata seperti biro perjalanan wisata serta pihak swasta supaya dapat lebih meningkatkan kualitas dari destinasi wisata Perkampungan Majapahit nantinya. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta ataupun dengan biro perjalanan wisata dapat memberikan manfaat yang baik. Karena biro perjalanan wisata dapat menjadi perantara untuk menjual paket wisata yang dimiliki kepada lebih banyak wisatawan.

5. Membuat serta menetapkan perencanaan pengembangan pariwisata jangka panjang mengenai “Perkampungan Majapahit” yang menyangkup pengelolaan dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat sekaligus melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dari perencanaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah dicapai, tidak boleh diganti walaupun terjadi pergantian jabatan dalam struktur pemerintahan. Sehingga terjadinya pergantian pemerintahan tidak mempengaruhi perencanaan baik dari kerangka perencanaan maupun dari pencapaian dan ketepatan waktu yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. 2015, 18 Oktober. *Menteri Pariwisata Optimis Raih Target 20 Juta Wisman Pada 2019*. Republika, (Online), (<http://www.republika.co.id> diakses pada 04 April 2016).

Anonim. 2012. 18 September. *Kami Menggendeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Tujuan Wisata Heritage*. Berita Satu. (Online). (<http://www.beritasatu.com/destinasi/72295-indonesia-digagas-jadi-tujuan-wisata-heritage.html> diakses pada 27 April 2016).

Anonim. 2015. 19 Oktober. *Dibangun Untuk Pesona Wisata, Rumah Khas Majapahit Malah Jadi Warung*. Bangsaonline.com. (Online). (<http://www.bangsaonline.com/berita/15051/dibangun-untuk-pesona-wisata-rumah-khas-majapahit-malah-jadi-warung> diakses pada 12 Juni 2016).

Anwar, Khoiril. 2009. *Potensi Wisata Budaya Situs Sejarah Peninggalan Kerajaan Majapahit Di Trowulan Mojokerto*. Surakarta: Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ariffudin, Muh Islam. 2013. Peran *Brand Borobudur Dalam Pariwisata Dan World Heritage*. *Jurnal Dewa Ruci*. Vol.8, No.3.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto. 2015. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 2015*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

_____. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Mojokerto 2015*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

_____. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Trowulan 2015*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.

Cahyadi, Rusli dan Jajang Gunawijaya. 2009. *Pariwisata Pusaka: Masa Depan Bagi Kita, Alam dan Warisan Budaya Bersama*. Jakarta: UNESCO.

Creswell, Jhon W. 2008. *Educational Research "Planing, Conducting, and Evaluating Qualitative & Quantitative Approaches"*. London: Sage Publications.

Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode penelitian kualitatif: teori & praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hakim, Rustam. 2012. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap: Prinsip - Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hikmatas, Luluk. 2015, April. *Ada Apa Dengan Rumah Majapahit*. MajaTama, hlm.23.

Ibrahim, Syahrul. 1998. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Kabupaten DATI II. *Jurnal PWK-26*. Vol.9, No.2. (Online). (www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/VOL-9-NO2-4.pdf diakses pada 21 September 2016).

Lew, A.A., C.M. Hall dan D.J. Timothy. 2008. *World Geography Of Travel and Tourism: A Regional Approach*. United Kingdom: Elsevier.

Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 2. Jakarta Selatan. Salemba Empat.

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Mojokerto No.27 Th.2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Untuk Pembangunan Rumah Majapahit*.

Rosyadi, Khalid, Mochamad Rozikin, dan Trisnawati. Tanpa Tahun. Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.2, No.5.

Santosa, Setyanto P. 2002. 14 Pebruari. *Pengembangan Pariwisata Indonesia*. Kolom Pasifik, (Online) (http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p_santosa/artikel_setyanto_p_santosa/pengembangan_pariwisata_indonesia.html diakses pada 27 April 2016).

Sastrayuda, G., S. 2010. *Hand Out Mata Kuliah Concept Resot And Leidure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leidure*, (Online) (file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf diakses pada 11 Februari 2017).

Sugihartoyo dan Wahyu Agung Widagdo. 2010. Strategi Pengembangan Wisata Kota Tua Sebagai Salah Satu Pelestarian *Urban Heritage*. *Jurnal PLANESATM*. Vol.1, No.1.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Williams, Stephem. 1998. *Tourism Geography: Routledge Contemporary Human Geography Series*. London: Routledge Taylor & Francis Group.

_____. 2009. *Tourism Geography: A New Synthesis*. Milton Park: Routledge Taylor & Francis Group.

Yunani, Jennifer. 2014. Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis komputer dalam mempromosikan pariwisata di jawa barat. *Jurnal LPKIA*. Vol.4. No. 2.



LAMPIRAN

Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Narasumber Pengusul dan Perwakilan Disporabudpar

1. Siapa awal pencetus ide dari pembangunan rumah majapahit di trowulan?
2. Kapan awal tepatnya pembangunan rumah majapahit tersebut dilaksanakan?
3. Apa tujuan utama dibangunnya rumah majapahit tersebut di trowulan?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang rumah majapahit yang sekarang di pergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai warung makan, kios dagang, dan lain sebagainya?
5. Apa saja yang mungkin menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut?
6. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi atau mengendalikan penyimpangan pemanfaatan tersebut?
7. Menurut saudara, apakah pembangunan rumah majapahit ini dapat memunculkan peluang bisnis khususnya dalam sektor pariwisata di trowulan? (seperti apa contohnya)
8. Bagaimana pengelolaan rumah majapahit yang ada sekarang dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan rumah majapahit ini?
9. Apakah masih ada program lanjutan dari pembangunan rumah majapahit ini?

Untuk Narasumber Warga Pemilik Rumah Majapahit

10. Bagaimana pendapat saudara mengenai pembangunan rumah majapahit ini?
11. Apakah ada perbedaan yang saudara rasakan sebelum adanya pembangunan rumah majapahit dengan sekarang setelah selesai dibangunnya rumah majapahit ini?
12. Kenapa saudara memilih menggunakan rumah majapahit ini menjadi warung, toko, dan lain sebagainya?
13. Apakah tidak ada sosialisasi atau arahan tentang pemanfaatan rumah majapahit yang seharusnya dilakukan setelah selesai dibangun?
14. Apa harapan saudara kedepanya dengan adanya pembangunan rumah majapahit ini?

Lampiran 2. Tabulasi Olahan Hasil Wawancara

Permasalahan	Fokus	Item	Key Informan	Keterangan
Penyimpangan pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit yang terjadi di Desa Bejjong	1. Pemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah 2. Bentuk pemanfaatan Rumah Majapahit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bejjong	1. Apa tujuan utama dibangunnya Rumah Majapahit tersebut di Kecamatan Trowulan?	1. Bapak Redi 2. Bapak Edi 3. Bapak Supriyadi	1. Untuk mengenalkan situs-situs di Trowulan terus untuk kedepannya buat <i>homestay</i> dan lain sebagainya. 2. Secara luas nantikan membantu program desa wisata. Untuk sementara pemanfaatannya kedepan kita usahakan sebagai <i>homestay</i> untuk wisatawan yang datang kesini biar mengetahui kegiatan masyarakat Bejjong. 3. Rumah Majapahit harapannya nanti kan bisa untuk jual <i>art shop</i> juga <i>homestay</i> . Jadi kalau <i>art shop</i> kan menarik, satu deret seperti di Jawa Tengah itu kana da kasongan atau apa itu. Nantinya kan bisa arahnya kesitu. Intinya harapan kita ya tetap pariwisata jadi ujung tombak di Trowulan dan membangkitkan kebesaran kerajaan Majapahit yang dikemas dalam pariwisata.
		2. Menurut saudara, apakah pembangunan Rumah Majapahit ini dapat memunculkan peluang bisnis khususnya dalam sektor pariwisata di Trowulan?	1. Bapak Supriyadi 2. Bapak Redi	1. Sangat sangat memungkinkan. Jadi ini aja kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun kemarin ya jauh dari kunjungan wisatanya. Banyak menarik dari setelah adanya booming rumah majapahit ini kan bikin orang penasaran seperti apa rumah majapahit. Kedepannya tinggal ngemas. 2. Banyak, masyarakat sekarang ini kasarannya yang dulunya tidak punya ruang tamu jadi dimanfaatkan untuk ruang tamu ya kan. Bentuknya jadi seragam terus apa namanya e.. otomatis dengan keindahan itu orang-orang sekitar situ dengan sendirinya menjaga kebersihan lingkungannya itu. Itu dampak yang terlihat sekarang, kalau untuk wisatawan mungkin ya.. sedikit meningkatlah dari pada yang sebelumnya.



		<p>3. Bagaimana pendapat saudara tentang Rumah Majapahit yang sekarang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai warung makan, kios dagang, dan lain sebagainya?</p>	<p>1. Bapak Edi 2. Bapak Redi 3. Bapak Supriyadi</p>	<p>1. Iya tidak apa-apa, karena itu kan diserahkan sebagai kepemilikan, dirawat, dan dimanfaatkan untuk apapun silahkan kalau dibuat toko ya monggo tidak masalah. 2. Iya memang terserah yang punya. Mau dibikin warung, toko, ataupun <i>homestay</i> karena itu memang hak milik mereka. Kita kan Cuma membangunkan rumah biar seragam untuk pemanfaatannya ya masing-masing. 3. Ya ini kan semacam apa <i>euphoria</i> dari masyarakat sendiri, ini juga belum adanya pendampingan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini memberikan pendampingan sehingga masyarakat lebih terarah. Selama ini dibiarkan, jadi mereka jualan apa kopi segala macam ada yang patung juga. Selama ini kosong tidak ada kegiatan sama sekali, seharusnya setiap masyarakat yang mendapat program rumah ini tiap bulan sekali atau periodik ada pendampingan.</p>
<p>Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit di Desa Bejjong</p>	<p>1. Internal 2. Eksternal</p>	<p>1. Apa saja yang mungkin menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan tersebut?</p>	<p>1. Bapak Supriyadi</p>	<p>1. Belum adanya pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nah ini yang belum saya temui disitu. Sehingga terjadi di masyarakat ya ada yang dijadikan itu tadi, warung kopi, segala macam.</p>
		<p>2. Kenapa saudara memilih menggunakan Rumah Majapahit ini menjadi warung, toko, dan lain sebagainya?</p>	<p>1. Bapak Agus 2. Ibu Nur 3. Ibu Santi</p>	<p>1. Karena penghasilan saya dari toko soalnya dari dulu sudah membuka toko kalau saya ikut dibangun Rumah Majapahit ini dan terus tidak dipakai buat usaha ya ditempatin hantu nanti. 2. Ya tidak memilih mas, karena dulunya toko juga terus ada program Rumah Majapahit ini saya jadi kepingin lalu tokonya saya rubah ganti Rumah Majapahit ini. 3. Yak arena awalnya dulu juga saya buka toko seperti ini</p>



		<p>4. Bapak Tajudin</p> <p>5. Ibu Eni</p> <p>6. Ibu Masrukah</p>	<p>mas.</p> <p>4. Karena dulu memang sebelum ada Rumah Majapahit ini aslinya toko, sesudah pembangunan Rumah ini tokonya ketutupan jadinya gini dibuat tempat apa adanya seperti toko. Warga yang lain juga seperti itu tidak disini aja.</p> <p>5. Ya dulu kan usaha cor kuningan disini, terus sekarang sudah tidak bikin lagi jadi ya saya buat untuk lainnya ini.</p> <p>6. Dulunya mencetak batu bata, sakit-sakitan tidak kuat ke sawah jadinya kepikiran buka warung aja buat uang saku anak.</p>	
		<p>3. Apakah tidak ada sosialisasi atau arahan tentang pemanfaatan Rumah Majapahit yang seharusnya dilakukan setelah selesai dibangun?</p>	<p>1. Bapak Tajudin</p> <p>2. Ibu Nur</p>	<p>1. Kalau pesan sih tidaka ada, tapi harus dijaga gitu. Kan ada suratnya yang mengatakan harus di jaga ya supaya tidak dibuat sembarangan begitu terus seberguna mungkinlah untuk pemilik rumah.</p> <p>2. Kalau menyuruh sih tidak. Saya sendiri yang mau membuka toko, tapi tidak dibuat membuka toko semuanya ada yang dibuat ruang tamu, ada yang di biarkan kosong.</p>
<p>Strategi dalam upaya mengendalikan penyimpangan pemanfaatan pembangunan Rumah Majapahit</p>	<p>1. Sosialisasi</p> <p>2. Pelatihan</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban</p>	<p>1. Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi atau mengendalikan penyimpangan pemanfaatan tersebut?</p>	<p>1. Bapak Supriyadi</p> <p>2. Bapak Redi</p>	<p>1. Masyarakat selalu tidak bisa dipaksa, disana kan kita titipi batik-batik yang sampean lihat tadi itu adalah usaha-usaha sanggar kita dan di depan rumah mereka itu saya kasih tulisan galeri batik sebenarnya untuk nutupi itu yang buat warung-warung kopi biar tidak fatal.</p> <p>2. Untuk membangkitkan Majapahit itu sendiri juga apa ya, tidak mudah untuk membangkitkan budayanya tidak hanya rumah Majapahit saja sebenarnya kalau memang mau Majapahit seperti dulu. Nah ini harus kita gali perlahan-lahan awalnya mungkin rumah Majapahit</p>



		<p>3. Bapak Edi</p>	<p>dulu dan kedepannya disitu ada pembinaan-pembinaan kesenian mungkin seperti itu kedepannya. Harapannya seperti itu.</p> <p>3. Ya biarkan alamilah apa yang diinginkan masyarakat ya monggo, kita juga akan bantu masyarakat bahwa pariwisata itu butuh ini dan ini sehingga masyarakat perlu mempersiapkan diri sesuai dengan keinginan mereka sendiri.</p>
	<p>2. Apakah ada sosialisasi dari panitia atau Pemerintah mengenai pemanfaatan rumah Majapahit?</p>	<p>1. Ibu Aminarsih 2. Ibu Eni Yuliati 3. Bapak Agus 4. Ibu Santi</p>	<p>1. Tidak, tidak ada. Katanya tidak apa-apa dibuat dagang.</p> <p>2. Dari pemerintah dipakai untuk dagang, usaha. Terus disini mayoritas usahanya itu batik sama cor kuningan (reco).</p> <p>3. Intinya awal dulu itu tidak boleh dipakai untuk membuka toko, saya kan sebelum dibangun rumah Majapahit ini sebenarnya sudah memiliki toko, jadi saya awalnya tidak mau. Lalu bapak lurah bilang “iya tidak apa-apa soalnya sampean sudah lebih dulu memiliki toko dulunya” karena orang-orang yang lain boleh kenapa saya tidak! Kan ada yang dipakai buat jualan reco (patung-patung) dan lain-lain.</p> <p>4. Katanya yang penting buat usaha tapi yang mau. Tergantung modal masing-masing.</p>
	<p>3. Apakah sudah ada upaya pelatihan atau pembinaan kepada warga?</p>	<p>1. Bapak Redi 2. Bapak Supriyadi</p>	<p>1. Nah ini harus kita gali perlahan-lahan awalnya mungkin rumah Majapahit dulu dan kedepannya disitu ada pembinaan-pembinaan kesenian mungkin seperti itu kedepannya. Harapannya seperti itu.</p> <p>2. Nah seharusnya karena ini wilayah kabupaten, ya pendampingannya itu mutlak dari kabupaten. Nah ini yang belum saya temui disitu. Sehingga terjadi di</p>



				<p>masyarakat ya ada yang dijadikan itu tadi, warung kopi, segala macam. Ya mungkin itu nanti kedepan harus itu Pemerintah Daerah, untuk teman-teman akademisi mendorong. Itu ya tugasnya kan disitu. Mendorong Pemerintah Daerah. Selama ini kosong, nggak ada kegiatan sama sekali. Seharuse kan setiap masyarakat yang mendapat program rumah ini tiap bulan sekali periodik itu ya ada pendampingan dari Dinas Pariwisata. Nah itu nggak ada disini. Harus ini nanti.</p> <p>3. Ibu Aminarsih</p> <p>3. Kalau ada pelatihan gitu ya mau sebenarnya mas, tapi sampai sekarang ya tidak ada apa-apa itu.</p>
<p>Keberlanjutan pengelolaan Rumah Majapahit dalam upaya mempromosikan Desa Bejjong sebagai Kampung Majapahit</p>	<p>1. Promosi yang dilakukan</p> <p>2. Analisis program-program lanjutan dari pembangunan Rumah Majapahit di Desa Bejjong</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan Rumah Majapahit yang ada sekarang dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Rumah Majapahit ini?</p> <p>2. Apakah Masih ada program lanjutan dari pembangunan Rumah Majapahit ini?</p>	<p>1. Bapak Supriyadi</p> <p>1. Bapak Edi</p> <p>2. Bapak Supriyadi</p>	<p>1. Untuk pengelolaan ini kan masing-masing penerima, desa hanya memfasilitasi. Pemerintah Daerah juga tidak pengelola, ini kan hibah jadi milik masyarakat.</p> <p>1. Tahun ini ada namanya “pagar Majapahit” dan akan dibangun dari ujung selatan sampai utara desa.</p> <p>2. Pagar, iya itu yang terutama yang dapat Rumah Majapahit itu dapat pagar, bertahap memang apalagi nanti kalau sudah ada pagar terus aksesoris lain kan lebih menarik. Terus tahun ini juga dari provinsi juga turun untuk tiga desa, lanjutan kemarin itu kan yang tahap awal Bejjong, Sentono, sama Jati Pasar. Kalau yang tahun ini ada yang Watesumpak, Desa Trowulan, sama Temon, masing-masing kurang lebih dapat sekitar 100an lagi lah rumah, jadi 300 rumah. Usulan ini juga sudah saya kirim sampai tahun 2020 kalau ndak salah</p>



		<p>3. Bagaimana upaya promosi yang sudah dilakukan saat ini?</p>	<p>1. Bapak Redi 2. Bapak Supriyadi 3. Bapak Edi</p>	<p>kemarin itu. Usulan berikutnya saya berharap satu kecamatan itu dapat.</p> <p>1. Upaya promosi kan tergantung Badan Promosi kan Dinas Pariwisata juga punya istilahnya BAPRO. Kita belum tau seperti apa sepak terjang mereka, tapi kalau dari kita sendiri tidak keluarkan promosi kita Cuma mengadakan event-event di situs-situs gitu aja.</p> <p>2. Jadi kita ndak berani booming langsung publikasi, bahaya itu nanti, yang malu itu kita sendiri. Ya kan harus lihat dulu, kita publikasi itu lihat kesiapan masyarakat. ya mungkin mudah-mudahan tahun depan lah.</p> <p>3. Strategi secara terorganisir kita mungkin masih jalan 50 persen, terus mungkin secara personal bisa dilihat di media sosial. kalau secara terstruktur belum ada, dulu pernah ada kita dulu pernah buat kan webnya dua kali tahun 2009 dan 2011 karena <i>hosting</i> harus beli jadinya tidak diperpanjang, tapi temen-temen sekarang sudah bisa sendiri melalui media sosial sendiri jadi mereka yang banyak mempromosikannya.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016.



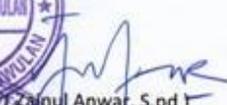
LP3 SDM
 Lembaga Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
SANGGAR BHAGASKARA
 Akta notaris : No 77 tahun 2009 Muchtar,SH.
 Sekretariat : Jl Kebudayaan 3 Bejjong Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia
 Telp : +62 321 49 48 64 , 49 19 00, Fax :+62 321 49 49 00,
 Email :bhagaskarabronze14@gmail.com
 Website :www.bhagaskara.org

Daftar nama Desa dan tanda tangan Kepala Desa / Instansi yang mendukung Program
 Rumah Majapahit Propinsi Jawa timur tahap lanjutan di Kecamatan Trowulan.
 (Tahun anggaran 2016 -2018)

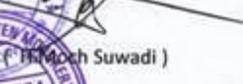
1 . Kepala Desa Bejjong.


 (H. Jtmiko)

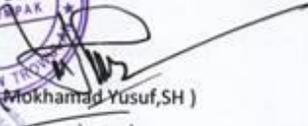
2. Kepala Desa Trowulan.


 (Zainul Anwar, S.pd)

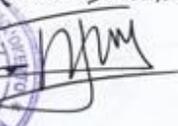
3. Kepala Desa Pakis



 (H. Moch Suwadi)

4. Kepala Desa Watesumpak


 (Mokhammad Yusuf, SH)

5. Kepala Desa Beloh


 (Kartono)



13. Kepala Desa Wonorejo

(Drs. Hermaqu)

14. Kepala Desa Kejagan

(H. Syarif)

Mengetahui,
Camat Trowulan

Curik Widayat, S.Pd MM
Pembina
NIP: 196105291981121001

Menyetujui,

Kepala BPCB W/Kerja Jawa timur
Drs. Aris Satriyani SH.M.Hum
Pembina Tingkat 1
NIP : 196112071986031001

Mojokerto , 10 Juni 2015.

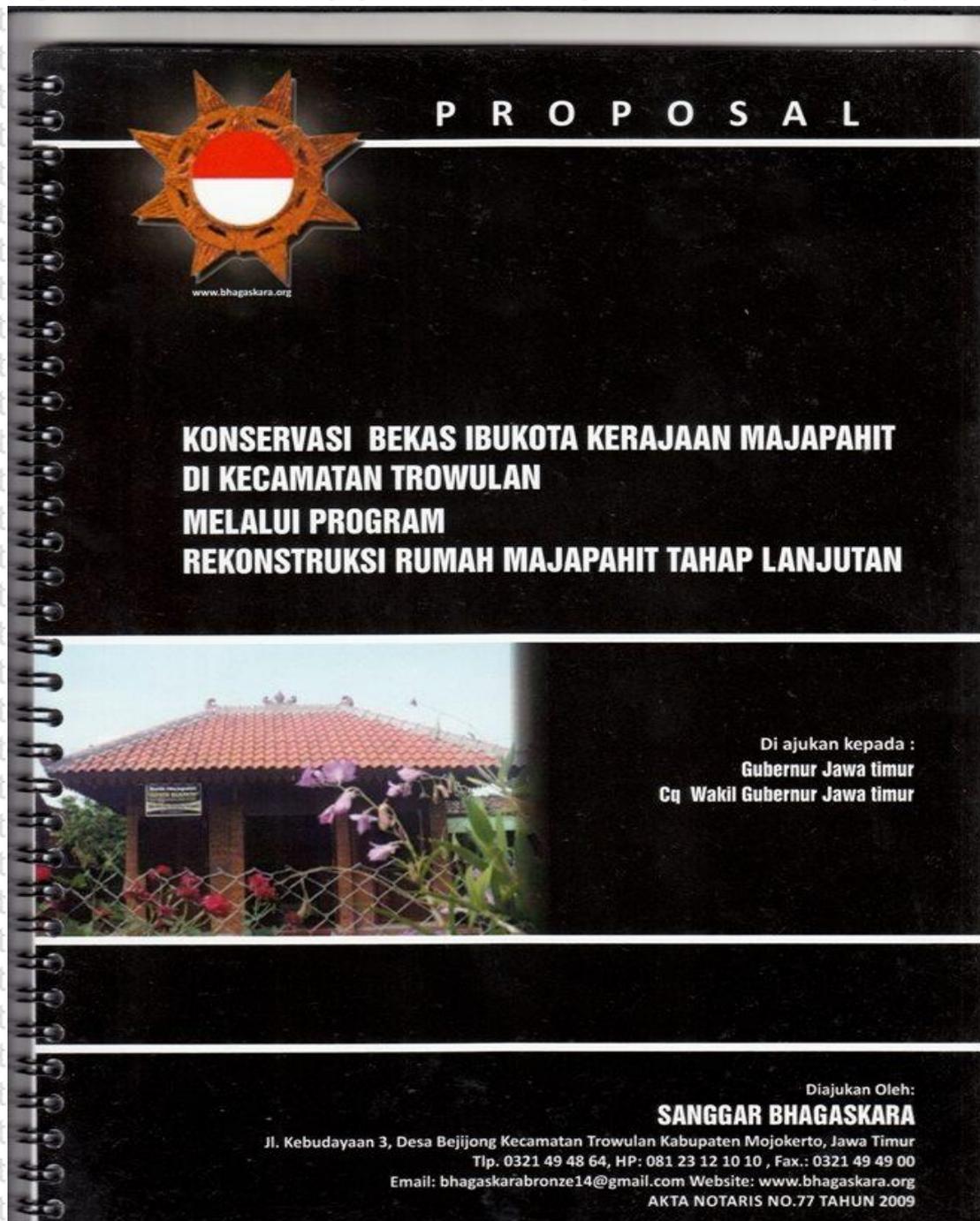
Lembaga Pengusul Program Rumah Majapahit Tahap lanjutan,

LPSSDM
BANGGAR BHAGASKARA
Supriyadi S.Sn

Direktur Sanggar Bhagaskara Trowulan

H. Roch Suwadi
Ketua Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat (AKDP) Kec.Trowulan

Lampiran 5. Proposal “Konservasi Bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan, Melalui Program Rekonstruksi Rumah Majapahit Tahap Lanjutan





LP3 SDM
 Lembaga Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
SANGGAR BHAGASKARA
 Akta notaris : No 77 tahun 2009 Muchtar,SH.
 Sekretariat : Jl Kebudayaan 3 Bejjong Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia
 Telp : +62 321 49 48 64 , 49 19 00, Fax :+62 321 49 49 00,
 Email :bhagaskarabronze14@gmail.com
 Website :www.bhagaskara.org

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama ketua RT / RW beserta Perangkat desa Bejjong , dengan ini kami menyatakan Sangat mendukung /setuju jika Desa kami Bejjong kembali mendapat Program Pembangunan Rumah Majapahit tahap lanjutan

(Tahun anggaran 2016-2018)

1. Ketua RT 01/RW01 Dusun Kedungwulan

(Supandi)

2. Ketua RT 01/RW02 Dusun Kedungwulan

3. Ketua RT 02/RW01 Dusun Kedungwulan

(H. Rifa'at S.Sos.MM)

4. Ketua RT 02/RW02 Dusun Kedungwulan

(Solikin)

5. Ketua RT 03/RW01 Dusun Kedungwulan

(Mahmudi)





6. Ketua RT 03/RW02 Dusun Kedungwulan


RT 03-RW 02
D.S. BEJONG
(Maskur)

7. Ketua RT 04/RW01 Dusun Kedungwulan


RT 03-RW 01
D.S. BEJONG
(Sudarno)

8. Ketua RT 01/RW01 Desa Bejjong


RT 01-RW 01
D.S. BEJONG
(Sutrisno)

9. Ketua RT 01/RW02 Desa Bejjong


RT 01-RW 02
D.S. BEJONG
(Subiantoro)

10. Ketua RT 02/RW01 Desa Bejjong


RT 02-RW 01
D.S. BEJONG
(Sumarno)

11. Ketua RT 02/RW02 Desa Bejjong


RT 02-RW 02
D.S. BEJONG
(Suplyo)

12. Ketua RT 03/RW01 Desa Bejjong


RT 03-RW 01
D.S. BEJONG
(Suwaji)

13. Ketua RT 03/RW02 Desa Bejjong


RT 03-RW 02
D.S. BEJONG
(Santoso)

14. Ketua RT 04/RW02 Desa Bejjong



(Bustaman)

15. Ketua Karang taruna Desa Bejjong



16. Ketua BPD Desa Bejjong



(Teguh Apriyanto SH)

17. Ketua LPM Desa Bejjong



(Samsul Aripin S.Pd)

Mojokerto , 10 Juni 2015

Mengetahui ,

Lembaga Pengusul Rumah Majapahit tahap lanjutan .



(Supriyadi S.Sn)

Kepala Desa Bejjong,



(H.Jatmiko)



LP3 SDM
Lembaga Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
SANGGAR BHAGASKARA
Akta notaris : No 77 tahun 2009 Muchtar,SH.
Sekretariat : Jl Kebudayaan 3 Bejlong Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia
Telp : +62 321 49 48 64 , 49 19 00, Fax :+62 321 49 49 00,
Email :bhagaskarabronze14@gmail.com
Website :www.bhagaskara.org

BAB II

MAKSUT DAN TUJUAN

Adanya Program Rekonstruksi Rumah Majapahit di wilayah Kecamatan Trowulan oleh Pemerintah Propinsi Jawa timur dan Kabupaten Mojokerto sudah pasti berdampak amat positif dari berbagai aspek . Dampak positif yang teramat jelas yaitu dibidang peningkatan kunjungan Pariwisata, khususnya di wilayah Mojokerto dan umumnya Jawa timur .Dengan dijadikannya dan ditetapkannya wilayah Trowulan sebagai kawasan / Zona hunian kampung Majapahit dipastikan daerah ini kedepan akan bisa menjadi Jendela Pariwisata Jawa timur dan secara alamiah tingkat pendapatan / ekonomi masyarakat sekitar diwilayah ini dipastikan akan meningkat.

Adapun maksud dan tujuan Program Rekonstruksi Rumah Majapahit di Kecamatan Trowulan ini adalah sebagai berikut :

1. Semakin terangkatnya kembali nama besar bekas kerajaan besar Pemersatu nusantara yg pernah ada di Jawa timur (Kerajaan Majapahit) dalam level nasional juga Internasional.
2. Adanya Program Rekonstruksi Rumah Majapahit merupakan bentuk apresiasi dan bukti nyata yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan dari Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat nasional.
3. Dengan adanya Program rekonstruksi rumah Majapahit tahap lanjutan yang **merata** di wilayah Kecamatan Trowulan, akan bisa membendung derasnya pengaruh bentuk arsitektur modern rumah penduduk di wilayah ini.
4. Dengan adanya Program rekonstruksi rumah Majapahit yang **merata di wilayah kecamatan Trowulan** akan semakin memperkuat nama Trowulan sebagai bekas ibukota Kerajaan Majapahit dikancah nasional juga Internasional.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara , mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan warisan sejarah budayanya sendiri.
6. Membuka ruang kreatifitas dibidang usaha industri pariwisata seni dan budaya pada masyarakat Trowulan secara umum, berlahan nantinya akan bisa mengalihkan aktifitas kerja/mata pencaharian beberapa kelompok masyarakat yg bisa merusak kawasan cagar budaya (pembuatan batu bata).
7. Terciptanya peluang luas usaha disektor Pariwisata diwilayah ini yang pastinya berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat dan nantinya bermuara pada peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)



LP3 SDM
 Lembaga Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
SANGGAR BHAGASKARA
 Akta notaris : No 77 tahun 2009 Muchtar,SH.
 Sekretariat : Jl Kebudayaan 3 Bejjong Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia
 Telp : +62 321 49 48 64 , 49 19 00, Fax :+62 321 49 49 00,
 Email :bhagaskarabronze14@gmail.com
 Website :www.bhagaskara.org

BAB III

SASARAN PROGRAM

Usulan tahap lanjutan Program pembangunan rumah Majapahit tahun 2015 – 2018 di Kec.Trowulan ini kami khususkan bagi 14 desa di wilayah Kec.Trowulan / Zona inti , diantaranya desa tersebut adalah : Bejjong, Trowulan, Jatipasar ,Sentonorejo,watesumpak, Pakis , Temon, Beloh, panggih , Domas , Bicak, Tawang Sari, wonorejo dan Jagan .

Kami berharap Kepada Gubernur Jawa timur dan Jajaran Pemerintahan dibawahnya , pada tahap pengembangannya nanti, seluruh wilayah desa /kecamatan diwilayah kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang yang tercatat/ditetapkan masuk dalam kawasan Strategis Nasional (KSN dan KCBN) wilayah bekas Ibukota Majapahit (seluas 12 x 12 km2), juga mendapat Program Rumah Majapahit dari Pemerintah Jawa timur.

Adapun batasan wilayah ibukota kerajaan Majapahit /kawasan Cagar Budaya peringkat nasional (KCBN) sesuai dg SK Mendikbud No 260 /M/2013 tertanggal 30 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

1. Sebelah UTARA sungai Ngonto
2. Sebelah SELATAN berbatasan dengan hutan KPH Jombang /jalan selatan desa Pakis dan desa Tanggalrejo
3. Sebelah BARAT sungai Gunting
4. Sebelah TIMUR sungai Brangkal.



LP3 SDM
 Lembaga Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
SANGGAR BHAGASKARA
 Akta notaris : No 77 tahun 2009 Muchtar,SH.
 Sekretariat : Jl Kebudayaan 3 Bejjong Trowulan Mojokerto Jawa Timur Indonesia
 Telp : +62 321 49 48 64 , 49 19 00, Fax :+62 321 49 49 00,
 Email :bhagaskarabronze14@gmail.com
 Website :www.bhagaskara.org

BAB IV
RENCANA JUMLAH USULAN ANGGARAN
REKONSTRUKSI RUMAH MAJAPAHIT TAHAP LANJUTAN
(TAHUN ANGGARAN 2016 – 2018)

NO	NAMA DESA	JUMLAH (RUMAH)	BIAYA (PER RMH)	JUMLAH
1	Bejjong	700 unit	Rp.60.000.000	Rp. 42.000.000.000
2	Trowulan	350 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
3	Pakis	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
4	Watesumpak	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
5	Beloh	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
6	Panggih	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
7	Domas	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
8	Temon	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
9	Jatipasar	150 unit	Rp.60.000.000	Rp. 9.000.000.000
10	Sentonorejo	150 unit	Rp.60.000.000	Rp. 9.000.000.000
11	Bicak	200 unit	Rp.60.000.000	Rp.12.000.000.000
12	Tawang Sari	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
13	Wonorejo	200 unit	Rp.60.000.000	Rp. 12.000.000.000
14	Kejagan	150 unit	Rp.60.000.000	Rp. 9.000.000.000
TOTAL				Rp.189.000.000.000

Terbilang : (Seratus delapan puluh sembilan Milyar rupiah)



Lampiran 6. Foto Bapak Supriyadi (Pengusul Program Rekonstruksi Rumah Majapahit)



